



Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas
Sriwijaya

MODUL PERKULIAHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Tim Penyusun:

Dr. Yunita, S.P., M.Si.
Prof. Dr. Ir. Sriati, M.S.
Dr. Ir. Yulian Junaidi, M.Si.
Dr. Selly Oktarina, S.P., M.Si.
Nurilla Elysa Putri, S.P., M.Si.
M. Huanza, S.P., M.Si.
Utah Sahiro Ritonga, S.P., M.Sc.
Muhammad Andri Zuliansyah, S.P., M.Si.
Dian Amalina, S.P., M.Si.
Yulia Sari, S.Pi., M.Si.



**LABORATORIUM KOMUNIKASI
DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
2024**

KATA PENGANTAR

Puji iiejaht kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas iiejaht dan karunia-Nya Bab *Pemberdayaan Masyarakat* ini dapat terselesaikan dengan baik. Bab ini disusun sebagai panduan pembelajaran bagi mahasiswa program studi Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian, khususnya dalam memahami peran pendamping dan agen perubahan sosial dalam konteks iiejahteraiiii iiejahteraii yang berkelanjutan.

Materi yang disajikan dalam Bab ini mencakup pemahaman dasar mengenai konsep pemberdayaan, peran dan tanggung jawab pendamping, serta strategi-strategi efektif dalam menggerakkan perubahan sosial. Penyusunan Bab ini diharapkan dapat menjadi sumber belajar yang praktis dan aplikatif bagi para mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan serta wawasan dalam proses pemberdayaan komunitas iiejahteraii, terutama di bidang pertanian dan ekonomi pedesaan. Bab ini juga dilengkapi dengan studi kasus dan contoh-contoh terkini guna memperkuat pemahaman teoritis yang ada.

Harapan kami, Bab ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi mahasiswa dalam menjalankan peran iiejahteraiiil di masa mendatang sebagai pendamping iiejahteraii dan agen perubahan sosial yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan iiejahteraii yang semakin kompleks. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Bab ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Bab di masa yang akan iiejaht.

Akhir kata, semoga Bab *Pemberdayaan Masyarakat* ini dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan turut mendukung terciptanya iiejahteraii yang lebih mandiri dan iiejahtera.

Palembang, Oktober 2024

Penyusun

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
Bab I. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	1
A. Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat.....	1
Upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dua tiga sisi, yaitu	3
Evaluasi / Latihan Soal	4
Bab 2. Filosofi dan Paradigma Pemberdayaan Masyarakat.....	5
Pendahuluan	5
Pemberdayaan Masyarakat Di Amerika Serikat	5
Falsafah pemberdayaan.....	5
Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat	6
Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	8
Paradigma Pemberdayaan	9
Ciri Pemberdayaan.....	10
Pemberdayaan Berbasis Pendidikan.....	10
Pemberdayaan Sebagai Perbaikan.....	11
Pemberdayaan Sebagai Perbaikan.....	11
Tingkatan Keberdayaan Masyarakat.....	11
Falsafah Pemberdayaan.....	12
Prinsip Kesetaraan	12
Prinsip Keswadayaan dan Kemandirian	13
Prinsip Partisipatif dan Keberlanjutan	13
<i>ENABLING</i> (Mengaktifkan)	13
<i>EMPOWERING</i> (Pemberdayaan)	13
<i>PROTECTING</i> (Melindungi)	14

Prinsip Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	14
Prinsip Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	14
Prinsip Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	14
Indikator Keberhasilan	15
Evaluasi / Latihan Soal	16
BAB 3. Kerentanan Sosial dan Pemberdayaan.....	17
Pengertian Kerentanan Sosial	17
Tipe Kerentanan.....	17
Kelompok Rentan.....	18
Kelompok Rentan di Indonesia	18
Hubungan Kelompok Rentan dan Pemberdayaan Masyarakat	19
Evaluasi / Latihan Soal	21
BAB 4. Model-Model Pemberdayaan Masyarakat.....	22
Pengertian Model Pemberdayaan Masyarakat	22
Jenis-jenis Model Pemberdayaan Masyarakat	22
Model Pembelajaran Masyarakat.....	22
Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	23
Contoh Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:	24
Dampak Positif Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	25
Model Pengembangan Masyarakat	26
Beberapa Model Pengembangan Masyarakat:.....	26
Pendekatan dalam Pengembangan Masyarakat:	26
Evaluasi/Latihan Soal:	27
BAB 5. Peran Pendamping dan Agen Perubahan Sosial.....	28
Pendahuluan	28
Pendamping: Definisi dan Peran.....	29
Agen Perubahan Sosial: Definisi dan Peran	32
Keterampilan yang Dibutuhkan Pendamping dan Agen Perubahan Sosial	38
1. Komunikasi Efektif	39
2. Pemecahan Masalah	39
3. Manajemen Konflik.....	40

4. Kepemimpinan	40
Tantangan Dalam Peran Pendamping Dan Agen Perubahan Sosial	41
Peluang Dalam Peran Pendamping Dan Agen Perubahan Sosial.....	43
Evaluasi/Latihan Soal:	45
BAB 6. Penguatan Kapasitas Kelompok Rentan.....	46
Pendahuluan: Definisi Kapasitas Rentan	46
Karakteristik Kelompok Kapasitas Rentan	46
Faktor Penyebab Kerentanan	47
Pentingnya Penguatan Kelompok Kapasitas Rentan	48
Implikasi Kerentanan terhadap Pemberdayaan Masyarakat	49
Karakteristik Kelompok Kapasitas Rentan di Bidang Agribisnis	50
Tantangan yang Dihadapi Kelompok Rentan.....	51
Konsep Penguatan Kapasitas	53
Implementasi Program: Penyusunan Program Penguatan Kelompok Rentan	55
Tantangan dan Solusi Penguatan Kelompok Rentan	57
Evaluasi/Latihan Soal:	59
BAB 7. Teknik Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	60
Pengertian Teknik Partisipatif.....	60
Prinsip-Prinsip Partisipasi.....	62
Metode dan Alat Partisipatif.....	64
Tantangan dalam Penerapan Teknik Partisipatif	66
Evaluasi/Latihan Soal:	68
BAB 8. Inovasi Sosial dan Triple Bottom Line.....	69
Definisi dan Konsep Dasar	69
Dampak Sosial	70
Proses dan Metodologi	72
Metodologi dalam Pengembangan Inovasi Sosial	72
Implementasi Inovasi Sosial di Indonesia	73
Tantangan dan Hambatan	75
<i>TRIPLE BOTTOM LINE</i> (TBL).....	76
Implementasi <i>Triple Bottom Line</i> di Indonesia	78

Evaluasi/Latihan Soal:	80
BAB 9. Implementasi Pemberdayaan Masyarakat.....	81
Pendahuluan	81
Tahapan Penyusunan Program Pemberdayaan Masyarakat	82
Evaluasi / Latihan Soal	88
BAB 11. Implementasi Pemberdayaan Masyarakat.....	89
Pendahuluan	89
Konsep Dasar Multi-Stakeholder dalam Pemberdayaan Masyarakat	89
Pentingnya Pendekatan <i>Multistakeholder</i>	90
Langkah-langkah Membangun Jejaring Multi-Stakeholder	90
1 Identifikasi Stakeholder yang Relevan	90
2 Membangun Kepercayaan dan Komunikasi.....	91
3. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab	91
4 Pengembangan Rencana Kerja Bersama	91
5 Monitoring dan Evaluasi	91
Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai dengan rencana. Keterlibatan semua stakeholder dalam proses ini penting untuk mendapatkan masukan dan perbaikan yang konstruktif. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan di masa depan dan untuk memperbaiki rencana kerja.....	91
Strategi Memelihara Hubungan Antar-Stakeholder	92
1 Membangun Komunikasi Berkelanjutan	92
2 Membina Kepercayaan dan Kerjasama	92
Tantangan dan Hambatan dalam Membangun Jejaring Multi-Stakeholder	92
1 Kurangnya Komitmen dari Stakeholder	92
2 Perbedaan Tujuan dan Prioritas	92
Contoh Kasus Sukses Jejaring Multi-Stakeholder	92
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas di Bali	92
Evaluasi / Latihan Soal	94
BAB 11. Implementasi Pemberdayaan Masyarakat.....	95
Monitoring Dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat.....	95
Manfaat Pengukuran Kinerja	95

Tahapan Dalam Monitoring dan Evaluasi	96
Pengumpulan Data dan Informasi	96
Pendekatan Aspek Teknis Dalam Pengukuran.....	98
Ukuran Menurut Peningkatan	99
Ukuran Menurut Perubahan.....	99
Kaidah Penentuan Indikator	100
Indikasi Keberhasilan Penentuan Indikator Untuk Monitoring dan Evaluasi	101
Penerapan Hasil Monitoring dan Evaluasi	102
BAB 12. Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat.....	104
Manfaat Pengukuran Kinerja	104
Tahapan Dalam Monitoring dan Evaluasi	105
Pengumpulan Data dan Informasi	105
Pendekatan Aspek Teknis Dalam Pengukuran.....	107
Ukuran Menurut Peningkatan	108
Ukuran Menurut Perubahan.....	109
Kaidah Penentuan Indikator	110
Indikasi Keberhasilan Penentuan Indikator Untuk Monitoring dan Evaluasi	111
Penerapan Hasil Monitoring dan Evaluasi	111
BAB 13. Strategi Pengakhiran (<i>Exit Strategy</i>) untuk Keberlanjutan Program.....	113
Strategi Pengakhiran.....	113
Unsur-unsur Strategi Pengakhiran (<i>Exit Strategy</i>).....	115
Langkah-Langkah Menyusun Strategi Pengakhiran (<i>Exit Strategy</i>)	115
Tipe-tipe Strategi Pengakhiran (<i>Exit Strategy</i>).....	116
Faktor-Faktor Keberhasilan Exit Strategy	116
1. Perencanaan yang Matang	116
2. Keterlibatan Pemangku Kepentingan	116
3. Pengembangan Kapasitas Lokal.....	117
4. Sumber Daya yang Memadai	117
5. Monitoring dan Evaluasi	117
6. Fleksibilitas dan Adaptabilitas.....	117
7. Komunikasi yang Jelas.....	118

8. Dukungan dari Pihak Eksternal	118
9. Fokus pada Hasil dan Keberlanjutan.....	118
10. Komitmen Jangka Panjang	119
Risiko yang terjadi jika Exit Strategy tidak disiapkan	119
Tantangan dalam Exit Strategy	119
Contoh Implementasi Strategi Pengakhiran (<i>Exit Strategy</i>)	120
Evaluasi / Latihan Soal	121
BAB 14. Kapita Selekta Pemberdayaan Masyarakat (Kasus: Pertanian di Indonesia)	122
Pendahuluan	122
Tantangan Pedesaan dalam Pemberdayaan Agribisnis	124
Tujuan Revitalisasi Pertanian	127
Tantangan Revitalisasi Pertanian	127
Evaluasi / Latihan Soal	128
Daftar Pustaka.....	129

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hakikat Pemberdayaan	2
Gambar 2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	4
Gambar 3. Prinsip Pemberdayaan	6
Gambar 4. Aspek Pendukung untuk Mewujudkan Pendidikan yang Lebih Baik.....	9
Gambar 5. Proses Transformasi Sosial.....	9
Gambar 6. Tahapan dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat	10
Gambar 7. Tingkat Keberdayaan Masyarakat.....	12
Gambar 8. Makna Berdaya	21
Gambar 9. Unsur-unsur Strategi Pengakhiran (Exit Strategy)	115
Gambar 10. Langkah dalam Menyusun Strategi Pengakhiran (Exit Strategy)	115
Gambar 11. Tantangan Pedesaan dalam Pemberdayaan Agribisnis.....	125

Bab I. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Materi pada Bab 1 ini memiliki muatan sebagai berikut :

- **Capaian belajar untuk sikap dan perilaku (*Learning Outcome for Attitudes and Values*) :**

Sikap

1) AV 2: Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya

Kemampuan:

2) SC 2: Mampu memahami pengetahuan dan teknologi dalam bidang pemberdayaan masyarakat melalui kajian program pemerintah untuk menghasilkan karya inovatif bidang agribisnis yang teruji melalui program pemberdayaan masyarakat.

3) SC 3: Mampu memahami bidang ilmu manajemen, bisnis, kewirausahaan, kelembagaan, sosiologi, penyuluhan dan komunikasi, serta ilmu-ilmu pertanian untuk pengembangan pembangunan agribisnis berkelanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian individu dalam berbagai aspek kehidupan sosial, nasional, dan kenegaraan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan identitas, harkat, dan martabat masyarakat agar mereka dapat bertahan dan berkembang secara mandiri. Melalui pemberdayaan, masyarakat didorong untuk terlibat dalam proses pembangunan, memahami permasalahan yang ada, mengeksplorasi potensi desa mereka, dan merencanakan kegiatan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan agar mereka dapat mengelola dan bertanggung jawab atas program pembangunan di komunitas mereka. Proses pembelajaran dalam pemberdayaan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan masyarakat lokal, karena setiap komunitas memiliki keunikan tersendiri. Penyusunan perangkat daerah dalam bentuk organisasi didasarkan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan.

A. Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah program yang sering dilakukan sebagai upaya mengatasi kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah secara sistematis, terencana, dan bekerja sama dengan sektor usaha dan masyarakat. Untuk mengatasi kemiskinan, ada dua langkah utama yang perlu diambil: Pertama, mengurangi beban pengeluaran melalui bantuan sosial. Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurut Sumodiningrat, 60% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

Paradigma baru pembangunan, yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*" (Chambers, 1995), upaya pemberdayaan masyarakat menjadi kebutuhan dalam setiap upaya pembangunan. Pemberdayaan masyarakat" = "*empowerment*" = "pengentasan kemiskinan" (*poverty alleviation*) .Sejak digulirkannya

Program Inpres No. 5/1993 yang dikenal sebagai Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sejak itu, istilah pemberdayaan dan pengentasan-kemiskinan merupakan “saudara kembar” yang selalu menjadi topik dan kata-kunci dari upaya pembangunan.

Dharmawan (2007) mengutip pendapat Fear and Schwarzweller (1985) yang mengemukakan bahwa *pemberdayaan* dipahami sebagai: “proses di mana anggota semakin lebih dari daerah tertentu atau lingkungan membuat dan melaksanakan keputusan yang bertanggung jawab secara sosial, di mana konsekuensi kemungkinan yang merupakan peningkatan peluang hidup beberapa orang tanpa penurunan (tanpa memburuk) dalam kesempatan hidup orang lain”.

Robbins, Chatterjee, & Canda, 1998) secara singkat menyatakannya sebagai berikut: Pemberdayaan- " proses dimana individu dan kelompok mendapatkan kekuasaan, akses ke sumber daya dan kontrol atas kehidupan mereka sendiri. Dalam melakukannya, mereka mendapatkan kemampuan untuk mencapai aspirasi dan tujuan mereka tertinggi pribadi dan kolektif ".Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat (Mas'ood, 1990). Keberdayaan masyarakat oleh Sumodiningrat (1997) diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Karena itu, pemberdayaan dapat disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumberdaya untuk mencari nafkah (Pranarka, 1996).

Selain itu, konsep pemberdayaan juga dikemukakan oleh beberapa tokoh sebagai berikut.

1. Rappaport, (Weissberg, 1999). Pemberdayaan dipandang sebagai suatu proses: mekanisme yang orang, organisasi dan masyarakat memperoleh penguasaan atas kehidupan mereka.



Gambar 1. Hakikat Pemberdayaan

Dengan memperhatikan batasan-batasan di atas, Dharmawan (2000) mendefinisikan makna pemberdayaan sebagai “*a process of having enough energy enabling people to expand their capabilities, to have greater bargaining power, to make their own decisions, and to more easily access to a source of better living*”. Proses memiliki energi yang cukup memungkinkan orang untuk memperluas kemampuan mereka , untuk memiliki daya tawar yang lebih besar , untuk membuat keputusan sendiri , dan lebih mudah akses ke sumber kehidupan yang lebih baik.

2. World Bank (2001) mengartikan pemberdayaan sebagai :

- a) Upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metoda, produk, tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya.
- b) Proses *meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian* masyarakat.
- c) Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk :
 1. Memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatannya;
 2. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka.
 3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swift dan Levin (1987). Pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik dalam arti: Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan; Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan); Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan. Terjaminnya keamanan; Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa-takut dan kekhawatiran.

Upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dua tiga sisi, yaitu ;

1. Menciptakan suasana /iklim potensi masyarakat berkembang (*enabling*).

Pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Memperkuat meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.

2. Memberdayakan mengandung arti melindungi.

Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.



Gambar 2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Evaluasi / Latihan Soal

1. Apa tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat?
2. Apa saja yang dapat menjadi hambatan dalam pemberdayaan masyarakat?

Bab 2. Filosofi dan Paradigma Pemberdayaan Masyarakat

Materi pada Bab 2 ini memiliki muatan sebagai berikut:

- **Capaian belajar untuk sikap dan perilaku (*Learning Outcome for Attitudes and Values*):**

Sikap:

- A. SC 2: Mampu memahami pengetahuan dan teknologi dalam bidang pemberdayaan masyarakat melalui kajian program pemerintah untuk menghasilkan karya inovatif bidang agribisnis yang teruji melalui program pemberdayaan masyarakat.
- B. SC 3: Mampu memahami bidang ilmu manajemen, bisnis, kewirausahaan, kelembagaan, sosiologi, penyuluhan dan komunikasi, serta ilmu-ilmu pertanian untuk pengembangan pembangunan agribisnis berkelanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pendahuluan

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak "luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi-tawar yang dimiliki. Filosofi Pemberdayaan Masyarakat berfokus pada kerjasama dengan masyarakat untuk membantu mereka meningkatkan harkat sebagai individu. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengembangan pribadi sebagai bagian dari proses pertumbuhan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Menurut Slamet dalam Mardikanto (2003) pemberdayaan diartikan sebagai Proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk member-dayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.

Pemberdayaan Masyarakat Di Amerika Serikat

Falsafah 3-T: *teach, truth, and trust* (pendidikan, kebenaran dan kepercayaan/keyakinan). Artinya, pemberdayaan merupakan kegiatan pendidikan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang telah diyakini. Dalam pemberdayaan, masyarakat dididik untuk menerapkan setiap inovasi (nformasi baru) yang telah diuji kebenarannya dan telah diyakini akan dapat memberikan manfaat (ekonomi maupun non ekonomi) bagi perbaikan kesejahteraannya.

Falsafah pemberdayaan

Falsafah pemberdayaan adalah bekerja sama dengan masyarakat untuk membantu mereka meningkatkan harkat sebagai manusia.. Bekerja bersama dengan masyarakat untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia

(*helping people to help themselves*). Penyuluh/fasilitator harus bekerjasama dengan masyarakat, dan bukannya bekerja untuk masyarakat (Adicondro, 1990). Pemberdayaan tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan kemandirian. Pemberdayaan yang dilaksanakan, harus selalu mengacu kepada terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan peningkatan harkatnya sebagai manusia. pemahaman penyuluhan merupakan salah satu sistem pendidikan, Mudjiyo (1989) Kaitan falsafah pemberdayaan dengan pendidikan yang memiliki falsafah: *idealisme*, *realisme* dan *pragmatisme* Artinya bahwa pemberdayaan pertanian harus mampu *menumbuhkan cita-cita* yang melandasi untuk selalu berfikir kreatif dan dinamis. Pemberdayaan harus selalu mengacu kepada *kenyataan-kenyataan yang ada* dan dapat ditemui di lapang atau harus selalu disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi. Pemberdayaan *harus melakukan hal-hal terbaik yang dapat dilakukan*, dan bukannya mengajar kondisi terbaik yang sulit direalisasikan.

Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijaksanaan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan :

- 1) *Mengerjakan*, artinya, kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/ menerapkan sesuatu.
- 2) *Akibat*, artinya, kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat.
- 3) *Asosiasi*, artinya, setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya.



Gambar 3. Prinsip Pemberdayaan

Dahama dan Bhatnagar (1980) mengungkapkan prinsip-prinsip pemberdayaan mencakup:

- 1) *Minat dan Kebutuhan*, artinya, pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat.

- 2) Organisasi masyarakat bawah, artinya pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan/menyentuh organisasi masyarakat bawah, sejak dari setiap keluarga/kekerabatan.
- 3) Keragaman budaya, artinya, pemberdayaan harus memperhatikan adanya keragaman budaya.
- 4) Perubahan budaya, artinya setiap kegiatan pemberdayaan akan mengakibatkan perubahan budaya.
- 5) Kerjasama dan partisipasi, artinya pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang.
- 6) Demokrasi dalam penerapan ilmu, artinya dalam pemberdayaan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk menawar setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan.
- 7) Belajar sambil bekerja, artinya dalam kegiatan pemberdayaan harus diupayakan agar masyarakat dapat “belajar sambil bekerja” atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan.
- 8) Penggunaan metoda yang sesuai, artinya pemberdayaan harus dilakukan dengan penerapan metoda yang selalu disesuaikan dengan kondisi (lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai sosial-budaya) sarasannya.
- 9) Kepemimpinan, artinya, penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan/kepuasannya sendiri, dan harus mampu mengembangkan kepemimpinan.
- 10) Spesialis yang terlatih, artinya, penyuluh harus benar-benar pribadi yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh.
- 11) Segenap keluarga, artinya, penyuluh harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial.
- 12) Kepuasan, artinya, pemberdayaan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan.

Pergeseran kebijakan pembangunan pertanian dari peningkatan produktivitas usahatani ke arah pengembangan agribisnis, prinsip-prinsip (Soedijanto, 2001):

- 1) Kesukarelaan
- 2) Otonom
- 3) Keswadayaan
- 4) Partisipatif
- 5) Egaliter
- 6) Demokrasi
- 7) Keterbukaan
- 8) Kebersamaan
- 9) Akuntabilitas
- 10) Desentralisasi

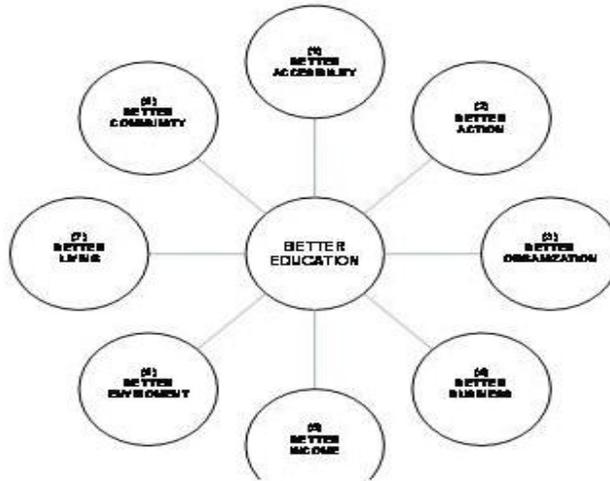
Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat (*people centered development*). Tujuan pemberdayaan diarahkan pada terwujudnya perbaikan teknis bertani (*better farming*), perbaikan usahatani (*better business*), dan perbaikan kehidupan petani dan masyarakatnya (*better living*) perbaikan-perbaikan PEMBANGUNAN (Deptan, 2002):

1. Perbaikan kelembagaan pertanian (*better organization*) demi terjalannya kerjasama dan kemitraan antar stakeholders.
2. Perbaikan kehidupan masyarakat (*better community*),
3. Perbaikan usaha dan lingkungan hidup (*better environment*) demi kelangsungan usahatannya

Tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut :

1. Perbaikan pendidikan (*better education*)
Perbaikan pendidikan (*better education*) dalam konteks pemberdayaan masyarakat harus dirancang sebagai bentuk pendidikan yang lebih baik dan lebih efektif.
2. Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*)
3. Perbaikan kelembagaan (*better institution*)
Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah memperbaiki kelembagaan melalui peningkatan kualitas kegiatan atau tindakan yang dilakukan.
4. Perbaikan usaha (*better business*)
Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan semangat belajar atau dengan memperbaiki akses ke bisnis.
5. Perbaikan pendapatan (*better income*)
Dengan adanya peningkatan usaha atau bisnis melalui program pemberdayaan masyarakat, diharapkan akan ada dampak positif pada peningkatan pendapatan individu. Peningkatan pendapatan ini mencakup pendapatan keluarga dan komunitas secara keseluruhan.
6. Perbaikan lingkungan (*better environment*)
Meskipun perbaikan lingkungan tidak langsung terkait dengan tujuan-tujuan sebelumnya, diharapkan peningkatan pendapatan dan pendidikan akan berdampak positif pada lingkungan di sekitar masyarakat.
7. Perbaikan kehidupan (*better living*)
8. Perbaikan masyarakat (*better community*)
Perbaikan masyarakat diharapkan tercapai setelah pendapatan meningkat dan kualitas lingkungan membaik sebagai hasil dari keberhasilan pemberdayaan di bidang lingkungan fisik dan sosial.



Gambar 4. Aspek Pendukung untuk Mewujudkan Pendidikan yang Lebih Baik

Paradigma Pemberdayaan

Paradigma pemberdayaan masyarakat adalah upaya revitalisasi dakwah yang bertujuan untuk mengubah kondisi masyarakat melalui berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan, dan kesehatan. Pemberdayaan ini merupakan paradigma pembangunan manusia, yang berfokus pada pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people-centered development*), dengan mendorong inisiatif masyarakat dan partisipasi dari tingkat bawah. Pembangunan manusia :

1. Berpusat pada rakyat mendorong prakarsa masyarakat, berakar dari bawah
Menumbuhkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya
2. Berpusat pada masyarakat, partisipatif, memberdayakan dan berkelanjutan



Gambar 5. Proses Transformasi Sosial



Gambar 6. Tahapan dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat

Ciri Pemberdayaan

- 1) Community leader: Melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat atau pemimpin terlebih dahulu. Misalnya Camat, lurah, kepala adat, ustad, dan sebagainya.
- 2) Community organization: Organisasi seperti PKK, karang taruna, majlis taklim, dan lainnya merupakan potensi yang dapat dijadikan mitra kerja dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
- 3) Community fund: Dana yang dikembangkan dengan prinsip gotong royong sebagai salah satu prinsip pemberdayaan masyarakat.
- 4) Community material: setiap daerah memiliki potensi tersendiri yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pelayanan umum. Misalnya, desa dekat kali penghasil pasir memiliki potensi untuk melakukan pengerasan jalan untuk memudahkan akses mengangkut produk pertanian.
- 5) Community knowledge: pemberdayaan bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat dan petani dengan berbagai penyuluhan yang menggunakan pendekatan.
- 6) Community technology: teknologi sederhana di komunitas dapat digunakan untuk pengembangan program pembangunan pertanian misalnya teknologi bio kompos atau MOL.

Pemberdayaan Berbasis Pendidikan

Pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan tidak hanya terbatas pada perbaikan materi, perbaikan metode. Perbaikan perlu menyangkut waktu dan tempat, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat tak kalah pentingnya adalah bagaimana perbaikan pendidikan non formal dalam proses pemberdayaan mampu menumbuhkan semangat dan keinginan untuk terus belajar tanpa batas waktu dan umur.

Pemberdayaan Sebagai Perbaikan

1. Perbaikan aksesibilitas (better accessibility) artinya, seiring tumbuh dan berkembangnya semangat belajar sepanjang hayat, diharapkan dapat memperbaiki aksesibilitas, utamanya aksesibilitas terhadap sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan/keuangan, penyedia produk, peralatan dan lembaga pemasaran.
2. Perbaikan tindakan (better action) artinya, melalui bekal perbaikan pendidikan dan aksesibilitas dengan beragam sumber daya (SDM, SDA dan sumber daya lainnya/buatan) yang lebih baik, diharapkan akan melahirkan tindakan-tindakan yang semakin membaik.
3. Perbaikan kelembagaan (better institution) artinya, dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan masyarakat, terutama pengembangan jejaring kemitraan usaha, sehingga dapat menciptakan posisi tawar (bargaining position) yang kuat pada masyarakat.
4. Perbaikan usaha (better business) artinya, perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan dapat memperbaiki usaha/bisnis yang dijalankan.

Pemberdayaan Sebagai Perbaikan

1. Perbaikan pendapatan (better income) artinya, perbaikan bisnis yang dijalankan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
2. Perbaikan lingkungan (better environment) artinya, perbaikan pendapatan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan karena faktor kemiskinan atau terbatasnya pendapatan.
3. Perbaikan kehidupan (better living) artinya, tingkat pendapatan yang memadai dan lingkungan yang sehat, diharapkan dapat memperbaiki situasi kehidupan setiap keluarga serta masyarakat.
4. Perbaikan masyarakat (better community) artinya, situasi kehidupan yang lebih baik, dan didukung dengan lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang juga lebih baik.

Tingkatan Keberdayaan Masyarakat

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar
2. Terjangkaunya sistem sumber atau akses terhadap layanan publik
3. Kesadaran akan kekuatan dan kelemahan atas diri sendiri dan juga lingkungannya
4. Mampu untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang bermanfaat di masyarakat dan lingkungan yang lebih luas
5. Kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya, dapat dilihat dari keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi dan pemerintahan.



Gambar 7. Tingkat Keberdayaan Masyarakat

Falsafah Pemberdayaan

- 1) Menjadikan masyarakat/kelompok sasaran sebagai mitra sejajar, atau biasa diistilahkan duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi.
- 2) Menjadi pendengar yang baik dan sabar dalam menerima segala keluhan dan kritikan masyarakat.
- 3) Tidak menunjukkan sikap lebih tahu atau mengetahui segalanya dan terkesan ingin menggurui.
- 4) Tidak tergesa-gesa dalam berkomunikasi dan bertindak sehingga terlihat ingin cepat-cepat menyelesaikan suatu tahapan kegiatan, tanpa memperhatikan situasi sekitarnya. apakah masyarakat sudah paham atau masih ada yang bermuka bingung.
- 5) Menguasai materi yang diberikan tetapi tetap memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpendapat dan melakukan pengulangan-pengulangan setiap tahap kegiatan sampai mereka dapat melakukannya sendiri.
- 6) Tidak berfikir bahwa hal yang utama ada pada kesuksesan hasil akhir suatu kegiatan, tetapi justru pada setiap tahapan atau proses kegiatan mulai dari awal (identifikasi masalah), perencanaan, pembagian tugas (organizing), pelaksanaan sampai pada proses evaluasi dan monitoring, seluruhnya dapat dilaksanakan, diikuti dan dipahami oleh masyarakat/ kelompok sasaran secara partisipatif.

Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat ialah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun ialah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

Prinsip Keswadayaan dan Kemandirian

Prinsip keswadayaan menekankan pada penghargaan dan pemberdayaan kemampuan masyarakat daripada mengandalkan bantuan dari pihak lain. Konsep ini tidak melihat orang miskin sebagai individu yang sepenuhnya tidak berdaya, melainkan sebagai subjek yang memiliki sedikit kemampuan. Mereka memiliki potensi untuk menabung, pengetahuan mendalam tentang kendala yang mereka hadapi, pemahaman tentang kondisi lingkungan mereka, tenaga kerja, kemauan, serta norma-norma sosial yang telah lama dijalankan. Semua potensi ini harus digali dan dijadikan modal dasar dalam proses pemberdayaan. Bantuan dari pihak lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai pelengkap, agar tidak justru mengurangi tingkat keswadayaan masyarakat tersebut.

Prinsip Partisipatif dan Keberlanjutan

Program pemberdayaan yang efektif dalam menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang bersifat partisipatif, di mana perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasinya dilakukan oleh masyarakat sendiri. Namun, untuk mencapai tingkat kemandirian tersebut, diperlukan waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping dengan komitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan harus dirancang untuk berkelanjutan, meskipun pada tahap awal pendamping mungkin memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan dengan masyarakat. Secara bertahap, peran pendamping akan semakin berkurang, hingga akhirnya tidak diperlukan lagi karena masyarakat telah mampu mengelola kegiatan mereka secara mandiri.

***ENABLING* (Mengaktifkan)**

Enabling dapat diartikan sebagai menciptakan kondisi yang mendukung pengembangan potensi masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat menjadi mandiri dan memiliki wawasan bisnis yang berkelanjutan yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Asumsinya adalah pemahaman bahwa setiap orang, setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan artinya tidak ada orang atau masyarakat tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta upaya untuk mengembangkannya.

***EMPOWERING* (Pemberdayaan)**

Empowering berarti memberdayakan atau memberikan kekuatan kepada seseorang untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Upaya yang paling pokok dalam empowerment ini adalah meningkatkan taraf pendidikan dan derajat perekonomian serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi (modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, pasar) termasuk pembangunan sarana dan prasarana dasar seperti (irigasi, jalan, listrik, sekolah, layanan kesehatan) yang dapat dijangkau lapisan masyarakat paling bawah yang keberdayannya sangat kurang.

Diperlukan program khusus, karena program-program umum yang berlaku untuk semua tidak selalu menyentuh kepentingan lapisan masyarakat seperti ini.

PROTECTING (Melindungi)

Protecting mengacu pada melindungi dan membela kepentingan masyarakat, terutama kelompok yang rentan. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, protecting dilakukan dengan membangun sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan. Langkah ini bertujuan melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur penting, sehingga pemberdayaan masyarakat sangat erat hubungannya dengan pementapan, pembudayaan dan pengalaman demokrasi. Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran sosial. Ditegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas bidang ekonomi saja tetapi juga secara politis, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar (bargaining position) baik secara nasional maupun internasional. Sebagai titik fokusnya adalah aspek lokalitas, karena civil society akan merasa lebih siap diberdayakan lewat isu-isu lokal.

Prinsip Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pemberdayaan dilaksanakan dengan penuh demokratis, penuh keikhlasan, tidak ada unsur paksaan, karena setiap masyarakat mempunyai masalah, kebutuhan, dan potensi yang berbeda, sehingga mereka mempunyai hak yang sama untuk diberdayakan. Setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat sebaiknya berdasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi yang dimiliki kelompok sasaran. Hal ini dapat diketahui dengan jelas jika proses identifikasi dan sosialisasi pada tahap awal berlangsung dengan melibatkan penuh kelompok sasaran. Sasaran utama pemberdayaan adalah masyarakat, sehingga harus diposisikan sebagai subjek/pelaku dalam kegiatan pemberdayaan, dan menjadi dasar utama dalam menetapkan tujuan, pendekatan, dan bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan.

Prinsip Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Menumbuhkan kembali nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, seperti jiwa gotong royong, yang muda menghormati orang yang lebih tua, dan yang lebih tua menyayangi yang lebih muda, karena hal ini menjadi modal sosial dalam pembangunan. Dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, karena merupakan sebuah proses yang membutuhkan waktu, dilakukan secara logis dan sederhana menuju ke hal yang lebih kompleks. Memperhatikan keragaman karakter, budaya dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sudah mengakar atau berlangsung lama secara turun temurun.

Prinsip Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat, terutama aspek sosial dan ekonomi . Tidak ada unsur diskriminasi, utamanya terhadap perempuan selalu menerapkan proses pengambilan keputusan secara partisipatif, seperti penetapan waktu, materi, metode kegiatan dan lain-lain . Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam

berbagai bentuk, baik yang bersifat fisik (materi, tenaga, bahan) maupun non fisik (saran, waktu, dukungan) Aparat/agen pemberdayaan bertindak sebagai Fasilitator yang harus memiliki kemampuan/kompetensi sesuai dengan potensi, kebutuhan, masalah yang dihadapi masyarakat mampu bekerjasama dengan semua pihak/institusi maupun lembaga masyarakat /LSM yang terkait.

Indikator Keberhasilan

1. Kebebasan mobilitas
Kemampuan seseorang untuk bepergian keluar dari rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, tempat ibadah, atau rumah orang lain. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu dapat pergi sendirian.
2. Kemampuan membeli barang kebutuhan kecil
Kemampuan seseorang untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari keluarga (seperti beras, minyak goreng, bumbu dapur) atau kebutuhan pribadi (seperti minyak rambut, sampo, rokok, bedak). Seseorang dianggap mampu jika ia bisa membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin dari orang lain, termasuk pasangannya, apalagi jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan uangnya sendiri.
3. Kemampuan membeli barang kebutuhan besar
Kemampuan seseorang untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, atau pakaian untuk keluarga. Poin indikator tinggi ketika individu dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin dari orang lain, dan lebih lagi jika ia bisa membeli barang tersebut dengan uangnya sendiri.
4. Keerlibatan dalam pengambilan keputusan rumah tangga
Kemampuan seseorang untuk membuat keputusan sendiri atau bersama pasangan (suami/istri) terkait urusan keluarga, seperti renovasi rumah, pembelian hewan ternak, atau pengajuan kredit usaha.
5. Kebebasan dari dominasi keluarga
Responden ditanyakan apakah dalam satu tahun terakhir ada anggota keluarga (suami, istri, anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, atau perhiasan darinya tanpa izin, yang melarangnya memiliki anak, atau melarangnya bekerja di luar rumah.
6. Kesadaran hukum dan politik
Mengetahui nama salah satu pegawai pemerintah desa/kelurahan, seorang anggota DPRD setempat, nama presiden, serta memahami pentingnya memiliki surat nikah dan pengetahuan tentang hukum waris.
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes
Seseorang dianggap 'berdaya' jika pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, seperti terhadap suami yang memukul istri, istri yang mengabaikan suami dan keluarganya, gaji yang tidak adil, penyalahgunaan bantuan sosial, atau penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi dan pegawai pemerintah.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga

Memiliki rumah, tanah, aset produktif, atau tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki hal-hal tersebut secara mandiri atau terpisah dari pasangannya.

Evaluasi / Latihan Soal

1. Apa itu filosofi pemberdayaan masyarakat dan mengapa penting?
2. Apa perbedaan antara paradigma pemberdayaan masyarakat dan paradigma?

BAB 3. Kerentanan Sosial dan Pemberdayaan

Materi pada Bab 3 ini memiliki muatan sebagai berikut :

- **Capaian belajar untuk sikap dan perilaku (*Learning Outcome for Attitudes and Values*) :**

Sikap:

A. AV 3:

Kemampuan Bidang Ilmu dan Pengetahuan

B. SC 2: Mampu memahami pengetahuan dan teknologi dalam bidang pemberdayaan masyarakat melalui kajian program pemerintah untuk menghasilkan karya inovatif bidang agribisnis yang teruji melalui program pemberdayaan masyarakat.

C. SC 3: Mampu memahami bidang ilmu manajemen, bisnis, kewirausahaan, kelembagaan, sosiologi, penyuluhan dan komunikasi, serta ilmu-ilmu pertanian untuk pengembangan pembangunan agribisnis berkelanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pengertian Kerentanan Sosial

1. Kerentanan sosial mengacu pada ketidakmampuan seseorang, organisasi, dan masyarakat untuk menahan dampak buruk dari berbagai pemicu stres yang mereka hadapi. Dampak-dampak tersebut antara lain disebabkan oleh karakteristik yang melekat pada interaksi sosial, institusi, dan sistem nilai budaya (Wiki).
2. Kerentanan menurut Kementrian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia adalah suatu kondisi yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang atau kelompok orang terhadap sebuah ancaman yang terjadi.
3. Menurut Awotona dalam Marbruno Habibi (2013) unsur utama kerentanan adalah kerentanan sosial, kerentanan kelembagaan, kerentanan system, kerentanan lingkungan, kerentanan ekonomi dan kerentanan yang disebabkan karena tidak mengedepankan konsep keberlanjutan (suistainable).

Tipe Kerentanan

Kerentanan dibagi menjadi 3 tipe, yaitu kerentanan fisik binaan (infrastruktur), kerentanan sosial kependudukan, dan kerentanan ekonomi

1. Kerentanan Fisik, binaan (infrastruktur) menggambarkan suatu kondisi (infrastruktur) yang rawan terhadap faktor ancaman tertentu.
2. Kerentanan Sosial, merupakan kondisi tingkat kerapuhan sosial dalam menghadapi ancaman
3. Kerentanan Ekonomi, merupakan suatu kondisi yang menggambarkan tingkat kerapuhan ekonomi dalam menghadapi ancaman

Kelompok Rentan

Masyarakat dunia saat ini telah mengakui berbagai bentuk keberagaman, mulai dari yang bersifat ciri fisik hingga identitas sosial. Beberapa kelompok memiliki bentuk keberagaman yang unik dan khas, sehingga membutuhkan akses lebih untuk mendapatkan layanan dasar. Kelompok ini disebut sebagai kelompok rentan.

Menurut Inter-agency Network for Education in Emergencies, kelompok rentan adalah mereka yang memiliki kerentanan dan mengalami keterbatasan fisik, mental, dan sosial sehingga tidak mampu mengakses layanan dasar dan membutuhkan bantuan khusus dari negara atau komunitas lainnya. Menurut pandangan kesehatan National Collaborating Centre for Determinants of Health menjelaskan kelompok rentan adalah kelompok atau komunitas yang berisiko mengalami masalah kesehatan yang buruk. Umumnya, dikarenakan mereka tidak dapat mencapai akses sosial, ekonomi, dan lingkungan. Beberapa lembaga mengidentifikasi kelompok rentan lebih luas. Icelandic Human Rights Centre menyebut, persoalan struktural, seperti kemiskinan atau pandangan budaya, adalah penyebab kerentanan. Berdasarkan itu, mereka mengklasifikasi 12 kelompok rentan, mulai dari perempuan, anak, hingga pencari suaka

Kelompok Rentan di Indonesia

Frasa “kelompok masyarakat rentan” ditemukan pada UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM) (UU No. 39). Dalam peraturan tersebut, kelompok rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan orang dengan disabilitas. UU No. 39 tidak memberi definisi atau keterangan lebih lanjut tentang kelompok rentan. Walau begitu, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019 (RANHAM 2015-2019) menjelaskan ruang lingkup kelompok rentan meliputi penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia, fakir miskin, perempuan, anak, pengungsi, masyarakat adat, dan pekerja migran. Walau tidak eksplisit, konsep pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) Kementerian Sosial RI, adalah juga kelompok rentan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 (Permensos No.5 2019) menjelaskan PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Mereka memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmani dan rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Kemensos RI mengelompokkan setidaknya 26 bentuk PPKS berdasarkan klasifikasi hambatan yang dialami. Beberapa kategori PPKS, di antaranya anak balita terlantar, gelandangan, hingga komunitas adat terpencil. Di Indonesia hak kelompok rentan dilindungi pasal 5 ayat 3 UU No. 39. Pasal tersebut menyatakan setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Beberapa hak yang harus dimiliki kelompok rentan:

- 1) Akses untuk kebutuhan hidup sehari-hari
- 2) Pekerjaan dan upah yang layak,
- 3) Akses ke pelayanan kesehatan
- 4) Kesempatan mengakses pendidikan
- 5) Lingkungan hidup yang bersih dan nyaman
- 6) Akses ke keadilan dan hukum
- 7) Fasilitas publik yang tepat guna, dll.

Hubungan Kelompok Rentan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kelompok rentan merupakan bagian dari masyarakat luas. Karena itu program untuk meningkatkan kapasitas kelompok rentan harus melalui pendekatan yang berbasis kepada masyarakat. Community Based atau pendekatan yang Berbasis Masyarakat adalah upaya pemberdayaan masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri.

Tujuan dari pendekatan yang berbasis masyarakat adalah meningkatnya kapasitas masyarakat dan mencoba untuk menurunkan kerentanan individu, keluarga dan masyarakat luas serta adanya perubahan PKS masyarakat dalam upaya menangani permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Disamping itu program berbasis masyarakat menggunakan pendekatan yang berbasis realita bahwa dengan cara-cara yang relatif sederhana dan mudah dilaksanakan, maka masyarakat di kalangan bawahpun dapat melakukan perubahan yang positif menuju ke arah yang lebih baik.

Prinsip-prinsip utama yang diperlukan dalam menjalankan program berbasis masyarakat adalah tercermin dalam akronim KAPASITAS yang dapat dijelaskan berikut ini:

1. Kemitraan

Program berbasis masyarakat hanya akan berhasil optimal bila ada kemitraan, dan partisipasi yang sangat tinggi dari semua komponen yang ada di sektor masyarakat, pemerintah maupun institusi / LSM lainnya. Memperkuat kemitraan dan partisipasi dalam hal ini tidak hanya diarahkan pada penyediaan dana, material dan tenaga, namun juga dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya, termasuk sustainabilitas program. Memperkuat kemitraan dan partisipasi dimaksudkan juga membina komunikasi, koordinasi dan kerjasama dari berbagai disiplin dan profesi terkait seperti meteorologis, pekerja pengembangan masyarakat, praktisi kesehatan ekonom, biolog, medis/ paramedis, geolog, pekerja sosial, insinyur, konselor, guru dan sebagainya.

2. Advokasi

Program berbasis masyarakat sangat memerlukan upaya advokasi, sosialisasi, dan kolaborasi dari semua pihak yang berkepentingan dengan upaya memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Advokasi pada pihak-pihak internal PMI (seperti staff, Pengurus, relawan dan para pelatih) maupun pihak-pihak eksternal (seperti Pemerintah, Bakornas, Satkorlak, Satlak PB, LSM, Badan, dinas, masyarakat dan instansi lainnya) sangat menentukan pelaksanaan program maupun keberlangsungannya. Upaya advokasi ini diharapkan dapat membina komunikasi dan kerjasama sama yang sangat kuat dalam mencapai tujuan program

3. Pemberdayaan

Program berbasis masyarakat diharapkan dapat menurunkan tingkat kerentanan masyarakat dilaksanakan dengan memberdayakan kapasitas masyarakat. Tumbuhnya ketidakpastian situasi lingkungan, fisik, sosial, ekonomi dan politik menyebabkan warga dan masyarakat lainnya menjadi sangat rentan terhadap bahaya dan dampak bencana.

Hal ini memerlukan banyak upaya bagaimana masyarakat dapat diberdayakan kapasitasnya melalui pengorganisasian / mobilisasi masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana, penyadaran sosial dan ekonomi, penyadaran lingkungan, pendidikan /

pelatihan dan sejenisnya. Pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pembuatan kebijakan dan program berbasis masyarakat, diperlukan agar masyarakat memiliki akses untuk mengontrol inputs, proses, outputs dan keberlangsungan program berbasis masyarakat

4. Analisis

Pelaksanaan Program yang berbasis masyarakat harus berdasarkan hasil pengenalan situasi, dan analisis internal dan eksternal secara mendalam tentang kondisi riil masyarakat. Masyarakat harus diajak untuk mengenali situasi lingkungannya. Setelah itu, mereka harus diajak untuk menganalisis internal dan eksternal untuk mengetahui permasalahan yang ada, sekaligus penyebab dari permasalahan itu sendiri.

Hasil analisis yang dilakukannya oleh masyarakat itu sendiri, diharapkan dapat membuat masyarakat menjadi sadar, bahwa ada hal-hal yang memicu kerentanan mereka yang mereka buat sendiri atau karena lebih disebabkan karena faktor eksternal. Mereka sadar bahwa mereka mestinya dapat mengatasi kerentanan tersebut, asal mereka melakukan upaya-upaya penurunan tingkat bahaya, risiko dan dampak yang terjadi

5. Swadaya

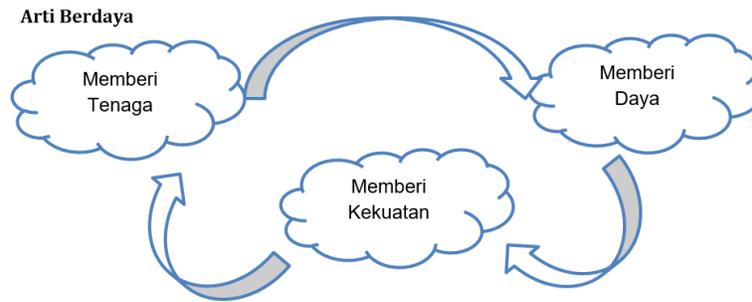
Program berbasis masyarakat menggunakan pendekatan Bottom – Up, bukan Top – Down. Sebagai yang berbasis pada masyarakat, maka keberhasilan pelaksanaannya sangat bertumpu pada swadaya masyarakat sendiri. Dalam artian, menggunakan sumber-sumber daya, potensi, dan komponen-komponen yang telah dimiliki oleh masyarakat. Mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, masyarakat harus diberikan peran utama. Dalam proyek mitigasi misalnya, harus memanfaatkan tenaga masyarakat, sumber-sumber material, infrastruktur serta fasilitas yang ada. Peranan pihak eksternal adalah memfasilitasi dan menambahkan sumber-sumber yang belum ada, yang pada akhirnya sepenuhnya akan diserahkan pengelolaannya pada swadaya masyarakat

6. Integrasi

Program berbasis masyarakat mengintegrasikan model, instrument, metode, pendekatan dan strategi dengan pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang telah dimiliki oleh masyarakat setempat. pada umumnya masyarakat memiliki pengetahuan tersendiri dalam menghadapi permasalahan yang ada baik yang rasional maupun yang irasional. Dan program ini mengintegrasikan berbagai pola dari berbagai sumber namun tetap terintitusioan dalam pola dan tatanan kehidupan masyarakat setempat

7. Terfokus

Program berbasis masyarakat harus menfokus pada pemenuhan kebutuhan utama masyarakat, serta benar-benar memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Untuk itu, Program ini memerlukan pemrograman sistem, prosedur dan pedoman operasional serta pelibatan penuh masyarakat secara fisik, mental dan emosional. Maksud diperlukannya pemrograman sistem, prosedur dan pedoman operasional adalah untuk memastikan efisiensi dan pemanfaatan sumber-sumber daya seperti dana, waktu, material, informasi dan teknologi yang benar-benar terfokus pada tujuan riil.



Gambar 8. Makna Berdaya

Evaluasi / Latihan Soal

1. Apa Yang Dimaksud Dengan Kerentanan Sosial?
2. Siapa Saja Yang Termasuk Dalam Kelompok Rentan?
3. Apa Kaitannya Kerentanan Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat

BAB 4. Model-Model Pemberdayaan Masyarakat

Materi pada Bab 4 ini memiliki muatan sebagai berikut :

- **Capaian belajar untuk sikap dan perilaku (*Learning Outcome for Attitudes and Values*):**

Kemampuan Bidang Ilmu Pengetahuan

- A. SC 3: Mampu memahami bidang ilmu manajemen, bisnis, kewirausahaan, kelembagaan, sosiologi, penyuluhan dan komunikasi, serta ilmu-ilmu pertanian untuk pengembangan pembangunan agribisnis berkelanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat.
- B. SC 4: Mampu memahami secara operasional prinsip-prinsip sosial, ekonomi dan teknologi yang melandasi pengelolaan usaha pertanian dan industri pertanian serta aspek sosial-budaya di pedesaan untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pengertian Model Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan yang digunakan pekerja sosial utk terlibat dalam masyarakat & mengatasi kebutuhan serta permasalahan mereka. Menurut Todaro P.M. (1986) bahwa ada 3 (tiga) komponen dasar suatu model yakni seperangkat variabel, suatu hubungan fundamental dan sejumlah koefisien yang strategik, dari ini secara sederhana dapat dikemukakan bahwa model adalah:

1. Simplifikasi/penyederhanaan dari suatu fenomena/realitas.
2. Hubungan antar variabel-variabel tertentu yang berkaitan satu sama lain dalam menerangkan suatu masalah/fenomena tertentu.
3. Pola atau strategi untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis dan holistik

Jenis-jenis Model Pemberdayaan Masyarakat

1. Model Pemberdayaan Masyarakat
2. Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
3. Model Pengembangan Masyarakat

Model Pembelajaran Masyarakat

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan model pendidikan yang mana segala hal yang terkait di dalamnya lebih banyak melibatkan peran masyarakat daripada keterlibatan atau campur tangan negara (pemerintah). Masyarakat mempunyai wewenang dan tanggung jawab besar dalam penyelenggaraannya. Model Pendidikan berbasis masyarakat merupakan tawaran terhadap mainstream pendidikan yang berbasis negara

Menurut Misbah yang dikutip oleh Eroby menyatakan bahwa kemunculan paradigma pendidikan berbasis masyarakat dipicu oleh arus besar moderenisasi yang menghendaki

terciptanya demokratisasi dalam segala kehidupan manusia, termasuk pendidikan. Pendidikan berbasis masyarakat di anggap dapat menjadi salah satu pendidikan yang dapat menutup kekurangan dari pendidikan berbasis Negara.

Lahirnya demokratisasi pendidikan memang bukan untuk menyembuhkan berbagai problematika pendidikan seperti halnya menghapuskan diskriminasi pendidikan dan mendapatkan pendidikan murah dan bermutu, tapi setidaknya merupakan peluang untuk berbagai lapisan masyarakat mendapatkan kesempatan yang adil.

Konsep demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan tertera pada UU Sisdiknas 2003 Bab III, tentang prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan: "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa".

Dan Ayat 6 menyebutkan bahwa: "Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan". Pendidikan berbasis masyarakat pada dasarnya dikembangkan dan dilaksanakan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri

Pendidikan berbasis masyarakat pada dasarnya dikembangkan dan dilaksanakan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Beberapa contoh dari lembaga pendidikan berbasis masyarakat adalah TKA/TPA, lembaga kursus yang dikelola masyarakat, pesantren, dan sebagainya. Pendidikan berbasis masyarakat dapat mengakomodasi berbagai teori-teori pembelajaran. Teori kecerdasan majemuk (*multiple intelligence*), belajar sosial (*social learning*), dan sebagainya, dapat diterapkan dalam pendidikan berbasis masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, pendidikan berbasis masyarakat menurut Nielsen merujuk pada pengertian yang beragam yaitu: 1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan 2) Pengambilan keputusan yang berbasis sekolah 3) Pendidikan yang diberikan oleh sekolah swasta atau yayasan 4) Pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh pusat pelatihan milik swasta 5) Pendidikan luar sekolah yang disediakan oleh pemerintah 6) Pusat kegiatan belajar masyarakat 7) Pendidikan luar sekolah yang diberikan oleh organisasi akar rumput seperti Lembaga Sosial Masyarakat dan pesantren.

Prinsip Pendidikan

1. Demokratis Dan Berkeadilan
2. Sistemik, Terbuka, Multimakna
3. Proses Pemberdayaan Sepanjang Hayat
4. Keteladanan, Kemauan, Dan Kreativitas
5. Budaya Calistung
6. Memberdayakan Semua Komponen Masyarakat

Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah. Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah usaha untuk mengubah kondisi masyarakat tertentu dalam memecahkan berbagai persoalan terkait peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat ini dilakukan untuk mendorong, memotivasi, dan menggali potensi yang dimiliki masyarakat. Dengan begitu, kondisi masyarakat akan berubah dari yang tidak berdaya menjadi berdaya. Pemberdayaan ini dilakukan supaya masyarakat kurang mampu dapat melepaskan diri dari kemiskinan.

Pemberdayaan dalam bidang ekonomi mengacu pada kapasitas untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mencakup pengelolaan dan pendistribusian sumber daya moneter. Hal ini memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Upaya pemberdayaan tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Diantaranya adalah pihak pemerintah dan juga lembaga swadaya masyarakat. Terdapat tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang perlu Anda ketahui yakni agar masyarakat mempunyai pengetahuan dan juga keterampilan yang digunakan dalam kehidupan. Selain itu masyarakat juga diharapkan untuk meningkatkan pendapatan, memecahkan permasalahan yang dihadapi, serta mengembangkan sistem untuk mengakses sumber daya yang diperlukan.

Contoh Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:

1. Pemberdayaan UMKM

Program yang pertama adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM. Pemberdayaan yang satu ini akan melihat mengenai potensi yang ada di daerah tersebut. Misalnya saja Kota Klaten, Kota Klaten terkenal dengan salah satu kerajinannya yakni Lurik. Kota Palembang, terkenal dengan kerajinan tenun songket, kuliner berbasis ikan (mpek2, kerupuk/kemplang, dll).

Maka dengan adanya pemberdayaan UMKM ini, masyarakat sekitar bisa lebih mengoptimalkan hal tersebut untuk kesejahteraan bersama. Untuk membantu mensejahterakan masyarakat tersebut, peran pemerintah juga dibutuhkan. Pemerintah bisa memberikan subsidi khusus untuk para pelaku usaha ini, khususnya untuk pelaku usaha mikro. Sehingga masyarakat bisa mengoptimalkan usahanya agar tetap sejahtera.

2. BumDes

BUMDes merupakan sebuah badan usaha dimana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa yang penyertaan modal langsungnya berasal dari kekayaan desa. Lembaga ini diyakini dapat mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal tersebut dilakukan dengan cara menciptakan produktivitas ekonomi bagi desa melalui berbagai macam potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Nantinya produk dari BUMDes akan dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona merah, zona kuning, dan zona hijau.

Untuk zona merah, nantinya akan ditujukan bagi desa yang tidak memiliki perusahaan (BUMDes). Kemudian untuk zona kuning, ditujukan bagi desa yang sedang memproses maupun sedang mengembangkan BUMDes miliknya. Lalu di zona hijau ditujukan untuk desa yang telah memiliki BUMDes dan sudah mulai beroperasi. Melalui zona tersebutlah pemerintah daerah ataupun pusat menjalankan programnya. Khususnya dalam pemberian modal bagi masing-masing daerah tersebut.

Beberapa contoh kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat

1. Bantuan Insentif Guru PAUD
2. Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan
3. Bantuan Insentif Untuk Kader Kesehatan
4. Peningkatan Kapasitas BPD
5. Pelatihan/Pendampingan Pengelolaan BUMDes oleh tenaga ahli yang dilaksanakan oleh Desa

Dampak Positif Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Masyarakat lebih mandiri

Masyarakatlah yang akan menjalankan perekonomiannya sendiri. Masyarakat akan menentukan sendiri apa saja potensi yang bisa diangkat, kemudian bagaimana cara menjalankan potensi tersebut. Secara tidak langsung, masyarakat bisa lebih mandiri untuk mengelola perekonomiannya sendiri. Kemudian lama-kelamaan perekonomiannya akan lebih sejahtera.

2. Kemitraan terjalin dengan baik

Dengan menjalin kerja sama seperti, masyarakat akan saling menguatkan dan memberikan dukungan untuk maju. Jadi bukan hanya 1 pihak saja, melainkan semua pihak akan bisa menjalankan perekonomian yang kuat dan berkembang. Dengan begitu, mereka semua akan saling menjaga agar semuanya bisa maju secara bersamaan.

A. Mendorong munculnya wirausaha baru

Hal tersebut didasari karena berbagai kemudahan yang diberikan untuk masyarakat sekitar. Mulai dari pemanfaatan modal, sumber daya manusia, hingga teknologi yang ada. Diantara usaha yang telah maju dan yang masih berkembang pun juga akan saling tolong menolong. Dengan begitu usaha mereka akan sama-sama bangkit dan berkembang lebih maju. Jadi tidak heran jika akan memunculkan banyak wirausaha baru karena adanya program tersebut.

B. Menguatkan ekonomi industri kecil

Meskipun hanya berskala kecil, namun perekonomian masyarakat tidak bisa lepas dari peran industri kecil. Dengan adanya program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini akan membantu para industri kecil untuk menguatkan perekonomiannya. Industri kecil sangat rentan terhadap potensi gulung tikar. Tanpa adanya bantuan maupun pembinaan dari industri yang sudah maju, industri kecil tidak mampu bertahan. Sehingga dibutuhkan bantuan untuk mempertahankan industri kecil tersebut agar tetap tumbuh dan berkembang. Jadi tidak heran jika program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini sangat dibutuhkan untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan begitu, industri-industri kecil yang ada akan tetap bertahan dan semakin maju. Sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat yang ada disekitarnya.

C. Membantu perekonomian usaha menjadi Modern

Pada era saat ini, perkembangan teknologi sangat cepat dan semakin maju. Oleh sebab itu, perekonomian yang ada juga perlu mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Jika perekonomian masih menggunakan cara lama dan tidak modern, maka perekonomian tersebut tidak bisa berkembang. Oleh sebab itu, masyarakat desa perlu

mengetahui bagaimana membuat ekonomi menjadi besar, modern, dan kuat. Dengan begitu, perekonomian tetap terus maju dan tidak terhalang oleh kemajuan teknologi.

Model Pengembangan Masyarakat

Model praktik pengembangan masyarakat adalah pendekatan yang digunakan pekerja sosial untuk melibatkan masyarakat dan mengatasi kebutuhan serta masalah mereka. Model ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, membangun hubungan, dan menciptakan perubahan sosial. Pengembangan masyarakat tergantung pada inisiatif dan kemampuan masyarakat lokal dalam menentukan alternatif pemecahan masalah. Kemampuan ini ditunjang oleh keterlibatan dari anggota masyarakat dalam kegiatan intervensi, sehingga perlu pembinaan kesadaran dan motivasi pada masyarakat lokal untuk mewujudkan kemampuan mereka dalam usaha bersama memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Beberapa Model Pengembangan Masyarakat:

1. Pengembangan Masyarakat Lokal

Pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai sistem klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan. Pengembangan masyarakat lokal pada dasarnya merupakan proses interaksi antara anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pekerja sosial. Pekerja sosial membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan.

2. Perencanaan Sosial

Perencanaan sosial di sini menunjuk pada proses pragmatis untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, kebodohan, kesehatan masyarakat yang buruk, dan lain-lain. Berbeda dengan pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial lebih berorientasi pada tujuan tugas

3. Aksi Sosial

Tujuan dan sasaran utama aksi sosial adalah perubahan-perubahan Universitas Medan Area 13 fundamental dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan, sumber dan pengambilan keputusan. Pendekatan aksi sosial didasari suatu pandangan bahwa masyarakat adalah sistem klien yang seringkali menjadi korban ketidakadilan struktur. Mereka miskin karena dimiskinkan, mereka lemah karena dilemahkan, dan tidak berdaya karena tidak diberdayakan, oleh kelompok elit masyarakat yang menguasai sumber-sumber ekonomi, politik, dan kemasyarakatan.

Pendekatan dalam Pengembangan Masyarakat:

1. Pendekatan Direktif

Pendekatan direktif dilakukan berlandaskan asumsi bahwa pekerja masyarakat tahu apa yang dibutuhkan dan apa yang baik untuk masyarakat. Dalam pendekatan ini peranan pekerja masyarakat bersifat lebih dominan karena prakarsa kegiatan dan sumber daya

yang dibutuhkan lebih banyak berasal dari pekerja masyarakat. Pekerja masyarakat lah yang menetapkan apa yang baik atau buruk bagi masyarakat, cara-cara apa yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya dan menyediakan sarana yang diperlukan untuk perbaikan tersebut.

Dengan pendekatan ini, memang banyak hasil yang telah diperoleh, tetapi hasil yang didapat lebih terkait dengan tujuan jangka pendek dan sering kali lebih bersifat pencapaian secara fisik. Pendekatan direktif menjadi kurang efektif untuk mencapai hal-hal yang sifatnya jangka panjang ataupun perubahan yang lebih mendasar yang berkaitan dengan perilaku seseorang (Adi,2008)

2. Pendekatan Non Direktif

Pendekatan Non direktif, dilakukan berlandaskan asumsi bahwa masyarakat sudah mempunyai pengetahuan tentang apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan apa yang baik untuk mereka. Pada pendekatan ini, pekerja masyarakat tidak menempatkan diri sebagai orang yang menetapkan apa yang baik atau buruk bagi suatu masyarakat. Pemeran utama dalam perubahan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, pekerja masyarakat lebih bersifat menggali dan mengembangkan potensi masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk membuat analisis dan mengambil keputusan yang berguna bagi mereka sendiri, serta mereka diberi kesempatan penuh dalam penentuan cara-cara untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan (Adi, 2008).

Evaluasi/Latihan Soal:

1. Apa yang dimaksud dengan model pemberdayaan masyarakat?
2. Apa saja model-model pemberdayaan masyarakat dan contohnya?

BAB 5. Peran Pendamping dan Agen Perubahan Sosial

Materi pada Bab 5 ini memiliki muatan sebagai berikut:

- **Capaian belajar untuk sikap dan perilaku (*Learning Outcome for Attitudes and Values*) :**
 - Kemampuan Bidang Ilmu dan Pengetahuan
 - A. SC 3: Mampu memahami bidang ilmu manajemen, bisnis, kewirausahaan, kelembagaan, sosiologi, penyuluhan dan komunikasi, serta ilmu-ilmu pertanian untuk pengembangan pembangunan agribisnis berkelanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat.
 - B. SC 4: Mampu memahami secara operasional prinsip-prinsip sosial, ekonomi dan teknologi yang melandasi pengelolaan usaha pertanian dan industri pertanian serta aspek sosial-budaya di pedesaan untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pendahuluan

Perubahan sosial adalah fenomena yang tak terhindarkan dalam masyarakat, terutama di era modern yang terus berkembang dengan cepat. Dalam banyak kasus, perubahan sosial dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi, perubahan kebijakan pemerintah, pergeseran budaya, atau bahkan dinamika ekonomi global. Namun, perubahan sosial yang berhasil dan berkelanjutan tidak hanya terjadi secara alami atau spontan. Dibutuhkan keterlibatan aktif dari individu atau kelompok yang bertindak sebagai pendamping atau agen perubahan sosial untuk memfasilitasi dan mengarahkan transformasi ini ke arah yang lebih baik.

Pendampingan sosial adalah salah satu strategi utama yang digunakan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul dari perubahan sosial. Pendamping berperan sebagai fasilitator, yang bertugas mengarahkan masyarakat agar mereka dapat mengenali potensi, kekuatan, serta solusi dari dalam diri mereka sendiri untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Pendamping tidak bertindak sebagai pemimpin yang memberikan instruksi, tetapi lebih sebagai mitra masyarakat, yang membantu mereka merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi tindakan yang diperlukan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan.

Dalam konteks pembangunan pedesaan dan pertanian, peran pendamping menjadi semakin krusial. Masyarakat pedesaan, khususnya petani, sering kali menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, seperti minimnya akses terhadap teknologi modern, kurangnya informasi tentang pasar, serta terbatasnya sumber daya alam akibat perubahan iklim. Di sinilah pendamping dapat memberikan kontribusi yang signifikan dengan menjembatani kesenjangan antara masyarakat pedesaan dengan berbagai pihak eksternal, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau sektor swasta. Pendamping membantu masyarakat memahami perubahan yang terjadi di sekitar mereka, serta mendorong adopsi

solusi inovatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan mereka tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan.

Pendampingan sosial dalam sektor pertanian juga berfungsi untuk menciptakan mekanisme kerja sama yang lebih solid di antara para petani. Salah satu contoh nyata adalah pembentukan kelompok tani atau koperasi, dimana para petani dapat bekerja bersama untuk meningkatkan produktivitas, memperluas akses pasar, serta mengelola sumber daya secara lebih efisien. Dalam hal ini, pendamping memainkan peran ganda, yaitu sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi kolektif, serta sebagai inovator yang memperkenalkan teknologi dan praktik-praktik baru yang relevan dengan kondisi setempat.

Keberhasilan pendampingan sangat bergantung pada kemampuan agen perubahan sosial untuk membangun hubungan yang berbasis kepercayaan dengan komunitas. Kepercayaan ini penting karena masyarakat sering kali skeptis terhadap perubahan, terutama jika mereka tidak melihat manfaat langsungnya atau merasa bahwa perubahan tersebut justru dapat membahayakan mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, seorang pendamping harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik, empati, serta pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang didampingi. Pendamping harus mampu mendengarkan kebutuhan masyarakat, memahami aspirasi mereka, serta bekerja bersama mereka untuk menemukan solusi yang sesuai dengan konteks lokal.

Sebagai agen perubahan sosial, pendamping juga diharapkan mampu mendorong transformasi jangka panjang. Ini berarti bahwa pendamping tidak hanya berfokus pada solusi jangka pendek, tetapi juga pada pembangunan kapasitas masyarakat agar mereka dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan di masa depan. Pendamping yang efektif akan membantu masyarakat dalam membangun sistem yang berkelanjutan, di mana mereka tidak hanya bergantung pada bantuan eksternal, tetapi juga mampu memanfaatkan sumber daya lokal untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih stabil dan inklusif.

Bab ini hadir untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran dan tanggung jawab pendamping serta agen perubahan sosial, khususnya dalam konteks sosial ekonomi dan pertanian. Pendamping dan agen perubahan sosial tidak hanya membantu masyarakat dalam proses adaptasi terhadap perubahan, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, berdaya, dan berkelanjutan. Dengan pemahaman yang kuat mengenai prinsip-prinsip pendampingan serta peran strategis agen perubahan, diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pendamping dan agen perubahan sosial yang efektif dalam mendukung pembangunan masyarakat, terutama di sektor pertanian.

Pendamping: Definisi dan Peran

Pendamping adalah individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mendukung masyarakat dalam proses pemberdayaan. Mereka berfungsi sebagai fasilitator, pendidik, mediator dan

advokat yang membantu masyarakat mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan mengimplementasikan tindakan yang diperlukan. Pendamping bukan hanya sekadar pengajar atau pemimpin, tetapi lebih sebagai mitra yang bekerja bersama masyarakat. Mereka bertujuan untuk membangun kapasitas individu dan kelompok, sehingga masyarakat dapat mandiri dan berdaya dalam menghadapi berbagai masalah yang ada di sekitar mereka. Peran Utama pendamping adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya.

Pendamping dalam menjalankan perannya menghadapi berbagai tantangan di antaranya Resistensi dari Masyarakat: Terkadang, masyarakat mungkin tidak siap untuk berubah atau merasa skeptis terhadap intervensi yang diusulkan. Pendamping perlu bekerja keras untuk membangun kepercayaan dan keterlibatan masyarakat. Keterbatasan Sumber Daya: Pendamping sering kali beroperasi dengan sumber daya yang terbatas, baik dari segi waktu, dana, maupun dukungan institusi. Ini dapat menghambat efektivitas program pemberdayaan yang dijalankan. Budaya dan Nilai yang Berbeda: Dalam masyarakat yang beragam, pendamping perlu sensitif terhadap perbedaan budaya dan nilai. Pendekatan yang satu mungkin tidak selalu berlaku untuk semua kelompok, sehingga pendamping harus fleksibel dalam metode mereka. Perubahan Kebijakan: Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten atau kurang mendukung dapat menjadi kendala dalam upaya pemberdayaan. Pendamping perlu tetap adaptif dan terus berjuang untuk kepentingan masyarakat.

Pendamping yang efektif memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya, antara lain:

1. Keterampilan Komunikasi yang Baik: Pendamping harus mampu mendengarkan dengan baik, berkomunikasi secara jelas, dan membangun hubungan yang positif dengan anggota masyarakat.
2. Empati dan Kepedulian: Pendamping yang baik memiliki kemampuan untuk memahami perasaan dan pengalaman orang lain, serta menunjukkan kepedulian terhadap masalah yang dihadapi masyarakat.
3. Kemampuan Fasilitasi: Mereka harus memiliki kemampuan untuk memfasilitasi diskusi, pertemuan, dan kegiatan kelompok, sehingga semua suara masyarakat didengar dan dihargai.
4. Pengetahuan yang Relevan: Pendamping harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang isu-isu sosial, ekonomi, dan budaya yang dihadapi oleh masyarakat yang mereka dampingi.
5. Fleksibilitas dan Adaptabilitas: Dalam menghadapi berbagai situasi yang berubah, pendamping perlu fleksibel dan mampu menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pendamping memiliki peran yang multifaset dalam proses pemberdayaan masyarakat, antara lain:

1. Pendamping sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, pendamping berperan sebagai fasilitator yang membantu masyarakat dalam proses identifikasi masalah, perencanaan, dan pelaksanaan program. Pendamping juga dapat berperan sebagai fasilitator komunikasi, pendamping menciptakan ruang yang aman bagi masyarakat untuk berbagi ide, pengalaman, dan kekhawatiran. Dengan memfasilitasi komunikasi yang efektif, mereka membantu masyarakat untuk membangun kepercayaan satu sama lain dan memperkuat ikatan sosial di dalam komunitas.

Tugas sebagai fasilitator adalah identifikasi masalah, perencanaan Solusi, pelaksanaan program yang mendorong partisipasi, mengorganisir pertemuan dan membangun kepercayaan. Pendamping berusaha untuk mengajak seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan. Dengan mendorong partisipasi, mereka membantu menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab dalam masyarakat. Pendamping sering kali mengorganisir pertemuan, lokakarya, dan forum diskusi di mana anggota masyarakat dapat bertukar ide dan menyelesaikan masalah secara kolaboratif. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif, pendamping membantu membangun kepercayaan di antara anggota masyarakat. Kepercayaan ini penting untuk mendorong keterbukaan dan kerjasama.

2. Pendamping sebagai Pendidik atau Penyuluh

Pendamping memberikan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Mereka dapat memberikan informasi tentang hak-hak masyarakat, keterampilan teknis, dan praktik terbaik dalam bidang tertentu, seperti kesehatan, pertanian, dan pengelolaan keuangan. Pendamping juga berfungsi sebagai pendidik yang memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain memberikan pendidikan, pendamping juga membantu masyarakat mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Ini termasuk keterampilan kepemimpinan, manajemen waktu, dan pemecahan masalah.

Tugas seorang pendamping sebagai pendidik adalah memberikan pelatihan, menyediakan informasi, dan mendorong pembelajaran berkelanjutan. Pendamping menyelenggarakan pelatihan yang relevan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat. Pelatihan ini bisa berkaitan dengan berbagai aspek, seperti keterampilan teknis, manajemen, dan pengembangan diri. Pendamping menyampaikan informasi penting tentang hak-hak masyarakat, kebijakan pemerintah, dan sumber daya yang tersedia. Informasi ini membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang tepat. Pendamping menekankan pentingnya pembelajaran berkelanjutan, di mana masyarakat didorong untuk terus mencari pengetahuan baru dan meningkatkan keterampilan mereka.

3. Pendamping sebagai Mediator

Pendamping bertindak sebagai mediator atau penghubung antara masyarakat dan berbagai sumber daya eksternal, seperti pemerintah, LSM, dan lembaga donor. Mereka membantu masyarakat untuk memecahkan konflik internal dalam

masyarakat serta memfasilitasi dialog dengan pihak luar seperti mengakses bantuan, dana, dan layanan yang dapat mendukung upaya pemberdayaan. Sebagai mediator, pendamping menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan pihak luar, seperti pemerintah atau NGO. Tugas pendamping sebagai mediator adalah menyelesaikan konflik, membangun jaringan, dan mengurangi stigma dan diskriminasi. Ketika terjadi perbedaan pendapat atau konflik di dalam komunitas, pendamping berfungsi sebagai pihak netral yang membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Mereka mendengarkan semua pihak yang terlibat dan berusaha mencari solusi yang dapat diterima bersama. Pendamping berusaha untuk membangun jaringan antara berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar komunitas. Jaringan ini dapat membantu masyarakat untuk mengakses sumber daya, informasi, dan dukungan yang diperlukan. Pendamping juga berperan dalam mengurangi stigma dan diskriminasi yang mungkin terjadi di dalam masyarakat. Mereka bekerja untuk menciptakan kesadaran dan pemahaman di antara anggota masyarakat tentang pentingnya saling menghargai dan menerima perbedaan.

4. Pendamping sebagai Advokat

Sebagai advokat, Pendamping berperan sebagai advokat yang membela hak-hak masyarakat dan membantu mereka mengakses sumber daya yang diperlukan. Tugas seorang pendamping sebagai advokat adalah mewakili suara Masyarakat, memperjuangkan kebijakan yang adil, dan memberdayakan Masyarakat untuk berjuang sendiri. Pendamping berfungsi sebagai perwakilan masyarakat dalam forum-forum yang lebih luas, seperti pertemuan dengan pemerintah, LSM, atau organisasi internasional. Mereka menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat kepada pihak-pihak terkait. Pendamping berusaha untuk mempengaruhi kebijakan publik agar lebih berpihak pada masyarakat. Mereka dapat melakukan advokasi untuk isu-isu spesifik, seperti akses terhadap layanan dasar, perlindungan hak-hak masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi. Selain mewakili suara masyarakat, pendamping juga mengajarkan masyarakat bagaimana cara beradvokasi untuk diri mereka sendiri. Dengan membekali masyarakat dengan keterampilan advokasi, mereka menjadi lebih mampu untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka secara mandiri.

Agen Perubahan Sosial: Definisi dan Peran

Agen perubahan sosial adalah individu atau kelompok yang memainkan peran penting dalam memfasilitasi, memimpin, dan mendorong transformasi dalam masyarakat. Mereka bertujuan untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi, budaya, atau lingkungan yang ada, serta menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan. Agen perubahan sosial dapat bekerja di berbagai bidang, mulai dari inovasi sosial, pemberdayaan komunitas, hingga advokasi kebijakan publik. Agen perubahan sosial memiliki peran sebagai katalis dalam proses perubahan yang diperlukan dalam suatu komunitas atau masyarakat. Mereka berfungsi sebagai jembatan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diinginkan, memfasilitasi dialog, dan menyediakan solusi untuk masalah yang ada.

Agen perubahan sosial menggunakan berbagai metode dan strategi untuk mencapai tujuan mereka diantaranya inovasi social, organisasi komunitas, intervensi kebijakan dan Pendidikan dan kesadaran. Agen perubahan social dapat menciptakan solusi baru untuk masalah sosial yang ada. Contohnya, program pendidikan untuk anak-anak miskin di daerah terpencil, pemberdayaan perempuan dalam komunitas marjinal, atau pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk petani kecil. Agen perubahan sering bekerja untuk mengorganisir kelompok-kelompok komunitas untuk mencapai tujuan bersama. Mereka membentuk jaringan, koalisi, atau komunitas yang kuat, yang didasarkan pada kerja sama, kesadaran kolektif, dan solidaritas. Banyak agen perubahan sosial yang bergerak dalam advokasi kebijakan, bekerja dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan kelompok-kelompok kepentingan untuk mendorong perubahan pada tingkat kebijakan yang dapat memengaruhi kehidupan banyak orang. Misalnya, pengenalan kebijakan yang mendukung pertanian berkelanjutan atau kebijakan inklusi sosial untuk kelompok-kelompok minoritas. Mereka sering kali memimpin kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah sosial atau lingkungan tertentu, memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya isu-isu ini, dan mendorong perubahan sikap.

Agen perubahan dapat mempengaruhi individu untuk mengubah pola pikir, sikap, atau perilaku mereka. Misalnya, melalui program mentoring, pelatihan keterampilan, atau kampanye kesadaran publik. Di tingkat komunitas, agen perubahan sering kali memfasilitasi dialog antara anggota komunitas dan memimpin inisiatif yang bertujuan untuk memecahkan masalah spesifik yang dihadapi oleh kelompok tersebut. Agen perubahan yang berfokus pada perubahan struktural bekerja untuk mempengaruhi kebijakan, peraturan, atau sistem yang lebih luas yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Ini sering melibatkan advokasi kebijakan, lobi, atau keterlibatan langsung dalam proses pengambilan keputusan politik.

Agen perubahan sosial sering memiliki karakteristik berikut:

1. Visioner: Mereka memiliki visi jelas tentang masa depan yang lebih baik dan kemampuan untuk memimpin orang lain menuju visi tersebut.
2. Empati: Memahami kondisi masyarakat dan kebutuhan individu yang mereka bantu, serta mampu merasakan penderitaan dan aspirasi orang lain.
3. Kreatif dan Inovatif: Mereka sering menciptakan solusi baru yang keluar dari kebiasaan, yang mungkin belum pernah diterapkan sebelumnya.
4. Komitmen Sosial yang Tinggi: Agen perubahan sosial sangat termotivasi untuk melihat perubahan nyata terjadi di masyarakat dan bersedia berkorban demi mencapai tujuan tersebut.

Dampak yang dihasilkan oleh agen perubahan sosial bisa sangat luas. Di tingkat individu, mereka dapat membantu orang-orang mendapatkan akses ke pendidikan, kesehatan, atau peluang ekonomi yang lebih baik. Di tingkat komunitas, mereka dapat memberdayakan kelompok-kelompok yang termarginalkan, meningkatkan solidaritas sosial, atau menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Pada tingkat yang lebih luas, agen

perubahan sosial dapat mempengaruhi kebijakan nasional atau internasional yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.

Agen Perubahan Sosial memiliki peran yang multifaset dalam proses pemberdayaan masyarakat, antara lain:

1. Agen Perubahan Sosial sebagai Pendorong Inovasi

Agen perubahan sosial berperan penting sebagai pendorong inovasi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Mereka berusaha mengatasi berbagai masalah sosial yang kompleks dengan memperkenalkan pendekatan, ide, atau metode baru yang lebih efektif dan efisien. Agen perubahan sosial sering kali berada di garis depan dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Mereka berinteraksi langsung dengan komunitas yang terpinggirkan, menghadapi ketidakadilan sosial, atau merasakan ketidakefisienan sistem yang ada. Dengan pemahaman mendalam tentang konteks lokal dan kebutuhan masyarakat, agen perubahan dapat menemukan peluang untuk menciptakan inovasi yang relevan dan berdampak. Contoh kasus adalah Agen perubahan yang bekerja di daerah pedesaan mungkin melihat bahwa akses air bersih adalah masalah utama. Dengan itu, mereka dapat mendorong inovasi teknologi sederhana seperti pompa air tenaga surya atau sistem pengolahan air murah yang mudah diterapkan oleh masyarakat setempat. Inovasi sosial merupakan inti dari peran agen perubahan. Mereka menciptakan solusi baru yang dapat merespons tantangan yang ada di masyarakat, baik melalui teknologi, pendekatan organisasi, atau model pemberdayaan komunitas. Inovasi sosial seringkali berbeda dari inovasi komersial karena tujuannya tidak hanya untuk keuntungan finansial, tetapi juga untuk menciptakan dampak sosial yang lebih besar dan berkelanjutan. Agen perubahan sosial sering kali memperkenalkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masyarakat yang mereka layani. Teknologi ini dikenal sebagai teknologi tepat guna karena dirancang agar mudah diimplementasikan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Inovasi teknologi ini dapat membantu mengatasi masalah-masalah seperti kemiskinan, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, atau masalah lingkungan. Agen perubahan sosial juga mendorong inovasi yang inklusif, di mana mereka menciptakan solusi yang memperhitungkan dan melibatkan kelompok-kelompok yang biasanya terpinggirkan. Inovasi ini dapat berupa program-program yang memberikan akses kepada pendidikan, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan, atau kesempatan ekonomi bagi kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, atau kelompok minoritas. Agen perubahan sosial sering menggunakan jaringan dan kolaborasi dengan berbagai pihak—baik itu pemerintah, sektor swasta, maupun organisasi non-pemerintah—untuk mendorong inovasi. Kolaborasi ini memungkinkan terciptanya solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih luas dan mendukung penerapan inovasi pada skala yang lebih besar.

Banyak inovasi sosial terjadi di wilayah yang diabaikan atau kurang diperhatikan oleh sistem formal. Agen perubahan sosial mengidentifikasi kekurangan atau keterbatasan dalam sistem ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau lingkungan, dan menciptakan solusi yang dapat menjangkau mereka yang berada di luar jangkauan sistem ini. Dengan cara ini, mereka memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan yang sebelumnya tidak mereka dapatkan.

Agen perubahan sosial tidak hanya berfokus pada inovasi di tingkat lokal atau komunitas, tetapi juga berperan dalam mendorong inovasi dalam kebijakan publik. Mereka sering kali bekerja sama dengan pemerintah atau lembaga pembuat kebijakan untuk memperkenalkan undang-undang, regulasi, atau program-program publik yang mendukung inovasi sosial. Dengan adanya kebijakan yang mendukung, inovasi sosial dapat menyebar lebih luas dan memberikan dampak yang lebih besar.

2. Agen Perubahan Sosial sebagai Penggerak Komunitas

Agen perubahan sosial berperan sebagai penggerak komunitas dengan memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses perubahan yang terjadi di lingkungan mereka. Mereka mendorong kolaborasi, memberdayakan anggota komunitas, dan menciptakan ruang untuk keterlibatan warga dalam menangani tantangan yang ada di komunitas mereka. Agen perubahan sosial membantu komunitas menyadari isu-isu yang ada di sekitar mereka dan pentingnya bertindak bersama untuk mengatasinya. Mereka memberikan informasi yang relevan dan menginspirasi komunitas untuk memahami peran mereka dalam menciptakan perubahan. Dengan membangun kesadaran kolektif ini, agen perubahan dapat mendorong warga untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, atau lingkungan di sekitar mereka.

Agen perubahan sosial bertindak sebagai fasilitator yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan komunitas. Mereka menciptakan ruang-ruang partisipatif di mana masyarakat dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan program-program yang bertujuan memperbaiki kehidupan mereka. Keterlibatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi benar-benar mencerminkan kebutuhan dan keinginan komunitas. Pemberdayaan komunitas merupakan salah satu peran utama agen perubahan sosial. Mereka memberikan pelatihan, sumber daya, dan dukungan kepada masyarakat agar mereka memiliki keterampilan dan kemampuan untuk memimpin perubahan secara mandiri. Proses ini melibatkan transfer pengetahuan, penguatan kapasitas lokal, serta peningkatan rasa percaya diri masyarakat dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri.

Agen perubahan sosial mendorong terbentuknya kolaborasi antaranggota komunitas dan antara komunitas dengan pihak luar, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau sektor swasta. Mereka membangun jaringan yang kuat di antara kelompok-kelompok masyarakat untuk memperkuat solidaritas sosial dan memfasilitasi kerja sama yang efektif. Kolaborasi ini penting untuk mengatasi

masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang terkoordinasi. Dalam komunitas yang beragam, sering terjadi perbedaan pendapat atau konflik terkait prioritas dan pendekatan untuk mencapai perubahan. Agen perubahan sosial memainkan peran sebagai mediator dan fasilitator dialog di antara anggota komunitas yang berbeda pandangan. Mereka membantu menciptakan ruang untuk diskusi terbuka, mendengarkan berbagai pendapat, dan merumuskan solusi yang mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Selain memberdayakan masyarakat secara umum, agen perubahan sosial juga berperan dalam membina dan mengembangkan pemimpin-pemimpin lokal yang bisa memimpin perubahan di tingkat komunitas. Mereka melatih para pemimpin ini dalam keterampilan kepemimpinan, komunikasi, dan pengambilan keputusan, sehingga mereka mampu menjalankan inisiatif komunitas secara mandiri di masa depan.

3. Agen Perubahan Sosial sebagai Pembangun Jaringan

Salah satu peran penting agen perubahan sosial adalah membangun jaringan yang mampu menghubungkan komunitas lokal dengan berbagai sumber daya eksternal. Jaringan ini dapat melibatkan dukungan dari sektor finansial, teknis, hingga kebijakan yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan di tingkat komunitas. Dengan jaringan yang kuat, agen perubahan dapat membantu komunitas mengakses peluang yang mungkin tidak tersedia dalam konteks lokal, serta meningkatkan kapasitas komunitas untuk mencapai perubahan yang lebih signifikan.

Agen perubahan sosial memiliki kemampuan untuk menjembatani kebutuhan komunitas dengan sumber daya finansial yang ada di luar komunitas. Mereka dapat menjalin hubungan dengan lembaga donor, pemerintah, atau lembaga keuangan yang menyediakan dana untuk proyek-proyek pembangunan, pemberdayaan, atau pengentasan kemiskinan. Akses terhadap sumber daya finansial memungkinkan komunitas untuk melaksanakan proyek yang mungkin sulit dilakukan hanya dengan menggunakan sumber daya lokal. Contoh: Seorang agen perubahan sosial bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional untuk mendapatkan pendanaan bagi proyek pembangunan infrastruktur desa, seperti pembangunan jalan dan sistem irigasi, yang mendukung pertanian dan meningkatkan akses pasar bagi petani lokal.

Jaringan yang dibangun oleh agen perubahan sosial sering kali melibatkan banyak sektor, termasuk pemerintah, sektor swasta, LSM, dan organisasi internasional. Dengan melibatkan berbagai pihak, agen perubahan menciptakan kerangka kerja yang lebih terintegrasi untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi multi-sektor ini memungkinkan akses ke lebih banyak sumber daya dan keterampilan yang saling melengkapi, menciptakan dampak yang lebih besar bagi komunitas. Contoh: Dalam program pembangunan desa terpencil, agen perubahan sosial membangun kemitraan dengan perusahaan telekomunikasi untuk menyediakan akses internet di desa, pemerintah lokal untuk mendukung pembangunan infrastruktur, dan LSM

internasional untuk memberikan pelatihan keterampilan digital kepada penduduk desa. Kombinasi sumber daya ini mempercepat kemajuan desa dan menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Selain jaringan ekonomi dan teknis, agen perubahan sosial juga membangun jaringan dukungan sosial untuk mendukung inisiatif-inisiatif di komunitas. Jaringan dukungan sosial ini melibatkan berbagai aktor yang memberikan bantuan, seperti kelompok advokasi, yayasan, atau organisasi masyarakat sipil, yang mendukung inisiatif perubahan dalam bentuk bantuan moral, advokasi, atau sumber daya sosial lainnya. Agen perubahan sosial bekerja sama dengan yayasan kesehatan untuk memberikan edukasi tentang pentingnya sanitasi dan air bersih di desa-desa terpencil. Melalui jaringan ini, yayasan menyediakan alat dan sumber daya untuk memperbaiki fasilitas sanitasi di desa tersebut, yang berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat.

4. Agen Perubahan Sosial sebagai Pemimpin Transformasi

Agen perubahan sosial sering kali berperan sebagai pemimpin transformasi, yaitu individu atau kelompok yang memimpin proses perubahan signifikan dalam masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional. Mereka tidak hanya memfasilitasi perubahan tetapi juga menjadi katalisator dan pelopor yang menginspirasi masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Peran ini melibatkan pengambilan keputusan yang strategis, visi yang jelas, dan kemampuan untuk mengelola dinamika perubahan yang kompleks.

Sebagai pemimpin transformasi, agen perubahan sosial memiliki kemampuan untuk merumuskan dan menyampaikan visi yang kuat mengenai masa depan komunitas atau masyarakat yang lebih baik. Visi ini harus jelas, dapat dicapai, dan menginspirasi orang lain untuk terlibat dalam upaya perubahan. Mereka menuntun komunitas dalam melihat peluang di tengah tantangan, membayangkan kemungkinan-kemungkinan baru, dan memotivasi anggota komunitas untuk bersama-sama bergerak menuju perubahan yang lebih baik.

Pemimpin transformasi memahami bahwa perubahan tidak hanya dituntut dari orang lain, tetapi juga dari diri sendiri. Mereka mempraktikkan apa yang mereka ajarkan dan menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjalankan perubahan. Dengan menunjukkan integritas, kerja keras, dan dedikasi dalam tindakan sehari-hari, agen perubahan sosial menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejak mereka dan mengambil bagian aktif dalam proses transformasi.

Proses transformasi sosial sering kali melibatkan perubahan yang besar dan kompleks, yang mungkin menghadapi resistensi dari pihak-pihak tertentu dalam komunitas. Pemimpin transformasi harus memiliki kemampuan untuk mengelola dinamika ini, termasuk menghadapi tantangan, konflik, dan hambatan yang mungkin muncul di sepanjang proses. Mereka berperan sebagai mediator, penyelesai masalah, dan perancang strategi yang fleksibel untuk memastikan perubahan berjalan dengan lancar.

Pemimpin transformasi tidak bekerja sendiri; mereka mampu menginspirasi dan memobilisasi orang lain untuk ikut serta dalam proses perubahan. Agen perubahan sosial memainkan peran penting dalam menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap perubahan yang diinginkan. Mereka melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk anggota komunitas, pemerintah, organisasi swadaya masyarakat, dan sektor swasta, untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama.

Agen perubahan sosial yang berperan sebagai pemimpin transformasi juga harus memastikan bahwa perubahan yang diinisiasi bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Mereka merancang strategi yang tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek tetapi juga memastikan bahwa perubahan yang terjadi akan terus berlanjut bahkan setelah mereka tidak lagi terlibat secara langsung. Hal ini melibatkan pembentukan institusi, pelatihan kepemimpinan lokal, serta membangun sistem yang mendukung keberlanjutan transformasi. Sebagai pemimpin transformasi, agen perubahan sosial sering kali dituntut untuk berpikir di luar kotak dan menemukan solusi yang inovatif untuk masalah-masalah sosial. Mereka memahami bahwa pendekatan konvensional mungkin tidak selalu efektif dalam menghadapi tantangan-tantangan baru, sehingga mereka berani mengeksplorasi ide-ide baru, teknologi, atau model kerja yang dapat mempercepat proses transformasi.

Perubahan besar sering kali melibatkan risiko dan ketidakpastian. Pemimpin transformasi harus memiliki keberanian untuk menghadapi ketidakpastian ini dan membuat keputusan yang berani, bahkan ketika hasilnya belum pasti. Mereka mampu menghadapi tantangan dengan optimisme, terus belajar dari kegagalan, dan tetap teguh pada tujuan mereka meskipun menghadapi tekanan atau kritik. Pemimpin transformasi yang efektif tidak beroperasi secara terisolasi. Mereka memahami pentingnya kolaborasi dan kerja sama dalam mencapai transformasi sosial. Mereka memberdayakan orang lain untuk mengambil peran kepemimpinan dalam komunitas mereka, menciptakan kepemimpinan yang tersebar luas dan mengurangi ketergantungan pada satu individu. Dengan demikian, proses transformasi menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pemimpin transformasi juga sering kali terlibat dalam advokasi kebijakan untuk menciptakan perubahan yang lebih besar dan berkelanjutan di tingkat nasional atau regional. Mereka bekerja untuk mempengaruhi kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung proses transformasi. Dalam hal ini, agen perubahan sosial berperan sebagai jembatan antara komunitas dan pembuat kebijakan, serta sebagai suara bagi mereka yang kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan.

Keterampilan yang Dibutuhkan Pendamping dan Agen Perubahan Sosial

Pendamping dan agen perubahan sosial memainkan peran penting dalam memberdayakan masyarakat dan mendorong transformasi yang positif di berbagai sektor.

Untuk menjadi efektif dalam peran ini, mereka harus memiliki berbagai keterampilan yang memungkinkan mereka berkomunikasi, menganalisis, mengelola, dan memimpin secara efektif. Berikut Keterampilan yang dibutuhkan oleh pendamping dan agen perubahan social.

1. Komunikasi Efektif

Komunikasi efektif adalah keterampilan dasar yang wajib dimiliki oleh pendamping dan agen perubahan sosial. Kemampuan ini sangat penting karena mereka berhubungan dengan berbagai lapisan masyarakat, dari tingkat lokal hingga pemangku kepentingan yang lebih luas. Beberapa aspek penting dari komunikasi efektif meliputi:

- a. Kemampuan Menyampaikan Pesan
Pendamping harus bisa menyampaikan informasi dengan jelas dan tepat sasaran. Ini termasuk kemampuan untuk berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat sasaran tanpa menimbulkan kebingungan.
- b. Mendengarkan Aktif
Komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan. Seorang agen perubahan sosial harus mampu mendengarkan masalah, keluhan, dan harapan masyarakat dengan penuh perhatian, sehingga mereka dapat merespons sesuai kebutuhan komunitas.
- c. Adaptasi Komunikasi Berdasarkan Audiens
Pendamping seringkali berinteraksi dengan berbagai kelompok, seperti masyarakat adat, pemerintah, NGO, dan sektor swasta. Mereka perlu beradaptasi dengan gaya komunikasi yang berbeda sesuai dengan audiens agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.
- d. Diplomasi dan Negosiasi
Ketika bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan, penting untuk memiliki keterampilan dalam melakukan diplomasi dan negosiasi guna menemukan solusi bersama yang menguntungkan semua pihak.

2. Pemecahan Masalah

Pendamping dan agen perubahan sosial harus memiliki keterampilan analitis yang baik untuk mengenali masalah yang dihadapi masyarakat, serta merancang solusi yang relevan dan berkelanjutan. Kemampuan ini meliputi:

- a) Analisis Kritis
Mereka harus mampu menganalisis akar masalah dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Proses ini mencakup pengumpulan data, identifikasi pola, serta pemahaman terhadap dinamika komunitas.
- b) Inovasi dan Kreativitas dalam Merancang Solusi
Terkadang, masalah yang dihadapi masyarakat tidak memiliki solusi yang jelas atau langsung. Agen perubahan sosial perlu kreatif dalam merancang solusi yang inovatif dan berbasis pada konteks lokal, seperti penggunaan sumber daya lokal, atau pengembangan teknologi sederhana.

- c) Kolaborasi untuk Memecahkan Masalah
Pendamping tidak hanya bekerja sendiri, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam proses pemecahan masalah. Hal ini membantu menciptakan rasa memiliki terhadap solusi yang diusulkan, serta meningkatkan kemungkinan keberhasilan implementasi.
- d) Evaluasi dan Penyesuaian Solusi
Setelah merancang dan menerapkan solusi, agen perubahan sosial harus melakukan evaluasi terus-menerus untuk memastikan solusi tersebut efektif. Jika tidak, mereka harus siap melakukan penyesuaian.

3. Manajemen Konflik

Konflik seringkali muncul di dalam masyarakat, baik itu konflik antarindividu, kelompok, maupun dengan pihak luar. Seorang pendamping yang efektif harus memiliki kemampuan untuk memediasi dan menyelesaikan konflik secara adil dan damai. Beberapa keterampilan yang diperlukan dalam manajemen konflik antara lain:

- a) Pemahaman tentang Sumber Konflik: Pendamping harus mampu mengidentifikasi apa yang menyebabkan konflik. Ini bisa berasal dari perbedaan kepentingan, nilai, atau sumber daya. Pemahaman yang mendalam tentang dinamika konflik ini akan membantu mereka merancang strategi penyelesaian yang tepat.
- b) Keterampilan Mediasi: Mediasi adalah proses membantu pihak yang berkonflik mencapai kesepakatan secara damai. Pendamping harus mampu menjadi fasilitator yang netral, mengarahkan dialog yang produktif, dan memastikan semua pihak didengar.
- c) Pengelolaan Emosi: Konflik seringkali melibatkan emosi yang tinggi. Agen perubahan sosial perlu memiliki keterampilan dalam mengelola emosi, baik emosi mereka sendiri maupun emosi orang lain, agar diskusi tetap berjalan dengan tenang dan konstruktif.
- d) Mencari Solusi Win-Win: Pendamping harus berusaha mencari solusi yang menguntungkan semua pihak atau minimal yang bisa diterima oleh semua pihak yang terlibat. Ini penting untuk menjaga keberlanjutan solusi yang dihasilkan serta mencegah konflik kembali terjadi.

4. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah keterampilan penting yang harus dimiliki oleh pendamping dan agen perubahan sosial untuk memobilisasi masyarakat dan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Keterampilan kepemimpinan ini mencakup beberapa aspek:

- a) Kemampuan Menginspirasi dan Memotivasi
Agen perubahan sosial harus bisa menjadi teladan yang menginspirasi orang lain untuk berpartisipasi dalam proses perubahan. Mereka harus bisa membangun semangat dan motivasi dalam masyarakat untuk menghadapi tantangan bersama.
- b) Pengambilan Keputusan yang Tepat

Pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang didasarkan pada analisis data dan masukan dari berbagai pihak. Keputusan yang diambil juga harus bersifat inklusif dan mempertimbangkan kepentingan bersama.

c) **Membangun Kepercayaan**

Kepemimpinan yang efektif dibangun atas dasar kepercayaan. Agen perubahan sosial harus jujur, transparan, dan konsisten dalam tindakan mereka, sehingga mereka dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

d) **Membina Kolaborasi dan Partisipasi**

Kepemimpinan tidak hanya tentang memimpin, tetapi juga tentang memberdayakan orang lain untuk berpartisipasi aktif dalam proses perubahan. Agen perubahan sosial harus menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara penuh dalam setiap tahapan perubahan.

Tantangan Dalam Peran Pendamping Dan Agen Perubahan Sosial

Peran sebagai pendamping dan agen perubahan sosial merupakan tugas yang penuh kompleksitas dan tantangan, di mana mereka harus berhadapan dengan berbagai dinamika yang kerap kali menghambat atau bahkan memperlambat proses transformasi di masyarakat. Tantangan ini tidak hanya muncul dari faktor eksternal, seperti ketidakpastian politik yang mempengaruhi stabilitas kebijakan dan pendanaan, tetapi juga berasal dari resistensi internal masyarakat yang seringkali enggan menerima perubahan karena keterikatan pada nilai-nilai tradisional, kebiasaan yang sudah mengakar, atau ketakutan terhadap dampak yang tidak diketahui. Selain itu, agen perubahan sosial juga harus mampu menavigasi kompleksitas sosial yang rumit, dengan berhadapan pada beragam kepentingan yang saling bertentangan, kesenjangan sosial-ekonomi, dan pluralitas budaya yang memerlukan pendekatan yang sensitif, inklusif, serta strategi yang berkelanjutan agar proses transformasi dapat berlangsung secara holistik dan berdampak positif bagi semua pihak. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pendamping dan agen perubahan sosial adalah

1. **Ketidakpastian Politik**

Ketidakpastian politik adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pendamping dan agen perubahan sosial, terutama karena peran mereka sering kali bergantung pada kebijakan pemerintah dan dukungan dari pemangku kepentingan politik. Beberapa aspek dari tantangan ini meliputi:

a) **Perubahan Kebijakan yang Tidak Stabil:** Pemerintah sering kali melakukan perubahan kebijakan yang cepat, terutama dalam konteks pergantian pemerintahan atau reformasi politik. Hal ini bisa mempengaruhi proyek atau program pemberdayaan yang sedang berjalan, baik dari segi pendanaan maupun dukungan kebijakan.

b) **Prioritas Pemerintah yang Bergeser:** Di beberapa kasus, proyek pemberdayaan yang tadinya didukung oleh pemerintah bisa kehilangan dukungan karena adanya perubahan dalam prioritas nasional atau daerah, misalnya jika pemerintah lebih fokus pada sektor ekonomi lain atau munculnya isu politik baru.

- c) Keterbatasan Dana dan Birokrasi: Pendamping sering kali harus bekerja dalam sistem birokrasi yang lamban dan penuh tantangan administratif, yang dapat memperlambat implementasi proyek atau program di lapangan.

Untuk menghadapi ketidakpastian politik, pendamping dan agen perubahan sosial perlu memiliki kemampuan beradaptasi dengan cepat dan membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak, termasuk pemangku kebijakan, untuk memastikan keberlanjutan program yang mereka jalankan.

2. Resistensi terhadap Perubahan

Perubahan sosial sering kali menghadapi resistensi dari masyarakat yang sudah terbiasa dengan sistem, kebiasaan, atau budaya yang ada. Beberapa alasan mengapa resistensi ini muncul antara lain:

- a) Ketakutan Terhadap Dampak Perubahan: Banyak anggota masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh perubahan. Mereka mungkin takut bahwa perubahan akan merugikan mereka secara ekonomi, sosial, atau bahkan budaya. Ketakutan ini bisa diperparah oleh kurangnya informasi tentang dampak positif dari perubahan yang diusulkan.
- b) Kepentingan Kelompok Tertentu: Kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat mungkin memiliki kepentingan yang kuat untuk mempertahankan status quo. Mereka bisa merasa bahwa perubahan akan mengancam posisi, kekuasaan, atau keuntungan yang mereka nikmati.
- c) Keterbatasan Pengetahuan dan Pendidikan: Terkadang, masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang manfaat perubahan karena kurangnya akses terhadap informasi atau pendidikan. Hal ini bisa membuat mereka lebih skeptis terhadap gagasan atau inovasi baru yang diperkenalkan.

Pendamping dan agen perubahan sosial harus memiliki pendekatan yang sensitif dan inklusif untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan. Hal ini mencakup dialog yang terbuka, peningkatan kesadaran melalui pendidikan, serta memberikan contoh langsung tentang dampak positif perubahan.

3. Kompleksitas Sosial

Masyarakat sering kali terdiri dari berbagai kelompok dengan kepentingan, nilai, dan pandangan yang berbeda-beda, yang bisa menimbulkan dinamika sosial yang rumit. Tantangan-tantangan ini mencakup:

- a) Kepentingan yang Saling Bertentangan: Dalam satu komunitas, berbagai kelompok bisa memiliki tujuan dan kepentingan yang saling bertentangan. Misalnya, kelompok petani mungkin memiliki kepentingan yang berbeda dengan pengusaha lokal atau pemerintah daerah dalam hal penggunaan lahan. Pendamping harus bisa menavigasi dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan ini.
- b) Kesenjangan Sosial dan Ekonomi: Perbedaan sosial dan ekonomi di masyarakat bisa mempersulit proses perubahan. Kelompok masyarakat yang lebih rentan atau termarginalkan mungkin tidak memiliki suara atau akses yang sama terhadap

sumber daya, sementara kelompok yang lebih dominan mungkin memiliki kekuasaan lebih untuk mengendalikan arah perubahan.

- c) Keragaman Budaya dan Nilai: Masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda mungkin memiliki nilai, norma, atau keyakinan yang berbeda-beda. Hal ini bisa mempengaruhi cara mereka merespons upaya perubahan sosial. Agen perubahan sosial harus mampu menghargai dan bekerja dengan keragaman budaya tersebut.

Menghadapi kompleksitas sosial ini memerlukan keterampilan yang tinggi dalam mediasi, negosiasi, dan membangun kesepahaman antar kelompok. Pendamping juga perlu menerapkan pendekatan yang partisipatif, di mana semua suara dalam komunitas didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

Peluang Dalam Peran Pendamping Dan Agen Perubahan Sosial

Peluang dalam peran pendamping dan agen perubahan sosial adalah aspek krusial yang dapat memfasilitasi keberhasilan dan mempercepat proses transformasi sosial dalam masyarakat. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, seperti ketidakpastian politik, resistensi terhadap perubahan, dan kompleksitas sosial, terdapat peluang signifikan yang bisa dimanfaatkan oleh pendamping untuk mencapai dampak yang lebih besar dan berkelanjutan. Peluang-peluang ini mencakup perkembangan teknologi, kolaborasi lintas sektor melalui kemitraan strategis, serta pengakuan yang semakin luas terhadap pentingnya pemberdayaan masyarakat di kalangan pemerintah dan lembaga internasional. Setiap peluang ini membawa dinamika baru yang, bila dikelola dengan tepat, dapat menjadi katalisator bagi perubahan sosial yang positif. Beberapa peluang dalam peran pendamping dan agen perubahan sosial adalah

1. Teknologi Baru

Teknologi informasi dan komunikasi (ICT) telah membawa revolusi dalam cara pendamping dan agen perubahan sosial menjalankan peran mereka. Teknologi baru menawarkan berbagai alat dan platform yang dapat meningkatkan efisiensi, keterlibatan masyarakat, serta akses terhadap informasi dan sumber daya. Peluang ini mencakup beberapa aspek penting:

- a) Peningkatan Efektivitas dan Jangkauan Pendidikan: Dengan adanya teknologi seperti platform pembelajaran online, aplikasi seluler, serta media sosial, pendamping dapat memberikan pelatihan dan pendidikan jarak jauh kepada masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Teknologi ini memungkinkan pengiriman materi yang lebih cepat dan murah, serta memungkinkan interaksi dua arah antara pendamping dan masyarakat secara real-time. Hal ini meningkatkan kemampuan masyarakat untuk belajar secara mandiri dan berkelanjutan.
- b) Penguatan Partisipasi Masyarakat: Melalui media digital, agen perubahan sosial dapat memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam berbagai diskusi, konsultasi publik, dan proses pengambilan keputusan. Teknologi membuka ruang bagi

partisipasi yang lebih inklusif, di mana anggota masyarakat dapat dengan mudah menyuarakan pendapat, berbagi informasi, dan berkolaborasi dalam proyek-proyek pemberdayaan. Dengan teknologi, masyarakat juga dapat lebih mudah memantau dan mengawasi proyek pembangunan yang sedang berlangsung, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

- c) Akses Terhadap Sumber Daya dan Jaringan Global: Teknologi memungkinkan masyarakat dan pendamping mengakses berbagai sumber daya penting seperti data, penelitian, praktik terbaik, serta jaringan global. Hal ini memungkinkan mereka untuk terhubung dengan inisiatif serupa di berbagai belahan dunia, mempelajari pengalaman-pengalaman sukses, dan mengadaptasi teknologi atau inovasi terbaru untuk diaplikasikan di komunitas lokal.

Namun, tantangan yang menyertai peluang ini adalah adanya ketimpangan akses teknologi, di mana masyarakat yang kurang memiliki infrastruktur digital mungkin tertinggal dalam memanfaatkan peluang ini. Oleh karena itu, pendamping harus memastikan inklusi digital sebagai bagian dari strategi pemberdayaan mereka.

2. Kemitraan Strategis

Kemitraan strategis antara berbagai pemangku kepentingan—seperti pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah (LSM), dan lembaga internasional—menawarkan peluang besar untuk memperkuat dampak pemberdayaan sosial. Kolaborasi lintas sektor ini penting karena memungkinkan pendamping dan agen perubahan sosial untuk memanfaatkan sumber daya, pengalaman, dan pengaruh yang lebih besar dibandingkan bekerja sendiri.

- a) Kolaborasi dengan Pemerintah: Dengan bermitra dengan pemerintah, pendamping dapat mempengaruhi kebijakan yang mendukung program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pemerintah dapat menyediakan sumber daya berupa dana, infrastruktur, serta kerangka kebijakan yang kondusif untuk mendukung inisiatif-inisiatif sosial di berbagai tingkatan, dari lokal hingga nasional.
- b) Sektor Swasta dan Inovasi: Kemitraan dengan sektor swasta membuka akses terhadap teknologi, inovasi, serta model bisnis yang dapat digunakan untuk meningkatkan keberlanjutan program pemberdayaan. Misalnya, sektor agribisnis dapat menyediakan teknologi baru untuk petani kecil, atau perusahaan teknologi dapat memperkenalkan alat digital untuk membantu masyarakat meningkatkan keterampilan atau akses pasar. Pendamping juga dapat bekerja sama dengan sektor swasta dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang mendukung komunitas lokal.
- c) LSM dan Organisasi Internasional: Organisasi non-pemerintah (LSM) serta lembaga internasional sering kali memiliki keahlian yang mendalam dalam konteks pemberdayaan masyarakat, baik dalam bentuk pengalaman lapangan maupun sumber daya teknis. Pendamping yang bekerja sama dengan LSM dapat mengakses jaringan global, mendapatkan pelatihan tambahan, serta memperoleh pendanaan dan dukungan logistik untuk proyek-proyek mereka.

Kemitraan strategis ini juga meningkatkan kapasitas pendamping untuk mengimplementasikan program pada skala yang lebih luas, menjangkau lebih banyak komunitas, serta memperkuat keberlanjutan proyek jangka panjang. Tantangan dari kemitraan ini mungkin datang dalam bentuk perbedaan tujuan, nilai, atau prioritas antar pemangku kepentingan, sehingga kemampuan negosiasi dan mediasi menjadi keterampilan penting bagi agen perubahan sosial.

3. Pengakuan yang Lebih Luas

Kesadaran yang semakin meningkat di kalangan pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat luas tentang pentingnya pemberdayaan sosial menawarkan peluang untuk meningkatkan dukungan serta mendapatkan akses yang lebih besar terhadap sumber daya. Pengakuan ini menciptakan beberapa dampak positif:

- a) Dukungan Kebijakan: Di banyak negara, pengakuan terhadap pentingnya pemberdayaan masyarakat telah memicu adopsi kebijakan yang mendukung peran pendamping dalam pembangunan. Pemerintah sering kali menyadari bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan kunci dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini dapat membawa dukungan kebijakan, peraturan, serta pendanaan yang lebih besar bagi agen perubahan sosial.
- b) Peningkatan Sumber Daya Internasional: Pengakuan global terhadap pentingnya pemberdayaan masyarakat juga meningkatkan peluang bagi pendamping untuk mendapatkan dukungan dari lembaga internasional, seperti organisasi multilateral atau donor global. Dana hibah dan program pelatihan yang disediakan oleh organisasi ini membantu pendamping memperkuat kapasitas mereka dan mengembangkan program yang lebih efektif.
- c) Meningkatkan Kredibilitas dan Kapasitas: Pengakuan lebih luas dari berbagai pemangku kepentingan memungkinkan pendamping membangun kredibilitas mereka di mata masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini penting dalam menciptakan kepercayaan, yang pada akhirnya membantu mereka dalam membangun hubungan yang lebih kuat dan berkelanjutan dengan komunitas.

Evaluasi/Latihan Soal:

1. Bagaimana pendamping dapat mengatasi resistensi terhadap perubahan dalam komunitas?
2. Apa saja strategi yang dapat digunakan agen perubahan sosial untuk mendorong inovasi dalam masyarakat yang tertutup?
3. Bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat peran pendamping dan agen perubahan sosial?

BAB 6. Penguatan Kapasitas Kelompok Rentan

Materi pada Bab 6 ini memiliki muatan sebagai berikut :

- **Capaian belajar untuk sikap dan perilaku (*Learning Outcome for Attitudes and Values*):**

Kemampuan Bidang Ilmu Pengetahuan:

- A. SC 3: Mampu memahami bidang ilmu manajemen, bisnis, kewirausahaan, kelembagaan, sosiologi, penyuluhan dan komunikasi, serta ilmu-ilmu pertanian untuk pengembangan pembangunan agribisnis berkelanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat.
- B. SC 4: Mampu memahami secara operasional prinsip-prinsip sosial, ekonomi dan teknologi yang melandasi pengelolaan usaha pertanian dan industri pertanian serta aspek sosial-budaya di pedesaan untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pendahuluan: Definisi Kapasitas Rentan

Kelompok kapasitas rentan adalah kelompok atau individu yang memiliki keterbatasan dalam menghadapi risiko dan mengelola sumber daya yang dimiliki, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, maupun lingkungan. Keterbatasan ini membuat mereka lebih rentan terhadap gangguan atau tantangan eksternal, seperti perubahan sosial, kebijakan yang tidak adil, bencana alam, atau krisis ekonomi. Keterbatasan dalam kapasitas ini sering kali mencakup rendahnya kemampuan dalam mengakses atau memanfaatkan sumber daya yang ada, lemahnya posisi tawar di masyarakat, dan minimnya dukungan institusional. Secara spesifik, kelompok kapasitas rentan ini dapat ditemukan di berbagai sektor kehidupan. Dalam konteks agribisnis dan pemberdayaan masyarakat, kelompok ini sering kali terdiri dari petani kecil, buruh tani, perempuan tani, atau kelompok masyarakat adat yang tinggal di daerah pedesaan atau daerah terpencil. Mereka menghadapi tantangan struktural dan sistemik yang memengaruhi kemampuan mereka untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Karakteristik Kelompok Kapasitas Rentan

Beberapa ciri atau karakteristik utama dari kelompok kapasitas rentan meliputi:

1. Ketergantungan pada Sumber Daya yang Terbatas: Kelompok ini biasanya sangat bergantung pada sumber daya alam yang terbatas, seperti tanah, air, dan hasil pertanian. Sumber daya ini sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak, apalagi untuk investasi dalam jangka panjang.
2. Akses yang Terbatas terhadap Pendidikan dan Informasi: Rendahnya akses terhadap pendidikan dan informasi menyebabkan terbatasnya pengetahuan tentang

teknologi baru, inovasi, serta peluang pengembangan kapasitas diri dan komunitas. Hal ini semakin memperburuk kondisi rentan kelompok tersebut.

3. Rendahnya Daya Tawar: Dalam banyak kasus, kelompok kapasitas rentan memiliki posisi tawar yang rendah, baik di dalam pasar maupun dalam kebijakan publik. Mereka sering kali tidak memiliki perwakilan yang memadai dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal, regional, maupun nasional.
4. Keterbatasan Akses terhadap Layanan Keuangan: Salah satu hambatan utama yang dihadapi kelompok rentan adalah keterbatasan akses ke layanan keuangan formal, seperti kredit, asuransi, atau tabungan. Akibatnya, mereka tidak mampu berinvestasi untuk meningkatkan kapasitas atau menanggulangi risiko yang mungkin muncul.
5. Kerentanan terhadap Risiko Eksternal: Kelompok kapasitas rentan lebih terpengaruh oleh perubahan eksternal seperti fluktuasi harga pasar, perubahan iklim, bencana alam, atau krisis ekonomi. Mereka cenderung tidak memiliki mekanisme perlindungan atau jaringan sosial yang kuat untuk menanggulangi dampak dari risiko-risiko ini.

Faktor Penyebab Kerentanan

1. Kondisi Ekonomi: Banyak kelompok kapasitas rentan hidup di bawah garis kemiskinan atau berada dalam kondisi ekonomi yang rentan. Keterbatasan akses terhadap modal, sumber daya alam, atau pasar membuat mereka sulit untuk berinovasi atau mengembangkan usaha mereka. Sebagai contoh, petani kecil sering kali bergantung pada hasil pertanian subsisten tanpa adanya akses ke pasar yang lebih luas atau teknologi yang lebih maju.
2. Kondisi Sosial: Status sosial yang terpinggirkan atau terdiskriminasi juga menjadi faktor utama dalam kerentanan kelompok ini. Misalnya, perempuan di pedesaan atau komunitas adat sering kali tidak diakui perannya dalam proses pengambilan keputusan atau tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal pendidikan dan pelatihan. Kondisi ini memperburuk kerentanan mereka dalam menghadapi perubahan ekonomi atau lingkungan.
3. Faktor Lingkungan: Kelompok kapasitas rentan sering kali tinggal di daerah yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir, kekeringan, atau tanah longsor. Ketergantungan yang besar terhadap sumber daya alam yang tidak stabil membuat mereka lebih mudah terkena dampak dari perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Dalam agribisnis, perubahan musim atau ketidakstabilan cuaca dapat secara signifikan memengaruhi produktivitas kelompok tani kecil.
4. Faktor Politik dan Kebijakan: Kebijakan publik yang tidak berpihak pada kelompok rentan juga memperparah kondisi mereka. Banyak kebijakan pertanian, misalnya, lebih berpihak pada pengusaha besar atau investor asing, sementara petani kecil tidak mendapatkan akses yang memadai ke lahan, modal, atau pasar. Ketidakadilan

dalam distribusi lahan atau akses terhadap teknologi juga menjadi penyebab utama ketidakberdayaan mereka.

Pentingnya Penguatan Kelompok Kapasitas Rentan

Penguatan kelompok kapasitas rentan memiliki peran yang sangat krusial dalam menciptakan perubahan positif di dalam masyarakat, terutama dalam sektor pertanian. Kelompok rentan, seperti petani kecil, buruh tani, atau perempuan tani, sering kali berada pada posisi yang paling terpinggirkan dalam hal akses terhadap sumber daya dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Penguatan mereka bertujuan untuk membangun ketahanan, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki kesejahteraan mereka secara berkelanjutan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penguatan kelompok rentan sangat penting:

1. Meningkatkan Ketahanan Terhadap Risiko

Kelompok rentan sering kali menghadapi berbagai risiko eksternal seperti perubahan iklim, ketidakstabilan ekonomi, bencana alam, serta perubahan harga komoditas pertanian. Tanpa adanya penguatan, kelompok ini akan terus berada dalam situasi yang rentan terhadap gangguan-gangguan tersebut.

Penguatan melalui peningkatan kapasitas, seperti pelatihan dalam teknologi adaptif dan akses terhadap layanan perlindungan sosial, membantu mereka untuk lebih siap dalam menghadapi risiko. Misalnya, petani yang diberikan pelatihan tentang teknik pertanian berkelanjutan akan lebih mampu mengatasi perubahan cuaca ekstrem dan menurunkan risiko gagal panen.

2. Meningkatkan Produktivitas Pertanian

Kelompok kapasitas rentan sering kali memiliki tingkat produktivitas yang rendah akibat keterbatasan dalam akses terhadap teknologi, modal, dan pasar. Penguatan yang dilakukan melalui penyediaan akses terhadap teknologi modern, inovasi dalam praktik pertanian, dan peningkatan keterampilan manajerial dapat membantu mereka meningkatkan produktivitas hasil pertanian mereka.

Contohnya, dengan memberikan akses terhadap sistem irigasi yang lebih efisien atau bibit unggul, petani kecil dapat meningkatkan hasil panen mereka secara signifikan. Selain itu, peningkatan akses terhadap kredit mikro memungkinkan mereka untuk berinvestasi dalam usaha mereka, baik untuk membeli alat produksi maupun memperluas lahan pertanian.

3. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial-Ekonomi

Salah satu tujuan utama dari penguatan kelompok kapasitas rentan adalah untuk mengangkat kesejahteraan sosial-ekonomi mereka. Dengan memperkuat kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya dan menghadapi tantangan, mereka dapat mengubah keadaan sosial-ekonomi mereka ke arah yang lebih baik.

Kelompok yang diberikan akses ke pelatihan manajemen keuangan dan pengelolaan usaha, misalnya, akan lebih mampu untuk mengelola pendapatan mereka dengan baik, mengurangi ketergantungan pada pihak lain, serta menginvestasikan pendapatan tersebut ke dalam pendidikan dan kesehatan keluarga mereka.

4. Mendorong Pertanian yang Berkelanjutan

Penguatan kelompok rentan di bidang pertanian juga penting untuk mencapai tujuan pertanian berkelanjutan. Kelompok ini sering kali merupakan penjaga sumber daya alam yang sangat penting seperti lahan dan air, namun kurang memiliki pengetahuan atau teknologi untuk mengelola sumber daya tersebut secara berkelanjutan.

Melalui program-program penguatan, kelompok-kelompok ini dapat diberikan pendidikan tentang pertanian ramah lingkungan, penggunaan teknologi hemat energi, serta praktik-praktik pertanian yang memperhitungkan keberlanjutan jangka panjang. Dengan cara ini, mereka tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan yang lebih luas.

5. Mewujudkan Sistem Pertanian yang Inklusif

Sistem pertanian yang inklusif adalah sistem yang melibatkan seluruh pihak, termasuk kelompok rentan, dalam rantai pasokan dan pengambilan keputusan. Dengan penguatan, kelompok rentan memiliki kesempatan untuk lebih berperan aktif dalam menentukan kebijakan lokal dan memperoleh posisi tawar yang lebih baik dalam pasar.

Misalnya, perempuan tani yang sering kali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dapat didorong untuk aktif melalui pelatihan kepemimpinan atau partisipasi dalam kelompok tani. Dengan demikian, mereka tidak hanya terlibat dalam produksi pertanian tetapi juga dalam merumuskan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.

6. Meningkatkan Kemandirian dan Ketangguhan Komunitas

Penguatan kelompok rentan juga bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan ketangguhan komunitas secara keseluruhan. Ketika kelompok rentan diberikan alat, keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan, mereka tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan luar.

Implikasi Kerentanan terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengurangi kerentanan kelompok ini dengan memperkuat kapasitas mereka dalam mengelola sumber daya, menghadapi risiko, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Proses pemberdayaan ini harus dimulai dengan pemahaman yang mendalam tentang akar permasalahan yang dihadapi kelompok kapasitas rentan, serta keterbatasan-keterbatasan yang mereka alami dalam mengakses sumber daya dan informasi.

Pemberdayaan kelompok kapasitas rentan dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, kelompok rentan dapat dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Ini

termasuk pelatihan dalam teknologi pertanian, manajemen keuangan, hingga keterampilan pemasaran.

2. Peningkatan Akses terhadap Sumber Daya dan Modal: Program-program yang memberikan akses lebih luas terhadap lahan, modal, dan pasar harus diimplementasikan untuk membantu kelompok kapasitas rentan keluar dari lingkaran kemiskinan. Misalnya, koperasi tani dapat dibentuk untuk memperkuat posisi tawar petani kecil dalam menghadapi perantara atau tengkulak.
3. Penguatan Institusi Lokal: Kelembagaan lokal seperti kelompok tani atau organisasi komunitas dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatasi masalah yang dihadapi kelompok rentan. Kelembagaan ini dapat menjadi perantara dalam menyediakan akses terhadap sumber daya, memberikan pelatihan, atau memperjuangkan hak-hak mereka di tingkat kebijakan.
4. Perlindungan Sosial dan Kebijakan Inklusif: Pemerintah dan lembaga internasional harus menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan adil bagi kelompok kapasitas rentan. Program-program perlindungan sosial, seperti asuransi pertanian atau subsidi untuk petani kecil, dapat membantu mereka menghadapi risiko yang timbul akibat bencana atau fluktuasi harga pasar.

Karakteristik Kelompok Kapasitas Rentan di Bidang Agribisnis

Dalam konteks agribisnis, kelompok kapasitas rentan sering kali terdiri dari petani kecil, buruh tani, atau keluarga tani yang hidup di bawah garis kemiskinan. Beberapa karakteristik umum kelompok kapasitas rentan dalam agribisnis meliputi:

1. Jenis Kelompok Rentan dalam Agribisnis
 - a) Petani Kecil: Mereka yang mengandalkan pertanian subsisten, dengan sumber daya yang sangat terbatas untuk meningkatkan produktivitas atau bersaing di pasar yang lebih luas.
 - b) Perempuan Tani: Perempuan yang bekerja di sektor pertanian sering menghadapi diskriminasi gender, termasuk kurangnya akses terhadap lahan, pelatihan, dan sumber daya yang sama dengan rekan laki-lakinya.
 - c) Buruh Tani Harian: Mereka yang tidak memiliki lahan sendiri dan hanya bekerja berdasarkan upah harian tanpa jaminan kerja atau pendapatan yang tetap.
 - d) Komunitas Adat: Memiliki keterbatasan dalam akses ke teknologi dan pasar.
2. Karakteristik Kelompok Rentan
 1. Keterbatasan Akses Modal Kelompok rentan sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap sumber pendanaan formal, seperti pinjaman bank atau investasi. Keterbatasan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya agunan yang memadai, kurangnya jaringan dengan lembaga keuangan, atau ketidakpahaman tentang cara mengakses dana tersebut. Ketergantungan mereka pada sistem keuangan informal, seperti rentenir atau pinjaman pribadi, juga dapat

menambah beban ekonomi dengan suku bunga tinggi. Akibatnya, kelompok ini sulit untuk berinvestasi dalam usaha atau memperluas kegiatan produktif mereka, yang berdampak pada rendahnya pendapatan dan ketahanan ekonomi mereka.

2. Keterbatasan Pendidikan Pendidikan formal yang rendah atau terbatasnya akses terhadap pelatihan dan penyuluhan membuat kelompok rentan kurang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk berkembang. Di pedesaan, misalnya, banyak petani yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan pertanian modern atau pengetahuan manajerial yang dapat membantu mereka mengelola usaha secara lebih efektif. Kurangnya pendidikan ini juga membatasi kemampuan mereka untuk memahami dan memanfaatkan peluang, termasuk dalam inovasi dan teknologi baru yang dapat meningkatkan hasil produksi. Dengan minimnya pendidikan, kelompok rentan sering kali tidak dapat bersaing dalam pasar tenaga kerja atau pertanian yang semakin kompetitif.
3. Keterbatasan Teknologi dan Informasi Akses terhadap teknologi modern dan informasi pasar sering kali menjadi kendala utama bagi kelompok rentan. Mereka mungkin tidak memiliki akses terhadap teknologi pertanian yang lebih efisien atau informasi terkini mengenai harga pasar dan peluang ekonomi lainnya. Kurangnya akses ini memperparah kesenjangan produktivitas antara kelompok rentan dan kelompok yang lebih berdaya. Di bidang pertanian, misalnya, teknologi seperti alat irigasi modern, mesin pertanian, atau benih unggul jarang dimanfaatkan oleh petani kecil karena biaya yang tinggi atau kurangnya pengetahuan tentang cara menggunakannya. Selain itu, tanpa akses terhadap informasi pasar, mereka kesulitan untuk merencanakan produksi dan menentukan harga yang kompetitif.

Tantangan yang Dihadapi Kelompok Rentan

Kelompok rentan dalam sektor pertanian, seperti petani kecil, perempuan tani, dan pekerja tani, menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan saling terkait. Tantangan ini mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan teknologi, yang secara keseluruhan mempengaruhi kapasitas mereka untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan. Berikut adalah uraian rinci mengenai tantangan-tantangan tersebut:

1. Tantangan Ekonomi

Tantangan ekonomi yang dihadapi oleh kelompok rentan menjadi penghalang utama bagi mereka untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

- a) Keterbatasan Modal: Banyak kelompok rentan kesulitan mendapatkan akses ke modal yang memadai untuk berinvestasi dalam peralatan pertanian, benih unggul, pupuk, dan input pertanian lainnya. Tanpa akses ke modal, petani kecil tidak dapat meningkatkan skala usaha mereka atau menerapkan teknologi yang lebih efisien. Keterbatasan ini juga membuat mereka lebih rentan terhadap risiko gagal panen dan fluktuasi harga.
- b) Fluktuasi Harga: Harga komoditas pertanian sering kali berfluktuasi secara drastis, tergantung pada kondisi pasar, cuaca, dan kebijakan pemerintah. Petani kecil, yang biasanya hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak ada akses terhadap informasi

pasar, sering kali tidak memiliki kekuatan tawar-menawar untuk menjual hasil pertanian mereka dengan harga yang menguntungkan. Akibatnya, pendapatan mereka sangat dipengaruhi oleh ketidakstabilan harga, yang berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi keluarga mereka.

2. Tantangan Sosial

Tantangan sosial juga berdampak signifikan pada kemampuan kelompok rentan untuk berpartisipasi secara setara dalam kegiatan ekonomi dan pengambilan keputusan.

1. Keterbatasan Pendidikan: Kurangnya akses terhadap pendidikan formal dan pelatihan teknis menyebabkan kelompok rentan tertinggal dalam mengadopsi teknologi pertanian modern atau teknik manajemen yang lebih efisien. Pendidikan yang terbatas ini juga membatasi kemampuan mereka untuk memanfaatkan peluang yang tersedia dalam rantai pasok pertanian, seperti akses ke pasar yang lebih luas atau pembiayaan inovatif.
2. Diskriminasi Gender: Perempuan di sektor pertanian sering kali menghadapi diskriminasi dalam hal akses terhadap tanah, kredit, pelatihan, dan sumber daya lainnya. Meskipun perempuan memainkan peran penting dalam kegiatan pertanian, mereka sering tidak dianggap sebagai pemangku kepentingan utama dalam pengambilan keputusan pertanian. Hal ini menghambat potensi perempuan untuk mengembangkan kapasitas mereka dan berkontribusi secara penuh terhadap keberlanjutan pertanian dan ekonomi keluarga.

3. Tantangan Lingkungan

Lingkungan yang semakin tidak stabil menambah kerentanan kelompok pertanian, terutama yang tidak memiliki sumber daya untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan masalah lingkungan lainnya.

1. Perubahan Iklim: Perubahan iklim membawa dampak besar bagi kelompok rentan, terutama petani kecil yang sangat bergantung pada pola cuaca yang konsisten. Curah hujan yang tidak menentu, peningkatan suhu, dan kejadian cuaca ekstrem seperti kekeringan atau banjir mengurangi produktivitas pertanian. Tanpa akses ke teknologi adaptif atau sistem peringatan dini, petani sering kali tidak siap menghadapi dampak-dampak perubahan iklim tersebut.
2. Degradasi Lahan: Praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, seperti penebangan liar, penggunaan pestisida secara berlebihan, dan pengelolaan air yang buruk, menyebabkan degradasi lahan. Kelompok rentan sering kali tidak memiliki alternatif lain selain terus menggunakan lahan yang menurun kualitasnya, yang pada gilirannya mengurangi hasil panen dan merusak ekosistem pertanian secara keseluruhan.

4. Tantangan Teknologi

Kelompok rentan sering mengalami kesenjangan dalam hal akses dan penggunaan teknologi pertanian modern yang dapat meningkatkan produktivitas mereka.

1. Akses Terbatas ke Teknologi Modern

Banyak kelompok petani kecil tidak memiliki akses ke teknologi modern seperti alat irigasi, mesin pertanian, atau teknologi informasi untuk pemantauan pasar. Kurangnya akses ini disebabkan oleh biaya tinggi dan kurangnya dukungan dari pemerintah atau lembaga keuangan.

2. Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan

Meskipun teknologi tersedia, kelompok rentan mungkin tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Tanpa pelatihan yang memadai, teknologi tidak akan digunakan secara optimal dan bisa saja menambah biaya tanpa memberikan hasil yang signifikan.

3. Resistensi terhadap Perubahan

Ada juga resistensi terhadap perubahan teknologi di antara kelompok rentan karena ketidakpastian atau ketakutan akan kegagalan. Budaya pertanian tradisional dan ketergantungan pada metode lama membuat kelompok rentan ragu untuk mencoba teknologi baru, terutama jika mereka merasa tidak memiliki dukungan atau informasi yang cukup.

4. Ketergantungan pada Pihak Luar: Kelompok rentan sering kali bergantung pada pihak luar seperti distributor atau pedagang besar untuk mendapatkan input pertanian dan menjual hasil produksi. Ketergantungan ini menempatkan mereka pada posisi yang lemah dalam negosiasi harga atau kondisi perdagangan, memperkuat ketidakadilan ekonomi yang sudah ada.

5. Kesenjangan Teknologi: Kelompok rentan sering kali tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi pertanian yang terus berubah, menciptakan kesenjangan antara mereka dan petani yang lebih berdaya secara ekonomi. Ketidaksetaraan ini menambah beban kompetisi dalam pasar yang semakin global.

Konsep Penguatan Kapasitas

Penguatan kapasitas adalah proses strategis dan terstruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, atau masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, menghadapi tantangan, serta mencapai tujuan secara efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks pemberdayaan kelompok rentan, penguatan kapasitas berfokus pada pengembangan keterampilan, akses terhadap sumber daya, dan peningkatan kemampuan adaptasi mereka terhadap perubahan lingkungan ekonomi dan sosial.

Penguatan kapasitas adalah suatu proses yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan kelompok atau individu agar mereka dapat lebih mandiri dalam mengelola tantangan yang dihadapi, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya dan risiko yang sering kali tidak dapat dikendalikan. Proses ini tidak hanya mencakup pelatihan

atau pemberian keterampilan baru, tetapi juga transformasi dalam pola pikir, struktur organisasi, dan tata kelola kelompok tersebut. Penguatan kapasitas melibatkan pendekatan holistik yang mencakup peningkatan keterampilan teknis, manajerial, serta penguatan jaringan sosial dan ekonomi.

Ada beberapa tujuan utama yang ingin dicapai melalui penguatan kapasitas bagi kelompok rentan, di antaranya:

1. Meningkatkan Kemampuan Mengelola Sumber Daya: Kelompok rentan, seperti petani kecil atau pekerja tani, sering kali memiliki akses terbatas terhadap sumber daya seperti modal, lahan, teknologi, dan informasi. Tujuan penguatan kapasitas adalah membantu mereka untuk lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas tersebut. Misalnya, pengenalan teknologi irigasi yang lebih hemat air atau metode pertanian organik yang ramah lingkungan dapat membantu petani memaksimalkan hasil pertanian mereka dengan input yang minimal.
2. Meningkatkan Daya Saing: Dalam pasar global yang kompetitif, kelompok rentan sering kali tertinggal dalam hal daya saing. Penguatan kapasitas bertujuan untuk memperkuat kemampuan mereka dalam bersaing, baik melalui peningkatan keterampilan teknis, peningkatan kualitas produk, atau akses ke pasar yang lebih luas. Contohnya, program penguatan kapasitas yang membantu petani mengakses pasar digital atau program sertifikasi dapat meningkatkan daya saing produk mereka di pasar lokal maupun internasional.
3. Meningkatkan Ketahanan terhadap Risiko: Kelompok rentan sangat rentan terhadap berbagai risiko, baik yang bersifat ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Penguatan kapasitas bertujuan untuk meningkatkan ketahanan mereka terhadap risiko-risiko ini dengan cara memberikan pelatihan dan dukungan yang tepat. Contohnya, penguatan kapasitas dalam manajemen risiko pertanian dapat membantu petani mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim atau fluktuasi harga pasar.
4. Mendorong Kemandirian: Salah satu tujuan utama dari penguatan kapasitas adalah untuk mendorong kemandirian kelompok rentan, sehingga mereka dapat beroperasi secara mandiri tanpa ketergantungan yang berlebihan pada bantuan luar. Hal ini dicapai melalui peningkatan keterampilan teknis, pelatihan manajerial, serta penguatan institusi lokal yang mendukung kelompok rentan tersebut.
5. Meningkatkan Keterlibatan Sosial: Penguatan kapasitas juga bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan kelompok rentan dalam pengambilan keputusan dan proses sosial-ekonomi yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini melibatkan upaya untuk memberdayakan mereka secara politik dan sosial, sehingga mereka memiliki suara yang lebih kuat dalam kebijakan yang mempengaruhi komunitas mereka.

Strategi yang dilakukan dalam penguatan kapasitas rentan adalah sebagai berikut

1. Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan: Pelatihan teknis dan manajerial diberikan untuk meningkatkan keterampilan praktis yang diperlukan oleh kelompok rentan dalam mengelola usaha mereka. Misalnya, petani dapat diberikan

pelatihan dalam manajemen lahan, teknik budidaya yang efisien, atau manajemen keuangan sederhana. Program Pendidikan Pertanian : Fokus pada teknik pertanian modern seperti teknologi irigasi, pemupukan berimbang, dan pengendalian hama terpadu. Penekanan pada praktik pertanian berkelanjutan yang dapat meningkatkan hasil dan mengurangi dampak lingkungan. Pelatihan Keterampilan Manajerial: Melatih kelompok rentan dalam manajemen usaha tani, termasuk perencanaan bisnis, pemasaran, dan administrasi keuangan.

2. Akses Terhadap Sumber Daya: Penguatan kapasitas juga melibatkan upaya untuk meningkatkan akses kelompok rentan terhadap sumber daya yang mereka butuhkan. Ini bisa berupa akses terhadap modal, teknologi, informasi pasar, serta dukungan kebijakan yang memungkinkan mereka untuk lebih berdaya. Modal dan Kredit Mikro: Penyediaan pinjaman mikro atau fasilitas kredit untuk memungkinkan investasi dalam peralatan, benih, dan input pertanian lainnya. Program pembiayaan berbasis komunitas yang mendukung kelompok rentan. Teknologi Pertanian: Pengenalan teknologi pertanian yang inovatif, seperti sistem irigasi hemat air dan benih unggul yang tahan terhadap kondisi lingkungan ekstrem; Penyediaan informasi dan pelatihan tentang penggunaan teknologi baru.
3. Pendampingan dan Penguatan Institusi Lokal: Penguatan kapasitas sering kali melibatkan pendampingan dari lembaga atau individu yang lebih berpengalaman. Selain itu, penguatan institusi lokal, seperti kelompok tani atau koperasi, dapat memberikan platform yang kuat bagi kelompok rentan untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya.
4. Penguatan Jaringan dan Kerjasama: Penguatan kapasitas tidak hanya melibatkan peningkatan keterampilan individu, tetapi juga mendorong kerja sama antara kelompok-kelompok rentan, lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Jaringan yang kuat dapat membantu kelompok rentan untuk berbagi sumber daya, mengakses pasar, serta meningkatkan daya tawar mereka dalam negosiasi. Kolaborasi dengan Pemerintah: Pengembangan kebijakan yang mendukung kelompok rentan, termasuk subsidi, insentif pajak, dan dukungan teknis. Program-program pemerintah untuk meningkatkan akses ke pasar dan sumber daya. Kemitraan dengan Sektor Swasta: Kerjasama dengan perusahaan untuk pemasaran produk pertanian, penyediaan teknologi, dan dukungan pelatihan; Membangun hubungan dengan pasar dan rantai pasokan untuk meningkatkan akses pasar.

Implementasi Program: Penyusunan Program Penguatan Kelompok Rentan

1. Penyusunan Program

Langkah pertama dalam implementasi program penguatan kelompok rentan adalah melakukan perencanaan yang matang. Penyusunan program ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh kelompok tersebut. Berikut langkah-langkah dalam penyusunan program:

- a) Identifikasi Kebutuhan: Pengumpulan data dan informasi mengenai kelompok rentan sangat penting untuk mengetahui kebutuhan spesifik mereka. Metode pengumpulan data bisa berupa survei, wawancara, atau observasi langsung. Data yang dikumpulkan bisa mencakup tantangan akses modal, pengetahuan teknologi, keterampilan manajerial, dan hambatan sosial-ekonomi lain yang dihadapi oleh kelompok tersebut.
- b) Penentuan Tujuan dan Sasaran: Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur. Tujuan tersebut harus realistis dan dapat dicapai, seperti meningkatkan pendapatan kelompok rentan atau memperkuat akses mereka terhadap pasar. Sasaran program juga harus jelas, seperti peningkatan produktivitas melalui teknologi pertanian atau penguatan kapasitas manajerial kelompok rentan.

2. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program harus melibatkan kelompok rentan secara aktif, sehingga mereka bisa menjadi bagian integral dari proses pemberdayaan itu sendiri. Beberapa tahapan yang penting dalam pelaksanaan program adalah:

- a) Keterlibatan Kelompok Sasaran: Kelompok rentan harus dilibatkan dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Keterlibatan ini memastikan bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan mereka, sekaligus meningkatkan rasa memiliki terhadap program tersebut. Pelibatan juga dapat dilakukan melalui pendekatan partisipatif, seperti pelatihan atau diskusi kelompok terarah.
- b) Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Pemantauan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan ini bisa mencakup evaluasi terhadap progres yang dicapai dalam meningkatkan produktivitas kelompok rentan, pengukuran dampak dari intervensi teknologi, atau kemampuan kelompok dalam mengakses sumber daya baru. Pemantauan berkala juga memungkinkan program untuk menyesuaikan jika ditemukan kendala atau tantangan baru selama pelaksanaan.

3. Tindak Lanjut

Setelah program selesai dilaksanakan, tindak lanjut adalah bagian penting dalam memastikan keberlanjutan hasil yang telah dicapai.

- a) Evaluasi Dampak dan Keberlanjutan: Evaluasi harus dilakukan untuk menilai dampak jangka panjang dari program terhadap kelompok rentan. Evaluasi ini tidak hanya melihat hasil akhir program, tetapi juga menilai apakah kelompok rentan mampu mempertahankan dan memanfaatkan hasil tersebut dalam jangka panjang. Evaluasi bisa dilakukan beberapa bulan setelah program berakhir untuk melihat apakah peningkatan produktivitas, pendapatan, atau akses ke pasar terus berlanjut.
- b) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan: Hasil evaluasi digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang bertujuan meningkatkan efektivitas program di masa depan. Rekomendasi kebijakan ini bisa berupa usulan untuk memperluas program ke kelompok rentan lain, atau kebijakan khusus untuk meningkatkan akses

kelompok rentan terhadap sumber daya atau teknologi. Rekomendasi ini juga bisa mencakup perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah yang mendukung keberlanjutan program.

4. Evaluasi dan Pengukuran

Evaluasi merupakan salah satu aspek kunci dalam menentukan keberhasilan program. Ada dua pendekatan evaluasi yang dapat digunakan:

- a) **Kualitatif:** Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami pengalaman dan persepsi kelompok rentan terhadap program. Metode yang digunakan bisa berupa wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (FGD), atau studi kasus yang memberikan gambaran tentang perubahan yang dialami oleh individu atau kelompok selama pelaksanaan program.
- b) **Kuantitatif:** Pendekatan kuantitatif lebih fokus pada pengukuran hasil yang dapat diukur, seperti peningkatan pendapatan atau produktivitas. Metode yang digunakan bisa berupa survei, analisis data statistik, atau pengukuran hasil produksi. Data ini membantu mengidentifikasi dampak program terhadap indikator ekonomi yang terukur, seperti pendapatan rumah tangga, jumlah produksi pertanian, atau efisiensi penggunaan sumber daya.

5. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan adalah tolok ukur yang digunakan untuk menilai apakah tujuan program telah tercapai. Beberapa indikator keberhasilan yang relevan dalam konteks penguatan kelompok rentan adalah:

- a) **Peningkatan Pendapatan:** Salah satu indikator utama adalah peningkatan pendapatan rumah tangga atau individu. Pendapatan ini bisa berasal dari hasil produksi pertanian yang meningkat, akses yang lebih baik ke pasar, atau pengurangan biaya produksi melalui penggunaan teknologi atau metode baru.
- b) **Peningkatan Produktivitas:** Indikator produktivitas dapat diukur dari hasil panen, efisiensi penggunaan input pertanian, serta output yang dihasilkan. Peningkatan produktivitas menunjukkan bahwa kelompok rentan mampu memanfaatkan sumber daya secara lebih optimal setelah mengikuti program.
- c) **Akses ke Pasar:** Keberhasilan program juga bisa diukur dari sejauh mana kelompok rentan mampu meningkatkan akses mereka ke pasar. Indikator ini mencakup jumlah dan frekuensi penjualan hasil pertanian, serta harga yang mereka dapatkan di pasar. Peningkatan akses ke pasar memberikan dampak positif terhadap pendapatan dan keberlanjutan usaha kelompok rentan.

Tantangan dan Solusi Penguatan Kelompok Rentan

Penguatan kelompok rentan dalam sektor agribisnis menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi untuk mencapai keberhasilan program pemberdayaan. Tantangan-tantangan ini berakar pada aspek ekonomi, sosial, dan teknologi yang sering kali

menimbulkan kesulitan bagi kelompok tersebut. Berikut adalah beberapa tantangan umum dan solusi yang bisa diterapkan.

1. Keterbatasan Sumber Daya

1. Keterbatasan Dana: Banyak kelompok rentan, seperti petani kecil, menghadapi kesulitan dalam mengakses modal untuk investasi dalam peralatan, teknologi, dan input pertanian lainnya. Mereka sering kali tidak memiliki jaminan atau kredit yang cukup untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal.
2. Keterbatasan Infrastruktur: Infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan yang tidak layak, minimnya akses ke irigasi, dan penyimpanan hasil pertanian yang terbatas, dapat memperburuk kondisi ekonomi kelompok rentan.
3. Keterbatasan Teknologi: Kelompok rentan seringkali tidak memiliki akses ke teknologi pertanian modern, yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ketiadaan teknologi ini memperlambat kemampuan mereka dalam mengadopsi praktik-praktik yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

2. Resistensi terhadap Perubahan

1. Ketidakpastian dan Kekhawatiran: Banyak kelompok rentan menunjukkan resistensi terhadap perubahan karena mereka khawatir bahwa metode atau teknologi baru yang diperkenalkan mungkin gagal. Keengganan untuk mengubah cara bertani yang sudah berlangsung lama adalah tantangan besar dalam proses pemberdayaan.
2. Kurangnya Pemahaman tentang Teknologi: Kelompok rentan seringkali kurang pengetahuan tentang manfaat teknologi baru, sehingga mereka lebih cenderung bertahan pada metode tradisional yang mereka kenal.

Solusi yang dapat diberikan dalam mengatasi tantangan yang muncul dalam kegiatan pemberdayaan Masyarakat kelompok rentan adalah sebagai berikut

1. Dukungan Pemerintah

- Kebijakan dan Insentif yang Mendukung: Pemerintah dapat memberikan dukungan kepada kelompok rentan dengan menyediakan kebijakan yang berpihak pada mereka. Misalnya, pemberian subsidi untuk input pertanian, seperti pupuk dan benih, atau insentif untuk adopsi teknologi pertanian modern. Selain itu, pemerintah dapat mendukung pembangunan infrastruktur pertanian yang memadai, termasuk irigasi, jalan penghubung ke pasar, dan fasilitas penyimpanan hasil panen.
- Program Kredit Mikro: Pemerintah atau lembaga keuangan dapat menciptakan skema kredit mikro yang memungkinkan kelompok rentan, termasuk petani kecil dan perempuan tani, untuk mengakses modal dengan persyaratan yang lebih lunak dan suku bunga yang lebih rendah. Ini akan membantu mereka dalam mengatasi masalah keterbatasan dana untuk investasi dalam sektor agribisnis.

2. Pelatihan Berkelanjutan

- Pelatihan tentang Teknologi Pertanian: Pelatihan yang berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan. Program pelatihan teknologi pertanian dapat dirancang untuk mengedukasi kelompok rentan tentang manfaat dari adopsi teknologi baru, seperti penggunaan mesin pertanian, sistem irigasi modern, atau aplikasi digital untuk manajemen pertanian. Pelatihan ini harus disertai dengan pendampingan teknis yang memadai agar mereka dapat mengimplementasikan teknologi tersebut dengan baik.
 - Pendampingan Sosial dan Manajerial: Kelompok rentan juga memerlukan pelatihan dalam keterampilan manajerial dan pengelolaan keuangan agar mereka dapat mengelola sumber daya mereka secara lebih efektif. Selain itu, pendampingan sosial dapat membantu mereka dalam memahami hak-hak mereka dan melawan diskriminasi, misalnya dalam hal akses tanah bagi perempuan tani.
3. Pendekatan Partisipatif
- Keterlibatan Aktif Kelompok Rentan dalam Perencanaan Program: Pendekatan partisipatif yang melibatkan kelompok rentan dalam perencanaan dan implementasi program dapat mengurangi resistensi terhadap perubahan. Dengan melibatkan mereka secara langsung, program pemberdayaan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal, sehingga penerapannya lebih mudah diterima oleh kelompok tersebut.
4. Kolaborasi dengan Lembaga Non-Pemerintah dan Sektor Swasta
- Kerjasama dengan LSM dan Swasta: Kolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sektor swasta dapat memperkuat program pemberdayaan. LSM sering kali memiliki pengalaman dan pengetahuan lapangan yang mendalam, sementara sektor swasta dapat berperan dalam menyediakan teknologi pertanian atau akses pasar yang lebih luas untuk produk kelompok rentan.
5. Penguatan Akses ke Pasar
- Fasilitasi Akses ke Pasar: Salah satu cara untuk mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi kelompok rentan adalah dengan memperkuat akses mereka ke pasar. Pemerintah dan sektor swasta dapat membantu dengan membangun rantai pasok yang efisien, menciptakan platform pemasaran digital, atau mengurangi perantara dalam sistem distribusi sehingga kelompok rentan dapat menjual hasil pertanian mereka dengan harga yang lebih adil.

Evaluasi/Latihan Soal:

1. Teknologi pertanian apa yang dapat diakses oleh kelompok rentan?
2. Apa solusi alternatif untuk meningkatkan akses modal bagi petani kecil?

BAB 7. Teknik Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat

Materi pada Bab 7 ini memiliki muatan sebagai berikut :

- **Capaian belajar untuk sikap dan perilaku (*Learning Outcome for Attitudes and Values*):**

Kemampuan Bidang Ilmu Pengetahuan

- A. SC 4: Mampu memahami secara operasional prinsip-prinsip sosial, ekonomi dan teknologi yang melandasi pengelolaan usaha pertanian dan industri pertanian serta aspek sosial-budaya di pedesaan untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah berbasis pemberdayaan masyarakat.

Keterampilan Umum

- B. OC 4: Mampu mengaplikasikan dan memanfaatkan IPTEKS dalam penyelesaian masalah pada bidang agribisnis yang adaptif terhadap perubahan lingkungan dengan mengaplikasikan model pemberdayaan masyarakat.

Pengertian Teknik Partisipatif

Teknik partisipatif berakar dari konsep partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pendekatan ini mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20 sebagai respons terhadap pendekatan pembangunan yang top-down, di mana keputusan sering kali dibuat oleh pihak luar tanpa melibatkan masyarakat yang terdampak.

Pada tahun 1970-an, konsep partisipasi mulai mendapatkan perhatian lebih besar dalam konteks pembangunan internasional. Salah satu tonggak penting adalah munculnya metode Rapid Rural Appraisal (RRA) yang dikembangkan oleh Robert Chambers dan rekan-rekannya. Chambers dan rekan-rekannya mengembangkan metode ini untuk mengatasi bias dan kekurangan dari metode survei tradisional yang sering kali tidak mencerminkan realitas dan kebutuhan masyarakat lokal. Metode ini melibatkan teknik-teknik seperti transect walks, pemetaan partisipatif, dan diskusi kelompok terfokus untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan relevan dari masyarakat.

Meskipun RRA berhasil dalam banyak hal, Chambers menyadari bahwa pendekatan ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, ia mengembangkan Participatory Rural Appraisal (PRA), yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap proses pengumpulan data, analisis, dan pengambilan keputusan.

Penggunaan teknik partisipatif ini sendiri dimaksudkan sebagai pendekatan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pendekatan ini

menekankan pentingnya keterlibatan langsung masyarakat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal, yang bertujuan untuk:

1. Pemberdayaan Masyarakat: Tujuan utama dari pendekatan partisipatif adalah memberdayakan masyarakat dengan melibatkan mereka sebagai mitra sejati dalam proses pengembangan dan pelaksanaan inisiatif. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat berperan dalam mengidentifikasi masalah, menentukan solusi, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan lokal.
2. Meningkatkan Efektivitas Program: Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, pendekatan partisipatif dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program sosial. Partisipasi masyarakat membantu memastikan bahwa program yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal.
3. Membangun Rasa Kepemilikan: Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemberdayaan membantu membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap program yang dijalankan. Hal ini penting untuk keberlanjutan program jangka panjang.

selain beberapa tujuan utama dari teknik partisipatif, penting untuk mengeksplorasi manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan pendekatan ini. Manfaat teknik partisipatif tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang terlibat, tetapi juga oleh organisasi dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, kita dapat menciptakan program yang lebih relevan, efektif, dan berkelanjutan. Berikut ini adalah beberapa manfaat utama dari penerapan teknik partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat.

1. Transparansi dan Akuntabilitas: Pendekatan partisipatif mendorong transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Dengan melibatkan masyarakat, proses menjadi lebih terbuka dan akuntabel, sehingga mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan sumber daya.
2. Kolaborasi dan Sinergi: Melalui partisipasi aktif, berbagai pemangku kepentingan dapat bekerja sama dan menciptakan sinergi yang lebih baik. Kolaborasi ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien dan efektif.
3. Penghormatan terhadap Budaya Lokal: Pendekatan partisipatif mengedepankan penghormatan terhadap budaya dan nilai-nilai lokal. Dengan melibatkan masyarakat, program yang dikembangkan lebih mungkin diterima dan didukung oleh komunitas setempat.
4. Peningkatan Kapasitas Masyarakat: Partisipasi aktif dalam proses pemberdayaan membantu meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Mereka belajar untuk mengidentifikasi masalah, merencanakan solusi, dan mengimplementasikannya secara mandiri.
5. Keberlanjutan Program: Program yang dikembangkan dengan pendekatan partisipatif cenderung lebih berkelanjutan karena didukung oleh masyarakat yang merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap program tersebut.

Prinsip-Prinsip Partisipasi

Partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat merupakan landasan penting untuk memastikan keterlibatan aktif dan sukarela dari semua anggota komunitas dalam setiap tahap proses pemberdayaan. Prinsip partisipasi menekankan bahwa masyarakat harus dilibatkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program. Hal ini bertujuan untuk menghargai hak dan tanggung jawab masyarakat sebagai subjek, bukan objek, dari pemberdayaan, sebagaimana dijelaskan pada poin-poin berikut ini:

Inklusivitas

Inklusivitas berarti melibatkan semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan gender, usia, etnis, status sosial, atau kemampuan fisik. Dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan semua kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan meningkatkan representasi dan keadilan dalam pengambilan keputusan, serta mengurangi ketimpangan sosial.

1. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program guna untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil yang dicapai dan mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan akuntabilitas.

2. Kesetaraan dan Kemitraan

Kesetaraan dan kemitraan berarti semua pihak yang terlibat memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam proses partisipasi dengan tujuan untuk menciptakan hubungan yang setara antara masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya serta meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam mencapai tujuan bersama.

3. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah proses meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah mereka sendiri. Agar memberikan masyarakat kekuatan dan kemandirian dalam pengambilan keputusan, Serta meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan program, serta membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab.

4. Kerjasama

Kerjasama adalah kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Guna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program melalui sinergi dan pemanfaatan sumber daya yang optimal serta untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan produktif antara masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

5. Kesetaraan Kewenangan dan Tanggung Jawab

Kesetaraan kewenangan dan tanggung jawab berarti semua pihak yang terlibat memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab yang sama dalam pelaksanaan program. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya keseimbangan dalam distribusi kekuasaan dan tanggung jawab dan meningkatkan rasa keadilan dan tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan program.

A. Tahapan dalam Teknik Partisipatif

Teknik partisipatif melibatkan beberapa tahapan yang memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap langkah proses pemberdayaan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai tahapan-tahapan tersebut:

1. Identifikasi Masalah

Tahap ini melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Proses ini penting untuk memastikan bahwa masalah yang diangkat benar-benar relevan dan dirasakan oleh masyarakat. Dengan menggunakan metode:

- a) Curah Pendapat (Brainstorming): Mengumpulkan ide dan pendapat dari anggota masyarakat tentang masalah yang mereka hadapi.
- b) Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion): Diskusi terstruktur dengan kelompok kecil untuk mendalami masalah tertentu.
- c) Pemetaan Partisipatif (Participatory Mapping): Masyarakat membuat peta yang menunjukkan lokasi masalah dan sumber daya yang tersedia.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang diidentifikasi adalah masalah nyata yang dirasakan oleh masyarakat dan membutuhkan solusi.

2. Perencanaan

Tahap ini melibatkan masyarakat dalam merencanakan solusi dan strategi untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi dengan menggunakan metode:

- a) Analisis SWOT: Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait masalah dan solusi yang diusulkan.
- b) Diagram Venn: Menggambarkan hubungan antara berbagai pemangku kepentingan dan bagaimana mereka dapat bekerja sama.
- c) Kalender Musiman (Seasonal Calendar): Merencanakan kegiatan berdasarkan pola

Agar dapat mengembangkan rencana aksi yang realistis dan dapat dilaksanakan, dengan mempertimbangkan konteks lokal dan sumber daya yang tersedia.

3. Pelaksanaan

Tahap ini melibatkan masyarakat dalam implementasi rencana yang telah disusun. Partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan memastikan bahwa mereka memiliki rasa kepemilikan terhadap program menggunakan metode:

- a) Kerja Kelompok (Group Work): Masyarakat bekerja dalam kelompok untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.
- b) Pelatihan dan Pemberdayaan: Memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka dalam melaksanakan program.

Untuk memastikan bahwa program dilaksanakan sesuai rencana dan masyarakat memiliki peran aktif dalam setiap langkah pelaksanaan.

4. Pemantauan dan Evaluasi

Tahap ini melibatkan masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi hasil dari program yang telah dilaksanakan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan. Metode yang digunakan pada tahapan ini adalah dengan:

- a) Survei dan Kuesioner: Mengumpulkan data dari masyarakat tentang hasil dan dampak program.
- b) Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion): Mendiskusikan hasil dan dampak program dengan kelompok kecil masyarakat.
- c) Analisis Waktu (Timeline Analysis): Membuat garis waktu yang mencatat perkembangan dan perubahan yang terjadi selama pelaksanaan program.

Ketiga metode di atas dilakukan dengan tujuan untuk menilai keberhasilan program, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan memastikan bahwa program memberikan manfaat yang diharapkan.

Dengan mengikuti tahapan-tahapan dalam teknik partisipatif, kita dapat memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat dirancang dan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas dan efisiensi program, tetapi juga membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang penting untuk keberlanjutan jangka panjang. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang berdaya dan mandiri.

Metode dan Alat Partisipatif

Berikut adalah penjelasan rinci mengenai beberapa metode dan alat partisipatif yang sering digunakan dalam pemberdayaan masyarakat:

1. Focus Group Discussion (FGD)

FGD adalah diskusi terstruktur yang melibatkan sekelompok kecil orang untuk membahas topik tertentu secara mendalam. Diskusi ini dipandu oleh seorang fasilitator yang memastikan bahwa semua peserta memiliki kesempatan untuk berbicara dan berbagi pandangan mereka. Untuk mengumpulkan informasi kualitatif yang mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan persepsi peserta terkait topik yang dibahas.

Manfaat utama dari FGD adalah kemampuannya untuk menggali berbagai perspektif, sikap, dan perasaan peserta secara mendalam yang mungkin tidak dapat dicapai melalui metode lain seperti survei atau wawancara individu. FGD memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika kelompok dan mendapatkan wawasan yang lebih holistik tentang isu yang dibahas. Proses pelaksanaan FGD dimulai dengan perencanaan yang mencakup penentuan tujuan, pemilihan peserta yang relevan, dan penyusunan panduan diskusi. Diskusi dipandu oleh seorang moderator yang berperan penting dalam menjaga alur diskusi dan memastikan semua peserta berkontribusi. Moderator memulai dengan pertanyaan pembuka yang umum, kemudian mengarahkan diskusi ke topik yang lebih spesifik. Selama diskusi, penting untuk menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka agar peserta merasa bebas untuk berbagi pandangan mereka. Setelah diskusi selesai, hasil FGD dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan kesimpulan yang dapat digunakan untuk tujuan penelitian atau pengambilan keputusan.

2. Participatory Rural Appraisal (PRA)

PRA adalah pendekatan yang melibatkan masyarakat dalam proses pengumpulan data, analisis, dan pengambilan keputusan. Metode ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan mereka alat dan teknik untuk mengidentifikasi masalah dan merencanakan solusi. Agar dapat memberikan masyarakat kekuatan dan kapasitas

untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah mereka sendiri. Manfaat utama dari PRA adalah memperkuat peran masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka sendiri, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap hasil yang dicapai. PRA juga menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan karena didasarkan pada pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan potensi lokal. Selain itu, metode ini memperkuat hubungan sosial dalam komunitas dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengidentifikasi masalah serta menentukan solusi yang tepat. Dalam pelaksanaannya terdapat metode yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- b) Pemetaan Partisipatif: Masyarakat membuat peta yang menggambarkan sumber daya, infrastruktur, dan masalah di wilayah mereka.
- c) Transect Walks: Anggota masyarakat dan fasilitator berjalan melintasi wilayah untuk mengamati dan mendiskusikan kondisi lingkungan.
- d) Diagram Venn: Masyarakat membuat diagram yang menunjukkan hubungan antara berbagai lembaga dan kelompok dalam komunitas mereka.
- e) Kalender Musiman: Masyarakat membuat kalender yang menunjukkan aktivitas musiman, seperti pertanian dan pekerjaan.

3. *Community Mapping*

Community Mapping adalah proses di mana masyarakat membuat peta yang menggambarkan sumber daya, infrastruktur, dan masalah di wilayah mereka. Peta ini digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan solusi. Untuk mengidentifikasi sumber daya dan masalah di komunitas secara visual dan partisipatif. Manfaat utama dari *Community Mapping* adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lingkungan mereka sendiri, memperkuat rasa kepemilikan, dan memberdayakan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, metode ini dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan relevan, serta solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, *Community Mapping* juga dapat memperkuat hubungan sosial dalam komunitas dan meningkatkan kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat.

Proses pelaksanaan *Community Mapping* dimulai dengan perencanaan yang mencakup penentuan tujuan, pemilihan peserta, dan penyusunan panduan pemetaan. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data melalui berbagai teknik seperti wawancara, observasi, dan diskusi kelompok. Data yang terkumpul kemudian dianalisis bersama-sama oleh masyarakat untuk mengidentifikasi masalah utama dan potensi yang ada. Hasil analisis ini divisualisasikan dalam bentuk peta yang mudah dipahami dan digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rencana aksi. Selama pelaksanaan rencana aksi, dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan demikian, *Community Mapping* tidak hanya memberdayakan masyarakat tetapi juga memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

4. Survei dan Kuesioner

Survei dan kuesioner adalah alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari sejumlah besar responden. Survei biasanya terdiri dari serangkaian pertanyaan yang dapat dijawab secara tertulis atau melalui wawancara. Dengan tujuan untuk mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif tentang pandangan, pengalaman, dan persepsi masyarakat. Manfaat utama dari survei dan kuesioner adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi kebutuhan, persepsi, dan aspirasi masyarakat secara akurat. Dengan data yang dikumpulkan, pihak yang berwenang dapat merancang program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran dan efektif. Selain itu, survei dan kuesioner juga membantu dalam evaluasi program yang sedang berjalan, sehingga memungkinkan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Proses pelaksanaan survei dan kuesioner dimulai dengan perencanaan yang mencakup penentuan tujuan, desain kuesioner, dan pemilihan sampel responden. Kuesioner harus dirancang dengan pertanyaan yang jelas dan relevan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Setelah itu, dilakukan pengumpulan data melalui wawancara langsung, pengisian kuesioner secara mandiri, atau metode online. Penting untuk memastikan bahwa responden memahami tujuan survei dan merasa nyaman dalam memberikan jawaban yang jujur. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tren, pola, dan temuan utama yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan perencanaan program pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, survei dan kuesioner tidak hanya memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi masyarakat tetapi juga memberdayakan mereka dengan melibatkan mereka dalam proses pengumpulan informasi yang berdampak pada kehidupan mereka.

Metode dan alat partisipatif seperti FGD, PRA, Community Mapping, dan survei/kuesioner adalah alat yang efektif untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Dengan menggunakan pendekatan ini, kita dapat memastikan bahwa program yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal, serta meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap program tersebut.

Tantangan dalam Penerapan Teknik Partisipatif

Penerapan teknik partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat memang memiliki banyak manfaat, namun juga tidak lepas dari berbagai tantangan. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang sering dihadapi:

1. Kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan: Banyak anggota masyarakat yang belum memahami pentingnya partisipasi aktif dalam proses pemberdayaan. Kurangnya pengetahuan ini dapat menghambat partisipasi mereka dalam kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
2. Keterbatasan Sumber Daya: Pemberdayaan masyarakat seringkali memerlukan sumber daya yang cukup, baik dalam bentuk dana, waktu, maupun tenaga. Keterbatasan sumber daya ini dapat menghambat pelaksanaan program partisipatif secara efektif

3. Budaya dan Norma Sosial: Dalam beberapa komunitas, budaya dan norma sosial dapat menjadi penghalang bagi partisipasi aktif. Misalnya, dalam masyarakat yang patriarkal, partisipasi perempuan mungkin terbatas karena norma-norma yang mengatur peran gender.
4. Kendala Birokrasi: Proses birokrasi yang panjang dan kompleks sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan program partisipatif. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan implementasi program.
5. Tingkat Kepercayaan yang Rendah: Kepercayaan antara masyarakat dan pihak yang menginisiasi program pemberdayaan (misalnya pemerintah atau LSM) sering kali rendah. Pengalaman buruk di masa lalu dengan program-program serupa dapat membuat masyarakat skeptis dan enggan berpartisipasi.
6. Mobilitas Tinggi: Tingginya mobilitas masyarakat, terutama di daerah perkotaan, dapat menyulitkan pelaksanaan program partisipatif. Anggota masyarakat mungkin tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan pemberdayaan.
7. Minimnya Data dan Informasi: Kurangnya data yang akurat dan informasi yang relevan tentang kondisi masyarakat dapat menghambat perencanaan dan pelaksanaan program partisipatif yang efektif.

Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan adaptif, termasuk peningkatan kapasitas masyarakat, penyederhanaan proses birokrasi, dan pembangunan kepercayaan melalui transparansi dan komunikasi yang efektif. Pertama, peningkatan kesadaran dan pendidikan sangat penting. Ini dapat dilakukan melalui kampanye kesadaran dan program pendidikan berkelanjutan yang mencakup pelatihan keterampilan dan workshop partisipatif. Kedua, penguatan sumber daya lokal dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada serta membangun kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan sektor swasta untuk mendapatkan dukungan finansial dan teknis. Ketiga, penyesuaian dengan budaya lokal melalui studi budaya dan pendekatan yang sensitif terhadap norma-norma sosial, serta memastikan keterlibatan semua kelompok masyarakat dalam proses pemberdayaan. Keempat, penyederhanaan proses birokrasi dengan mengembangkan prosedur yang lebih transparan dan efisien serta memberikan lebih banyak kewenangan kepada komunitas lokal untuk membuat keputusan yang relevan. Kelima, pembangunan kepercayaan melalui transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap program serta membangun komunikasi yang efektif antara masyarakat dan pihak yang menginisiasi program. Terakhir, pengumpulan dan penggunaan data yang akurat melalui survei dan penelitian untuk mengumpulkan data yang relevan serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan strategi-strategi ini, diharapkan tantangan dalam penerapan teknik partisipatif dapat diatasi, sehingga program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Evaluasi/Latihan Soal:

1. Menurut pendapat anda, sejauh mana penerapan teknik partisipatif dapat berpengaruh pada keberhasilan kegiatan pemberdayaan Masyarakat?
2. Jelaskan penerapan Teknik partisipatif yang ada disekitar anda ?
3. Buat lah sebuah konsep pemberdayaan Masyarakat dengan menggunakan Teknik partisipatif?

BAB 8. Inovasi Sosial dan Triple Bottom Line

Materi pada Bab 8 ini memiliki muatan sebagai berikut:

- **Capaian belajar untuk sikap dan perilaku (*Learning Outcome for Attitudes and Values*):**

Keterampilan Umum:

- A. OC 4: Mampu mengaplikasikan dan memanfaatkan IPTEKS dalam penyelesaian masalah pada bidang agribisnis yang adaptif terhadap perubahan lingkungan dengan mengaplikasikan model pemberdayaan masyarakat.
- B. OC 5: Mampu berkomunikasi dan bernegosiasi secara efektif dengan pemangku kepentingan dalam pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mewujudkan agribisnis yang berkelanjutan dan efisien dalam mencapai keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

Keterampilan Khusus

- C. OC 6: Mampu menggunakan metode dan merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat dalam menghadapi tantangan program pembangunan agribisnis.

Definisi dan Konsep Dasar

Inovasi sosial merupakan proses pengembangan dan penerapan solusi baru untuk masalah sosial yang lebih efektif, efisien, berkelanjutan, atau adil dibandingkan solusi yang ada. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan nilai sosial. Inovasi sosial adalah konsep yang telah berkembang selama beberapa dekade. Istilah ini pertama kali muncul pada awal abad ke-20 dalam bidang sosiologi, dengan Lester Frank Ward sebagai salah satu pelopor yang membahas pentingnya inovasi dalam masyarakat. Namun, konsep ini mulai mendapatkan perhatian lebih luas setelah Perang Dunia II, ketika banyak negara mulai mencari cara baru untuk mengatasi masalah sosial yang kompleks.

Pada tahun 1960-an dan 1970-an, inovasi sosial mulai diakui sebagai pendekatan penting untuk mengatasi masalah sosial yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah atau sektor swasta saja. Pada periode ini, banyak organisasi non-profit dan komunitas lokal mulai mengembangkan solusi inovatif untuk masalah seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.

Dengan munculnya globalisasi dan perkembangan teknologi informasi pada akhir abad ke-20, inovasi sosial mengalami transformasi signifikan. Teknologi digital memungkinkan penyebaran ide dan praktik inovatif dengan lebih cepat dan luas. Misalnya, konsep microfinance yang diperkenalkan oleh Muhammad Yunus dan Grameen Bank pada tahun 1970-an menjadi salah satu contoh inovasi sosial yang berhasil mengatasi kemiskinan di banyak negara.

Pada awal abad ke-21, konsep inovasi sosial mulai diadopsi oleh sektor bisnis melalui inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kewirausahaan sosial. Banyak perusahaan mulai melihat nilai dalam menciptakan dampak sosial positif sebagai bagian dari strategi bisnis mereka. Hal ini juga didorong oleh meningkatnya kesadaran konsumen terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Lembaga pendidikan, seperti universitas, juga mulai memainkan peran penting dalam mempromosikan inovasi sosial. Program-program studi dan penelitian tentang inovasi sosial mulai berkembang, memberikan landasan teoritis dan praktis bagi pengembangan solusi inovatif. Pemerintah di berbagai negara juga mulai mendukung inovasi sosial melalui kebijakan dan pendanaan.

Meskipun inovasi sosial telah mencapai banyak keberhasilan, masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Ini termasuk keterbatasan sumber daya, resistensi terhadap perubahan, dan kebutuhan untuk mengukur dampak secara efektif. Namun, dengan terus berkembangnya teknologi dan kolaborasi lintas sektor, inovasi sosial memiliki potensi besar untuk terus menciptakan perubahan positif di masa depan.

Dampak Sosial

Inovasi sosial merupakan salah satu pendekatan yang semakin diakui dalam upaya mengatasi berbagai tantangan sosial yang kompleks di masyarakat. Dengan menggabungkan kreativitas, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor, inovasi sosial mampu menciptakan solusi yang tidak hanya efektif tetapi juga berkelanjutan. a Sub bab ini akan mengulas secara rinci bagaimana inovasi sosial mempengaruhi masyarakat, termasuk dalam hal peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan komunitas, serta memberikan contoh konkret dari implementasi yang telah berhasil dijalankan.

Peningkatan Kualitas Hidup

1. **Akses ke Layanan Dasar:** Inovasi sosial sering kali berfokus pada peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Misalnya, program microfinance seperti yang dijalankan oleh Kiva membantu masyarakat miskin mendapatkan akses ke pembiayaan untuk memulai usaha kecil, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka.
2. **Pendidikan dan Pelatihan:** Platform pendidikan seperti Ruangguru menyediakan akses ke materi pembelajaran berkualitas bagi siswa di seluruh Indonesia, membantu mereka mencapai potensi akademis mereka dan membuka peluang karir yang lebih baik.
3. **Kesehatan dan Kesejahteraan:** Inovasi dalam bidang kesehatan, seperti aplikasi telemedicine, memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk mendapatkan layanan medis yang sebelumnya tidak terjangkau. Ini tidak hanya meningkatkan kesehatan individu tetapi juga kesejahteraan keseluruhan komunitas.

Pemberdayaan Komunitas

1. **Partisipasi dan Keterlibatan:** Inovasi sosial sering kali melibatkan komunitas dalam proses pengembangan dan implementasi solusi. Ini meningkatkan rasa kepemilikan

dan tanggung jawab di antara anggota komunitas, serta memastikan bahwa solusi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lokal.

2. Pengembangan Keterampilan: Program seperti Kampung Marketer yang melatih pemuda desa dalam keterampilan pemasaran digital membantu memberdayakan mereka dengan keterampilan yang relevan untuk pasar kerja modern. Ini tidak hanya mengurangi pengangguran tetapi juga meningkatkan kapasitas komunitas untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi.
3. Penguatan Jaringan Sosial: Inovasi sosial sering kali menciptakan atau memperkuat jaringan sosial di dalam komunitas. Misalnya, inisiatif lingkungan seperti Sahabat Alam melibatkan komunitas dalam kegiatan konservasi, yang tidak hanya melindungi lingkungan tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan kerja sama antar anggota komunitas.

Dampak Ekonomi dan Lingkungan

1. Peningkatan Ekonomi Lokal: Inovasi sosial yang berfokus pada pengembangan ekonomi lokal, seperti program kewirausahaan sosial, membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan di komunitas. Ini berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan pengurangan kemiskinan.
2. Pelestarian Lingkungan: Inisiatif yang menggabungkan aspek lingkungan, seperti program daur ulang dan konservasi, membantu melindungi sumber daya alam dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Ini penting untuk keberlanjutan jangka panjang dan kualitas hidup generasi mendatang.

Studi Kasus

- Program Keluarga Harapan (PKH): Program ini telah membantu jutaan keluarga miskin di Indonesia dengan memberikan bantuan tunai bersyarat yang mendorong mereka untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Dampaknya termasuk peningkatan tingkat pendidikan dan kesehatan di kalangan penerima manfaat.
- Go-Jek: Sebagai platform layanan on-demand, Go-Jek telah menciptakan ribuan lapangan kerja bagi pengemudi dan pekerja lepas, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan transportasi dan ekonomi digital. Ini telah membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan banyak keluarga di Indonesia.

Secara keseluruhan, dampak sosial dari penerapan inovasi sosial menunjukkan potensi besar dalam menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan di masyarakat. Dengan fokus pada peningkatan akses terhadap layanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan komunitas, inovasi sosial mampu mengatasi berbagai masalah sosial yang kompleks dengan cara yang inovatif dan efektif. Contoh-contoh implementasi di Indonesia, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan platform Ruangguru, membuktikan bahwa inovasi sosial dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal, inovasi sosial dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, mendukung dan mengembangkan inovasi sosial adalah langkah penting menuju terciptanya masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Proses dan Metodologi

Inovasi sosial merupakan upaya yang kompleks dan dinamis untuk menciptakan solusi yang efektif terhadap berbagai tantangan sosial. Proses pengembangan inovasi sosial tidak hanya melibatkan identifikasi masalah dan pencarian solusi, tetapi juga memerlukan pendekatan metodologis yang sistematis dan kolaboratif. Berikut langkah-langkah kunci dan metodologi yang digunakan dalam pengembangan inovasi sosial, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi dampak. Dengan memahami proses dan metodologi ini, kita dapat lebih efektif dalam merancang dan mengimplementasikan solusi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat. Proses pengembangan inovasi sosial biasanya melibatkan beberapa langkah, termasuk identifikasi masalah, pengembangan ide, prototyping, pengujian, dan implementasi. Metodologi yang sering digunakan termasuk desain berpikir (design thinking) dan pendekatan partisipatif yang melibatkan komunitas dalam proses pengembangan, dengan melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. **Identifikasi Masalah Sosial:** Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah sosial yang mendesak dan membutuhkan solusi. Ini bisa dilakukan melalui penelitian, survei, dan konsultasi dengan pemangku kepentingan.
2. **Pengumpulan Data dan Analisis:** Mengumpulkan data yang relevan dan melakukan analisis mendalam untuk memahami akar penyebab masalah. Data ini bisa berasal dari sumber primer (wawancara, observasi) dan sekunder (literatur, laporan).
3. **Ideasi dan Konseptualisasi:** Mengembangkan ide-ide inovatif yang dapat menjadi solusi potensial. Proses ini sering melibatkan brainstorming dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
4. **Pengembangan Prototipe:** Membuat prototipe atau model awal dari solusi yang diusulkan. Prototipe ini kemudian diuji untuk melihat efektivitas dan kelayakannya.
5. **Uji Coba dan Validasi:** Melakukan uji coba solusi dalam skala kecil untuk mengumpulkan umpan balik dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Validasi ini penting untuk memastikan solusi dapat diterapkan secara efektif.
6. **Implementasi:** Setelah solusi divalidasi, langkah selanjutnya adalah implementasi dalam skala yang lebih besar. Ini melibatkan perencanaan yang matang, pengelolaan sumber daya, dan koordinasi dengan berbagai pihak.
7. **Evaluasi dan Pengukuran Dampak:** Melakukan evaluasi untuk mengukur dampak dari solusi yang telah diimplementasikan. Pengukuran dampak ini penting untuk menilai keberhasilan dan menentukan area yang perlu diperbaiki.

Metodologi dalam Pengembangan Inovasi Sosial

Pengembangan inovasi sosial memerlukan pendekatan metodologis yang terstruktur dan inklusif untuk memastikan solusi yang dihasilkan efektif dan berkelanjutan. Metodologi yang digunakan dalam inovasi sosial tidak hanya berfokus pada penciptaan ide-ide baru, tetapi juga pada proses implementasi dan evaluasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Berbagai metodologi yang dapat diterapkan

dalam pengembangan inovasi sosial, dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam menciptakan perubahan sosial yang positif dan berdampak luas, termasuk pendekatan partisipatif, desain berpusat pada manusia, dan kolaborasi antar sektor, sebagai berikut:

1. Pendekatan Partisipatif: Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam setiap tahap pengembangan inovasi. Partisipasi aktif memastikan solusi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal.
2. Desain Berpusat pada Manusia (Human-Centered Design): Fokus pada kebutuhan, keinginan, dan keterbatasan pengguna akhir. Metodologi ini melibatkan pemahaman mendalam tentang pengguna melalui wawancara, observasi, dan pengujian prototipe.
3. Metode Kualitatif dan Kuantitatif: Menggunakan kombinasi metode kualitatif (wawancara mendalam, observasi) dan kuantitatif (survei, analisis statistik) untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang masalah dan solusi.
4. Kolaborasi Antar Sektor: Mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Kolaborasi ini penting untuk menggabungkan sumber daya dan keahlian yang berbeda.
5. Pemanfaatan Teknologi: Menggunakan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan solusi sosial. Teknologi dapat membantu dalam pengumpulan data, analisis, dan implementasi solusi.

Metodologi dalam pengembangan inovasi sosial memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa solusi yang dihasilkan tidak hanya inovatif, tetapi juga relevan dan berkelanjutan. Dengan menerapkan pendekatan yang terstruktur dan inklusif, kita dapat mengatasi berbagai tantangan sosial secara efektif. Pendekatan partisipatif, desain berpusat pada manusia, dan kolaborasi antar sektor adalah beberapa metodologi yang telah terbukti berhasil dalam menciptakan dampak positif yang luas. Melalui pemahaman dan penerapan metodologi ini, kita dapat terus mendorong batas-batas inovasi sosial dan menciptakan perubahan yang berarti bagi masyarakat. Dengan demikian, kita tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih baik.

Implementasi Inovasi Sosial di Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan populasi yang besar dan beragam, menghadapi berbagai tantangan sosial yang kompleks. Dari masalah kemiskinan, pendidikan, hingga lingkungan, berbagai inisiatif inovatif telah dikembangkan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Inovasi sosial di Indonesia tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dari sektor swasta, organisasi non-profit, dan komunitas lokal. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan bagaimana solusi kreatif dan kolaboratif dapat membawa perubahan positif yang signifikan bagi masyarakat. Berikut ini adalah beberapa contoh implementasi inovasi sosial yang telah berhasil dijalankan di Indonesia, yang mencerminkan keberagaman pendekatan dan dampak yang dihasilkan.

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan untuk keluarga miskin di Indonesia untuk meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Bentuk pengimplementasian inovasi sosial pada program ini adalah, keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan tunai dengan syarat tertentu, seperti memastikan anak-anak mereka bersekolah dan mendapatkan imunisasi.

2. Ruangguru

Ruangguru adalah platform pendidikan berbasis teknologi yang menyediakan layanan bimbingan belajar online untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi siswa di seluruh Indonesia, dengan menyediakan video pembelajaran, latihan soal, dan layanan bimbingan belajar online yang dapat diakses melalui aplikasi.

3. Sahabat Alam

Sahabat Alam adalah inisiatif lingkungan yang berfokus pada pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati di Indonesia yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga alam, dengan melibatkan komunitas lokal dalam kegiatan konservasi, seperti penanaman pohon dan pendidikan lingkungan.

4. Go-Jek

Go-Jek adalah platform layanan on-demand yang menyediakan berbagai layanan, termasuk transportasi, pengiriman makanan, dan pembayaran digital, dengan tujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan transportasi dan ekonomi digital. Melalui aplikasi Go-Jek, pengguna dapat memesan layanan transportasi, pengiriman makanan, dan melakukan pembayaran digital dengan mudah.

5. Kampung Marketer

Kampung Marketer adalah inisiatif yang memberdayakan pemuda di desa untuk bekerja sebagai tenaga pemasaran digital. Agar dapat mengurangi pengangguran di desa dan meningkatkan keterampilan digital pemuda, dengan cara melatih pemuda desa dalam keterampilan pemasaran digital dan menghubungkan mereka dengan perusahaan yang membutuhkan layanan tersebut.

Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan bagaimana inovasi sosial dapat memberikan solusi kreatif untuk berbagai masalah sosial di Indonesia. Contoh-contoh implementasi yang telah dijalankan membuktikan bahwa inovasi sosial tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang yang positif. Dari program bantuan sosial hingga platform teknologi pendidikan, setiap inisiatif membawa harapan baru dan membuka peluang bagi perbaikan kualitas hidup. Dengan terus mendukung dan mengembangkan inovasi sosial, Indonesia dapat bergerak menuju masa depan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Tantangan dan Hambatan

Inovasi sosial memiliki potensi besar untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang kompleks dan mendesak. Namun, proses pengembangan dan implementasi inovasi sosial tidaklah mudah. Berbagai tantangan dan hambatan sering kali muncul, menguji ketahanan dan kreativitas para inovator sosial. Berikut tantangan-tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan inovasi sosial serta hambatan yang perlu diatasi untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan:

1. **Pendanaan** Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan inovasi sosial adalah pendanaan. Banyak inisiatif sosial yang kesulitan mendapatkan dana yang cukup untuk memulai dan mengembangkan proyek mereka. Sumber pendanaan yang terbatas sering kali menghambat kemampuan untuk melakukan penelitian, pengembangan, dan implementasi solusi yang efektif. Solusi potensial untuk mengatasi tantangan ini termasuk meningkatkan kolaborasi antara sektor publik dan swasta serta memanfaatkan *platform crowdfunding*.
2. **Skala dan Replikasi**, Meskipun banyak inovasi sosial yang berhasil dalam skala kecil, mengembangkan dan mereplikasi solusi ini dalam skala besar sering kali menjadi tantangan. Hambatan ini dapat disebabkan oleh kurangnya dukungan kebijakan, infrastruktur yang tidak memadai, dan keterbatasan sumber daya. Diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasi hambatan ini, termasuk dukungan kebijakan yang kuat dan pengembangan infrastruktur yang mendukung.
3. **Pengukuran Dampak**, Mengukur dampak dari inovasi sosial adalah tantangan lain yang signifikan. Tanpa metode pengukuran yang tepat, sulit untuk menilai efektivitas dan keberhasilan dari solusi yang diimplementasikan. Pengukuran dampak yang akurat memerlukan alat dan teknik yang canggih serta data yang komprehensif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa inovasi sosial benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan.
4. **Kepemimpinan dan Visi**, Kepemimpinan yang kuat dan visi yang jelas sangat penting dalam pengembangan inovasi sosial. Pemimpin harus mampu menginspirasi dan memotivasi tim mereka, serta memiliki visi yang berfokus pada nilai sosial. Tantangan dalam kepemimpinan dapat menghambat kemajuan proyek dan mengurangi efektivitas solusi yang dikembangkan.
5. **Kolaborasi Antar Sektor**, Inovasi sosial sering kali memerlukan kolaborasi antara berbagai sektor, termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Namun, membangun kolaborasi yang efektif dapat menjadi tantangan tersendiri. Perbedaan dalam tujuan, budaya organisasi, dan cara kerja dapat menghambat kerjasama yang produktif. Diperlukan upaya untuk membangun kepercayaan dan komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat.
6. **Regulasi dan Kebijakan**, Kebijakan dan regulasi yang tidak mendukung dapat menjadi hambatan besar dalam pengembangan inovasi sosial. Regulasi yang kaku dan birokrasi yang rumit sering kali menghambat kemampuan inovator sosial untuk bergerak cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi kebijakan

yang mendukung inovasi dan fleksibilitas regulasi sangat diperlukan untuk mendorong perkembangan inovasi sosial.

Mengatasi tantangan dan hambatan dalam pengembangan inovasi sosial memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Dengan memahami dan mengatasi berbagai tantangan ini, kita dapat menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Inovasi sosial memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat, dan dengan dukungan yang tepat, kita dapat mengatasi hambatan yang ada dan mencapai keberhasilan yang lebih besar. Melalui kolaborasi, kepemimpinan yang kuat, dan kebijakan yang mendukung, kita dapat mendorong inovasi sosial untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.

TRIPLE BOTTOM LINE (TBL)

Triple Bottom Line (TBL) adalah kerangka kerja keberlanjutan yang mengukur kinerja bisnis berdasarkan tiga dimensi utama: People (manusia), Planet (planet), dan Profit (keuntungan). Konsep ini menekankan bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan. Dengan demikian, TBL mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan, komunitas, dan lingkungan, bukan hanya kepada pemegang saham.

Tiga P dalam Triple Bottom Line

- A. People (Manusia): Dimensi ini mencakup dampak sosial bisnis terhadap semua pemangku kepentingan dan bagaimana bisnis tersebut menciptakan nilai bagi mereka. Ini termasuk kesejahteraan karyawan, pelanggan, komunitas lokal, dan mitra rantai pasokan. Perusahaan diharapkan untuk memajukan kesetaraan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- B. Planet (Planet): Dimensi ini berfokus pada dampak bisnis terhadap lingkungan alam. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem dan mempromosikan praktik berkelanjutan seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, daur ulang, dan penggunaan sumber daya yang efisien.
- C. Profit (Keuntungan): Selain keuntungan finansial tradisional, dimensi ini juga mencakup manfaat ekonomi yang diterima masyarakat dari strategi bisnis perusahaan. Ini termasuk penciptaan lapangan kerja, pembayaran pajak yang bertanggung jawab, dan kontribusi terhadap ekonomi lokal.

Konsep *Triple Bottom Line* pertama kali diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1994 dalam bukunya "Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business". Elkington mengkritik pendekatan bisnis tradisional yang hanya berfokus pada keuntungan finansial tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.

Pada awal 1990-an, banyak perusahaan yang beroperasi dengan orientasi keuntungan semata, sering kali mengabaikan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Praktik-praktik ini menyebabkan berbagai masalah seperti pemanasan global, pencemaran lingkungan, dan ketidakadilan sosial. Elkington mengusulkan konsep TBL

sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengintegrasikan keberlanjutan dalam strategi bisnis.

Konsep TBL kemudian menjadi dasar bagi berbagai inisiatif keberlanjutan global, termasuk Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) dan Global Reporting Initiative (GRI). Kedua inisiatif ini membantu perusahaan mengukur dan melaporkan kinerja mereka dalam tiga dimensi TBL, mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar.

Triple Bottom Line telah mengubah cara pandang perusahaan terhadap keberhasilan bisnis. Dengan mengintegrasikan dimensi sosial dan lingkungan ke dalam strategi bisnis, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan kinerja finansial mereka tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan planet. Melalui penerapan TBL, kita dapat menciptakan model bisnis yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya akan membawa manfaat jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan.

Penerapan Triple Bottom Line (TBL) dalam bisnis tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan mengintegrasikan dimensi sosial, lingkungan, dan ekonomi, TBL membantu menciptakan model bisnis yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dalam sub bab ini, kita akan membahas secara rinci dan komprehensif bagaimana penerapan TBL dapat memberikan manfaat yang signifikan dari berbagai perspektif.

Manfaat TBL bagi Perusahaan adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan Reputasi dan Citra Perusahaan
 - Perusahaan yang menerapkan TBL sering kali dipandang lebih positif oleh konsumen, investor, dan masyarakat umum. Reputasi yang baik dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan menarik lebih banyak investasi.
 - Contoh: Perusahaan seperti Patagonia dan Unilever yang dikenal dengan komitmen mereka terhadap keberlanjutan sering kali mendapatkan dukungan kuat dari konsumen yang peduli lingkungan.
2. Mengurangi Risiko dan Biaya Operasional
 - Dengan fokus pada keberlanjutan, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengurangi risiko lingkungan dan sosial yang dapat mempengaruhi operasi mereka. Misalnya, mengurangi penggunaan energi dan bahan baku dapat menurunkan biaya operasional.
 - Contoh: Implementasi praktik efisiensi energi dan pengelolaan limbah yang baik dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan margin keuntungan.
3. Meningkatkan Inovasi dan Daya Saing
 - Penerapan TBL mendorong perusahaan untuk berinovasi dalam menciptakan produk dan layanan yang lebih ramah lingkungan dan sosial. Inovasi ini dapat membuka pasar baru dan meningkatkan daya saing perusahaan.
 - Contoh: Tesla yang berfokus pada kendaraan listrik dan energi terbarukan telah menjadi pemimpin dalam industri otomotif berkat inovasi berkelanjutan mereka.
4. Kepuasan dan Produktivitas Karyawan
 - Perusahaan yang memperhatikan kesejahteraan karyawan cenderung memiliki tingkat kepuasan dan produktivitas yang lebih tinggi. Karyawan yang merasa

dihargai dan bekerja dalam lingkungan yang sehat lebih mungkin untuk berkontribusi secara positif.

- Contoh: Google dikenal dengan kebijakan karyawan yang inklusif dan lingkungan kerja yang mendukung, yang berkontribusi pada tingkat retensi karyawan yang tinggi.

Manfaat bagi Masyarakat

1. Peningkatan Kesejahteraan Sosial

- Penerapan TBL membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja yang adil, mendukung komunitas lokal, dan mempromosikan kesetaraan sosial.
- Contoh: Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan pembangunan komunitas dapat memberikan dampak positif yang signifikan.

2. Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan

- Dengan fokus pada keberlanjutan lingkungan, perusahaan dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem dan mempromosikan praktik ramah lingkungan.
- Contoh: Inisiatif pengurangan emisi karbon dan penggunaan energi terbarukan oleh perusahaan dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim.

3. Peningkatan Kualitas Hidup

- Inovasi sosial dan lingkungan yang dihasilkan dari penerapan TBL dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misalnya, produk yang lebih sehat dan aman, serta lingkungan yang lebih bersih.
- Contoh: Perusahaan yang memproduksi makanan organik dan bebas bahan kimia berbahaya membantu meningkatkan kesehatan konsumen.

4. Pemberdayaan Komunitas Lokal

- Perusahaan yang menerapkan TBL sering kali bekerja sama dengan komunitas lokal untuk mengembangkan proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini dapat menciptakan hubungan yang lebih kuat dan saling menguntungkan.
- Contoh: Program pemberdayaan ekonomi lokal yang melibatkan usaha kecil dan menengah dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi komunitas.

Penerapan *Triple Bottom Line* (TBL) menawarkan berbagai manfaat yang signifikan baik bagi perusahaan maupun masyarakat. Dengan mengintegrasikan dimensi sosial, lingkungan, dan ekonomi, perusahaan dapat menciptakan nilai yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Manfaat ini tidak hanya meningkatkan kinerja bisnis tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Melalui penerapan TBL, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan.

Implementasi *Triple Bottom Line* di Indonesia

Konsep *Triple Bottom Line* (TBL) telah menjadi kerangka kerja penting bagi perusahaan di seluruh dunia yang ingin mengintegrasikan keberlanjutan dalam operasi

bisnis mereka. Di Indonesia, penerapan TBL semakin mendapatkan perhatian, terutama di kalangan perusahaan besar yang berkomitmen untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Berikut adalah bagaimana konsep TBL diimplementasikan di Indonesia, termasuk contoh-contoh perusahaan yang telah berhasil menerapkannya.

1. PT Pertamina

- People (Manusia): PT Pertamina menjalankan berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Contohnya, program “Pertamina Sehati” yang menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat di sekitar wilayah operasinya.
- Planet (Planet): Pertamina juga berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan melalui berbagai inisiatif, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca dan pengelolaan limbah yang lebih baik. Mereka juga terlibat dalam proyek-proyek energi terbarukan.
- Profit (Keuntungan): Dengan mengintegrasikan keberlanjutan dalam strategi bisnisnya, Pertamina tidak hanya meningkatkan kinerja finansial tetapi juga menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan kontribusi terhadap ekonomi lokal.

2. PT Unilever Indonesia

- People (Manusia): Unilever Indonesia menjalankan program-program yang mendukung kesejahteraan karyawan dan komunitas. Salah satu inisiatifnya adalah program “Unilever Sustainable Living Plan” yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
- Planet (Planet): Unilever berfokus pada pengurangan jejak lingkungan melalui penggunaan bahan baku yang berkelanjutan, pengurangan limbah, dan efisiensi energi. Mereka juga berpartisipasi dalam proyek-proyek konservasi lingkungan.
- Profit (Keuntungan): Dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, Unilever berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya, yang pada akhirnya meningkatkan profitabilitas perusahaan.

3. PT Antam Tbk

- People (Manusia): PT Antam Tbk melaksanakan program CSR yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Mereka juga mendukung pengembangan kapasitas kelembagaan di komunitas lokal.
- Planet (Planet): Antam berkomitmen untuk mengelola dampak lingkungan dari operasinya melalui praktik-praktik pertambangan yang berkelanjutan dan rehabilitasi lahan pasca-tambang.
- Profit (Keuntungan): Dengan fokus pada keberlanjutan, Antam tidak hanya meningkatkan kinerja finansial tetapi juga memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar.

Implementasi konsep Triple Bottom Line di Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan dapat mencapai keberhasilan finansial sambil tetap bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Melalui berbagai inisiatif yang berfokus pada

dimensi sosial, lingkungan, dan ekonomi, perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak hanya meningkatkan kinerja mereka tetapi juga memberikan dampak positif yang luas. Dengan terus mengadopsi dan mengembangkan praktik-praktik keberlanjutan, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan.

Evaluasi/Latihan Soal:

1. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk penerapan inovasi sosial pada kelompok marjinal?
2. Bagaimana pendapat anda tentang penerapan konsep *triple bottom line* dalam kegiatan pemberdayaan Masyarakat?
3. Jelaskan, apakah korelasi antara inovasi sosial dan konsep *triple bottom line*?

BAB 9. Penyusunan Program Pemberdayaan Masyarakat

Materi pada Bab 9 ini memiliki muatan sebagai berikut :

- **Capaian belajar untuk sikap dan perilaku (*Learning Outcome for Attitudes and Values*):**

Keterampilan Umum:

- A. OC 4: Mampu mengaplikasikan dan memanfaatkan IPTEKS dalam penyelesaian masalah pada bidang agribisnis yang adaptif terhadap perubahan lingkungan dengan mengaplikasikan model pemberdayaan masyarakat.
- B. OC 5: Mampu berkomunikasi dan bernegosiasi secara efektif dengan pemangku kepentingan dalam pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mewujudkan agribisnis yang berkelanjutan dan efisien dalam mencapai keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

Keterampilan Khusus

- C. OC 6: Mampu menggunakan metode dan merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat dalam menghadapi tantangan program pembangunan agribisnis.

Pendahuluan

Penyusunan Program Pemberdayaan Masyarakat adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Masyarakat. Program ini dirancang untuk memberikan masyarakat kemampuan mandiri dan memberdayakan mereka agar dapat berperan aktif dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah mereka. Tujuan Program Pemberdayaan Masyarakat adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, sejahtera, dan mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Berikut beberapa tujuan utama dari program pemberdayaan Masyarakat:

1. Meningkatkan Kemandirian Masyarakat.
Memberikan masyarakat kemampuan dan sumber daya untuk mengelola potensi lokal dan memecahkan masalah secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan eksternal.
2. Mengurangi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi
Program pemberdayaan berupaya untuk memberdayakan kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan rentan, sehingga mereka dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan kesempatan kerja.
3. Memperkuat Kapasitas Masyarakat
Melalui pendidikan, pelatihan, dan penguatan kapasitas, masyarakat akan lebih siap untuk terlibat dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk pengelolaan sumber daya alam, ekonomi, serta pembangunan sosial dan budaya.

4. Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan

Program ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sehingga kebijakan yang dibuat lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

5. Mendorong Inovasi dan Penggunaan Teknologi

Masyarakat diberi akses dan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan ekonomi, misalnya melalui digitalisasi proses pertanian atau pengembangan usaha kecil dan menengah.

6. Menciptakan Pembangunan yang Berkelanjutan

Program ini bertujuan memastikan pembangunan yang dilakukan dapat berlanjut dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini termasuk pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan berkelanjutan.

7. Mengatasi Kemiskinan

Salah satu tujuan penting pemberdayaan adalah mengentaskan kemiskinan dengan memberi masyarakat alat, sumber daya, dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk memperbaiki kondisi hidup mereka.

Program Pemberdayaan Masyarakat sangat penting karena berperan sebagai salah satu strategi kunci dalam menciptakan masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya dalam menghadapi tantangan pembangunan.

Tahapan Penyusunan Program Pemberdayaan Masyarakat

Berikut adalah penjelasan rinci tentang setiap tahapan dalam Penyusunan Program Pemberdayaan Masyarakat, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga pemantauan dan evaluasi:

1. Identifikasi Kebutuhan

Tahap ini merupakan langkah pertama dalam penyusunan program pemberdayaan. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat serta potensi apa yang dapat dimanfaatkan dari lingkungan sekitar.

A. Analisis Kebutuhan Masyarakat

Analisis kebutuhan dilakukan dengan memahami masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat, baik secara sosial, ekonomi, lingkungan, maupun budaya. Data dapat dikumpulkan melalui survei, wawancara, diskusi kelompok terfokus (FGD), atau konsultasi dengan tokoh masyarakat. Misalnya, dalam sebuah desa, kebutuhan utama mungkin adalah akses air bersih, pendidikan, atau infrastruktur dasar seperti jalan.

Contoh: Di sebuah desa terpencil, setelah dilakukan survei, diketahui bahwa mayoritas penduduk menghadapi masalah kekurangan air bersih karena sistem distribusi air yang tidak memadai. Selain itu, masyarakat mengeluhkan kurangnya akses ke fasilitas pendidikan.

B. Pemetaan Potensi Daerah

Selain memahami kebutuhan, langkah penting lainnya adalah mengidentifikasi potensi lokal yang bisa dikembangkan. Potensi daerah dapat berupa sumber daya alam (pertanian, perikanan, hutan), keterampilan masyarakat, atau aset lokal lainnya yang bisa dimanfaatkan. Pemetaan potensi dilakukan untuk memastikan bahwa program pemberdayaan dirancang berdasarkan kekuatan yang dimiliki masyarakat, sehingga keberlanjutan program dapat dijaga.

Contoh: Dalam sebuah desa dengan wilayah yang subur namun akses air terbatas, potensi pertanian mungkin bisa dikembangkan dengan irigasi yang tepat. Desa tersebut juga mungkin memiliki keterampilan dalam kerajinan tangan yang bisa dikembangkan menjadi usaha kecil menengah.

2. Perencanaan

Setelah kebutuhan dan potensi teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana yang konkret dan dapat diimplementasikan.

A. Penetapan Sasaran dan Tujuan

Sasaran dan tujuan program harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan dibatasi waktu (SMART). Tujuan program pemberdayaan perlu dirumuskan dengan jelas sehingga semua pihak memahami apa yang ingin dicapai. Dalam menetapkan sasaran, penting untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses perumusan sehingga sasaran yang ditetapkan relevan dengan kebutuhan nyata mereka.

Contoh: Tujuan program bisa berupa "Meningkatkan akses air bersih bagi 100 keluarga di Desa X dalam waktu satu tahun melalui pembangunan sistem irigasi sederhana."

B. Penyusunan Anggaran dan Sumber Daya

Dalam merencanakan program, sangat penting untuk menyusun anggaran yang realistis. Sumber daya yang dibutuhkan harus dihitung, baik dalam bentuk finansial, tenaga kerja, maupun material. Anggaran perlu mencakup biaya pelatihan, pembangunan infrastruktur, upah pekerja, dan biaya operasional lainnya. Selain anggaran, perlu disusun rencana sumber daya manusia dan logistik, termasuk pelatihan bagi masyarakat lokal untuk menjalankan program.

Contoh: Dalam program pembangunan sistem irigasi, anggaran akan meliputi biaya bahan bangunan (pipa, alat-alat), upah pekerja, biaya transportasi, serta biaya pelatihan bagi teknisi lokal yang akan mengelola sistem irigasi tersebut.

3. Pelaksanaan

Tahap ini adalah implementasi dari program yang telah direncanakan. Pada tahap ini, berbagai kegiatan mulai dilaksanakan sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya.

A. Implementasi Program di Lapangan

Implementasi melibatkan pelaksanaan kegiatan program secara nyata di lapangan meliputi pengadaan sumber daya, pembangunan infrastruktur, pelatihan keterampilan, dan kegiatan lain yang sesuai dengan sasaran program. Dalam

pelaksanaan, penting untuk memastikan bahwa program tetap berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran.

Contoh: Dalam program pembangunan irigasi di desa, proses implementasi dimulai dengan penggalian saluran, pemasangan pipa, dan pembangunan tangki air, semuanya dilakukan dengan melibatkan pekerja dari masyarakat setempat.

B. Pelibatan Masyarakat Secara Aktif

Salah satu kunci sukses program pemberdayaan adalah partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam semua tahap program, mulai dari pengambilan keputusan, penyediaan tenaga kerja, hingga pelaksanaan program itu sendiri. Pelatihan teknis dapat diberikan kepada masyarakat agar mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memelihara dan mengelola program setelah program selesai.

Contoh: Dalam proyek irigasi, masyarakat lokal diberi pelatihan tentang cara merawat dan memperbaiki sistem irigasi. Mereka juga terlibat dalam proses konstruksi, sehingga memiliki rasa kepemilikan terhadap hasil dari program tersebut.

4. Pemantauan dan Evaluasi

Tahap akhir dari penyusunan program pemberdayaan adalah pemantauan dan evaluasi. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan dampak yang diharapkan.

A. Monitoring Pelaksanaan Program

Pemantauan dilakukan secara rutin selama program berlangsung untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana. Pemantauan melibatkan pengumpulan data lapangan, evaluasi progres, dan identifikasi hambatan yang muncul selama pelaksanaan. Ini dapat dilakukan oleh tim internal atau pihak eksternal yang independen.

Contoh: Dalam proyek pembangunan irigasi, pemantauan dilakukan setiap bulan untuk memastikan bahwa semua bahan bangunan telah sampai, tenaga kerja bekerja sesuai jadwal, dan kualitas konstruksi sesuai standar.

B. Evaluasi Dampak dan Efektivitas

Evaluasi dilakukan di akhir program untuk menilai efektivitas dan dampak dari program terhadap masyarakat. Evaluasi akan mengukur apakah program telah mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan, dan seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Hasil evaluasi digunakan untuk menyempurnakan program di masa mendatang dan sebagai bahan laporan kepada pihak yang mendanai program.

Contoh: Evaluasi dampak program irigasi dapat mencakup peningkatan hasil pertanian, jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih, serta persepsi masyarakat tentang manfaat program tersebut. Jika hasilnya positif, program ini dapat dijadikan model untuk diterapkan di desa lain.

C. Contoh Kasus: PNPM MANDIRI (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri)

PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) adalah sebuah program pemerintah Indonesia yang diluncurkan pada tahun 2007 dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan memperkuat kapasitas masyarakat di pedesaan maupun perkotaan. Program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan proyek pembangunan di lingkungan mereka.

Secara sederhana, PNPM Mandiri bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal agar mereka bisa memutuskan sendiri apa yang paling mereka butuhkan dan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Misalnya, jika sebuah desa memerlukan infrastruktur seperti jalan, jembatan, atau irigasi, mereka bisa mengajukan usulan tersebut dan mengelola dana yang disediakan pemerintah untuk membangun fasilitas tersebut.

PNPM Mandiri menekankan pada prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, program ini diharapkan dapat menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab atas hasil-hasil pembangunan yang dicapai.

Program ini mencakup beberapa sektor, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keterampilan masyarakat. PNPM Mandiri telah memberi dampak positif, terutama di daerah-daerah terpencil, karena proyek-proyek yang dilaksanakan benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, program ini juga menghadapi beberapa tantangan seperti korupsi dan masalah pengelolaan yang kurang efisien di beberapa daerah.

Pada tahun 2015, PNPM Mandiri diintegrasikan ke dalam program yang lebih besar bernama Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Desa.

Program PNPM Mandiri memiliki beberapa komponen utama yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Komponen-komponen ini mencakup berbagai aspek yang mendukung pembangunan di tingkat lokal. Berikut adalah komponen utama PNPM Mandiri:

1. PNPM Mandiri Perdesaan (PMP) Komponen ini fokus pada masyarakat di wilayah pedesaan. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan, masyarakat desa dapat menentukan prioritas pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi. Dana hibah diberikan kepada desa-desa untuk mendanai proyek-proyek yang telah disepakati bersama.
2. PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP). Fokus pada pemberdayaan masyarakat yang tinggal di perkotaan. PNPM Mandiri Perkotaan membantu masyarakat di wilayah perkotaan, khususnya daerah kumuh, untuk meningkatkan infrastruktur dasar seperti sanitasi, jalan, air bersih, dan perumahan. Tujuannya adalah memperbaiki kualitas hidup di area perkotaan dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan.
3. PNPM Mandiri Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Program ini mendukung pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang tertinggal atau sulit dijangkau, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. PISEW bertujuan

untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan menyediakan akses yang lebih baik ke fasilitas dasar.

4. PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM Generasi). Komponen ini berfokus pada peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, khususnya bagi ibu hamil, balita, dan anak-anak. PNPM Generasi Sehat dan Cerdas memberikan prioritas kepada kesehatan ibu dan anak serta pendidikan dasar bagi anak-anak untuk mengurangi kematian ibu, gizi buruk, dan putus sekolah.
5. PNPM Mandiri Daerah Khusus (PPK). Komponen ini dirancang untuk daerah-daerah yang tergolong daerah khusus atau tertinggal, termasuk wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Melalui PNPM Mandiri Daerah Khusus, pemerintah memberikan perhatian khusus untuk membangun infrastruktur dasar dan meningkatkan ekonomi lokal yang sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.
6. PNPM Mandiri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) Program ini bertujuan mempercepat pembangunan di daerah tertinggal dan wilayah perbatasan. Fokus utamanya adalah pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah tersebut, sehingga ketertinggalan mereka bisa dikurangi.
7. PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan
Komponen ini fokus pada masyarakat yang bermata pencaharian di bidang kelautan dan perikanan. Program ini memberikan bantuan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi melalui pengembangan teknologi, peningkatan akses pasar, dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Setiap komponen PNPM Mandiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan mereka secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Melalui pendekatan partisipatif, PNPM Mandiri memungkinkan masyarakat untuk mengambil peran dalam menentukan prioritas pembangunan dan memastikan bahwa program tersebut benar-benar bermanfaat bagi mereka.

Ruang lingkup Program Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mencakup berbagai bidang pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan perkotaan yang tertinggal. Berikut adalah ruang lingkup utama dari program ini:

1. Pemberdayaan Masyarakat
 - Fokus utama PNPM Mandiri adalah meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau proyek pembangunan. Program ini mendorong partisipasi masyarakat secara aktif, sehingga mereka dapat memutuskan prioritas pembangunan yang paling relevan dengan kebutuhan lokal. Proses pemberdayaan ini mencakup pelatihan, pembentukan kelompok masyarakat, dan pengembangan kapasitas kelembagaan lokal.
2. Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perkotaan

- PNPM Mandiri mencakup pembangunan infrastruktur dasar, seperti:
 - Jalan dan jembatan desa untuk meningkatkan aksesibilitas
 - Sistem irigasi untuk mendukung pertanian
 - Fasilitas air bersih dan sanitasi untuk kesehatan masyarakat
 - Infrastruktur lainnya seperti sekolah, pusat kesehatan masyarakat, dan pasar desa Pembangunan ini dilakukan berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh masyarakat setempat.
- 3. Pengembangan Ekonomi Lokal
 - Program ini berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat melalui:
 - Pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE)
 - Pemberian modal usaha untuk usaha mikro dan kecil
 - Pelatihan keterampilan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi
 - Peningkatan akses ke pasar dan teknologi untuk mendukung keberlanjutan usaha lokal PNPM Mandiri memberikan dana bergulir yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk usaha produktif.
- 4. Peningkatan Layanan Sosial (Kesehatan dan Pendidikan)
 - Ruang lingkup program juga meliputi peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, terutama di daerah yang kurang terlayani. Melalui komponen PNPM Generasi Sehat dan Cerdas, program ini berupaya mengurangi angka kematian ibu dan anak, memperbaiki gizi balita, dan meningkatkan akses anak-anak ke pendidikan dasar.
- 5. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan Lokal
 - Program ini mendukung penguatan institusi lokal, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga lainnya, agar dapat menjalankan peran mereka dalam pembangunan dengan lebih baik. Penguatan kelembagaan mencakup pelatihan manajemen, tata kelola yang transparan, dan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaan proyek pembangunan.
- 6. Pemberdayaan Kelompok Perempuan dan Marjinal
 - PNPM Mandiri juga menargetkan kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan, orang miskin, dan masyarakat marjinal. Program ini memastikan bahwa mereka mendapatkan akses yang setara terhadap manfaat pembangunan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kelompok perempuan, misalnya, seringkali diberdayakan melalui pelatihan keterampilan dan akses modal usaha.
- 7. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
 - Program ini mencakup proyek-proyek yang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Ini termasuk:
 - Proyek konservasi tanah dan air
 - Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

- Pengelolaan sampah dan sanitasi lingkungan Fokusnya adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan masyarakat serta melindungi sumber daya alam untuk generasi mendatang.
8. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah
- Program ini mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan proyek pembangunan. Tujuannya adalah memperkuat sinergi antara masyarakat dan pemerintah lokal untuk memastikan bahwa proyek pembangunan berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.
- Dengan ruang lingkup yang luas ini, PNPM Mandiri menjadi program yang komprehensif dalam menangani berbagai masalah pembangunan di tingkat lokal, mulai dari infrastruktur, ekonomi, sosial, hingga lingkungan.

Evaluasi / Latihan Soal

1. Buatlah program pemberdayaan masyarakat secara Masyarakat dan analisis dampak positif dan negatifnya?
2. Analisis program PNPM Mandiri yang kamu ketahui?

BAB 11. Membangun Jejaring Multistakeholder

Materi pada Bab 11 ini memiliki muatan sebagai berikut:

- **Capaian belajar untuk sikap dan perilaku (*Learning Outcome for Attitudes and Values*):**

Keterampilan Umum:

D. OC 4: Mampu mengaplikasikan dan memanfaatkan IPTEKS dalam penyelesaian masalah pada bidang agribisnis yang adaptif terhadap perubahan lingkungan dengan mengaplikasikan model pemberdayaan masyarakat.

E. OC 5: Mampu berkomunikasi dan bernegosiasi secara efektif dengan pemangku kepentingan dalam pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mewujudkan agribisnis yang berkelanjutan dan efisien dalam mencapai keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

Keterampilan Khusus

F. OC 6: Mampu menggunakan metode dan merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat dalam menghadapi tantangan program pembangunan agribisnis.

Pendahuluan

Dalam proses pemberdayaan masyarakat, tidak jarang sebuah inisiatif gagal mencapai tujuannya karena kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat. Masyarakat yang menjadi subjek utama dalam pemberdayaan seringkali tidak memiliki akses langsung ke sumber daya yang mereka butuhkan, sementara pemerintah, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat memiliki sumber daya yang tersebar dan tidak terkoordinasi. Di sinilah peran jejaring multi-stakeholder menjadi penting.

Jejaring multi-stakeholder adalah pendekatan yang melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu program pemberdayaan. Dengan melibatkan banyak pihak yang memiliki perspektif dan keahlian berbeda, jejaring ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang lebih besar dan menghasilkan dampak yang lebih signifikan bagi masyarakat (Korten, 1980).

Konsep Dasar Multi-Stakeholder dalam Pemberdayaan Masyarakat

Jejaring multi-stakeholder merujuk pada keterlibatan berbagai pihak atau kelompok dalam upaya mencapai tujuan bersama. Setiap stakeholder atau pemangku kepentingan memiliki peran penting, baik dalam bentuk dukungan kebijakan, penyediaan sumber daya, pengetahuan, atau partisipasi langsung dalam implementasi program. Dalam pemberdayaan masyarakat, stakeholder dapat terdiri dari:

- a) Pemerintah: Memiliki peran sebagai pembuat kebijakan, pengatur, dan penyedia dana atau fasilitas. Pemerintah juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang

kondusif untuk pemberdayaan melalui regulasi dan kebijakan publik (Mardikanto & Soebianto, 2015).

- b) Sektor Swasta: Sebagai mitra yang mampu memberikan dukungan finansial, investasi, atau teknologi yang dapat membantu program pemberdayaan menjadi lebih berkelanjutan. Sektor swasta juga sering memiliki akses ke pasar yang dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat yang diberdayakan (Chambers, 1997).
- c) LSM/Organisasi Non-Profit: Berperan dalam mobilisasi masyarakat, penyediaan pelatihan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program. LSM seringkali menjadi penghubung antara masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (FAO, 2015).
- d) Akademisi/Institusi Pendidikan: Berperan dalam menyediakan penelitian, analisis data, dan evaluasi terhadap efektivitas program pemberdayaan. Riset dari akademisi membantu dalam memahami kebutuhan masyarakat serta mengidentifikasi solusi yang berbasis bukti (UNDP, 2019).
- e) Masyarakat Lokal: Sebagai penerima manfaat sekaligus aktor utama yang akan mengimplementasikan berbagai inisiatif pemberdayaan. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2014).

Pentingnya Pendekatan Multistakeholder

Mengapa multi-stakeholder penting dalam pemberdayaan masyarakat? Alasan utama adalah bahwa tantangan yang dihadapi dalam proses pemberdayaan seringkali sangat kompleks dan tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Beberapa alasan pentingnya pendekatan ini adalah:

- A. Sumber daya yang beragam: Setiap stakeholder membawa sesuatu yang unik. Pemerintah membawa kekuatan regulasi dan sumber daya publik, sektor swasta membawa inovasi dan investasi, sementara LSM dan akademisi memberikan pengetahuan lapangan dan riset berbasis bukti (World Bank, 2012).
- B. Keputusan yang lebih komprehensif: Dengan melibatkan berbagai pihak, keputusan yang diambil cenderung lebih lengkap karena mencakup berbagai sudut pandang yang berbeda. Ini mengurangi risiko adanya kebijakan atau program yang tidak relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan (Sulistyanto & Prasetyo, 2015).
- C. Meningkatkan akuntabilitas: Keterlibatan berbagai pihak juga memastikan adanya pengawasan lebih besar terhadap pelaksanaan program. Masyarakat dapat memantau penggunaan dana publik, sementara LSM dapat memastikan kepentingan kelompok marginal diakomodasi (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015).

Langkah-langkah Membangun Jejaring Multi-Stakeholder

1 Identifikasi Stakeholder yang Relevan

Langkah pertama dalam membangun jejaring multi-stakeholder adalah mengidentifikasi siapa saja pihak yang perlu terlibat. Tidak semua pihak perlu dilibatkan, namun harus

dipilih yang relevan dengan isu yang ingin diatasi. Contohnya, jika fokus pemberdayaan adalah di bidang pertanian, maka stakeholder yang paling relevan mungkin adalah pemerintah daerah, departemen pertanian, perusahaan agribisnis, serta kelompok tani lokal.

Cara mengidentifikasi stakeholder:

- Pemetaan stakeholder: Gunakan metode pemetaan untuk mengidentifikasi semua pihak yang terlibat atau memiliki kepentingan terhadap program. Pemetaan ini mencakup analisis kekuatan, pengaruh, dan ketertarikan mereka terhadap program.
- Prioritas stakeholder: Dari pemetaan, pilih stakeholder yang memiliki pengaruh besar dan ketertarikan tinggi terhadap program sebagai prioritas utama untuk diajak berkolaborasi.

2 Membangun Kepercayaan dan Komunikasi

Setelah stakeholder diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menjalin komunikasi yang efektif. Komunikasi yang terbuka dan jujur penting untuk membangun kepercayaan di antara para stakeholder. Hal ini bisa dimulai dengan mengadakan pertemuan bersama, seminar, atau lokakarya yang melibatkan semua pihak.

Komunikasi yang efektif harus:

- Inklusif: Pastikan semua stakeholder memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan masukan.
- Transparan: Berikan informasi yang jelas tentang tujuan, tantangan, dan perkembangan program.
- Berorientasi pada solusi: Fokus pada diskusi tentang bagaimana setiap pihak dapat berkontribusi untuk mencapai hasil yang diinginkan.

3. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab

Setelah komunikasi terjalin, langkah selanjutnya adalah membagi peran dan tanggung jawab masing-masing stakeholder. Hal ini penting agar setiap pihak memahami kontribusinya dan dapat bekerja dengan lebih efektif. Pembagian peran harus disepakati secara bersama dan dituangkan dalam bentuk dokumen kesepakatan atau nota kesepahaman.

Kunci dalam pembagian peran:

- Setiap pihak harus memahami dan menghargai peran masing-masing.
- Pemantauan dan evaluasi harus dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap pihak menjalankan tanggung jawabnya.

4 Pengembangan Rencana Kerja Bersama

Rencana kerja yang jelas dan terstruktur sangat penting untuk memastikan program dapat berjalan dengan baik. Rencana kerja harus mencakup tujuan, langkah-langkah yang akan diambil, serta indikator keberhasilan. Semua stakeholder harus dilibatkan dalam penyusunan rencana kerja ini agar mendapatkan komitmen yang kuat.

5 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai dengan rencana. Keterlibatan semua stakeholder dalam proses ini penting untuk mendapatkan masukan dan perbaikan yang konstruktif. Hasil evaluasi dapat

digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan di masa depan dan untuk memperbaiki rencana kerja.

Strategi Memelihara Hubungan Antar-Stakeholder

1 Membangun Komunikasi Berkelanjutan

Setelah jejaring terbentuk, penting untuk menjaga komunikasi yang berkelanjutan antara semua pihak. Ini dapat dilakukan melalui:

- Rapat berkala: Mengadakan pertemuan secara rutin untuk membahas perkembangan dan tantangan yang dihadapi.
- Platform komunikasi: Membangun platform online untuk berbagi informasi, dokumen, dan kemajuan program.

2 Membina Kepercayaan dan Kerjasama

Kepercayaan antar stakeholder harus terus dipelihara. Beberapa cara untuk membina kepercayaan antara lain:

- Transparansi: Selalu memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu.
- Penghargaan atas kontribusi: Menghargai kontribusi masing-masing pihak melalui penghargaan atau pengakuan.

Tantangan dan Hambatan dalam Membangun Jejaring Multi-Stakeholder

1 Kurangnya Komitmen dari Stakeholder

Salah satu tantangan utama dalam membangun jejaring multi-stakeholder adalah kurangnya komitmen dari salah satu atau beberapa pihak. Ini dapat diatasi dengan:

- Membangun rasa memiliki: Libatkan semua stakeholder dalam setiap tahap proses agar merasa memiliki program tersebut.
- Mengkomunikasikan manfaat: Jelas menunjukkan manfaat dari keterlibatan mereka dalam program.

2 Perbedaan Tujuan dan Prioritas

Setiap stakeholder mungkin memiliki tujuan dan prioritas yang berbeda. Untuk mengatasi hal ini:

- Mencari titik temu: Diskusikan secara terbuka tentang tujuan masing-masing pihak dan cari solusi untuk menemukan kesamaan.
- Negosiasi yang konstruktif: Jadikan negosiasi sebagai kesempatan untuk mencapai konsensus yang saling menguntungkan.

Contoh Kasus Sukses Jejaring Multi-Stakeholder

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas di Bali

Di Bali, program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan pemerintah lokal, LSM, dan komunitas setempat berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kolaborasi ini, pemerintah memberikan pelatihan keterampilan, LSM memberikan dukungan teknis, dan masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan (Meyer & Bakkes, 2021).

1. Pelibatan Stakeholder yang Beragam

Program ini melibatkan tiga pihak utama:

- Pemerintah Lokal: Berperan dalam memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat. Mereka menyusun program pelatihan berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal, seperti kerajinan tangan, pariwisata, dan pertanian.
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): LSM berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Mereka memberikan dukungan teknis, seperti akses informasi, sumber daya, dan keahlian dalam pelaksanaan program. LSM juga membantu dalam mendampingi masyarakat selama proses pemberdayaan.
- Komunitas Setempat: Masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Mereka dilibatkan dalam merumuskan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga program tersebut lebih relevan dan berkelanjutan.

2. Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi dalam program ini meliputi:

- Identifikasi Kebutuhan: Melalui diskusi dan pertemuan, semua pihak berkolaborasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Hal ini penting agar pelatihan yang diberikan sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapi oleh komunitas.
- Perencanaan Bersama: Setelah kebutuhan diidentifikasi, stakeholder bekerja sama untuk merencanakan program pelatihan. Ini melibatkan penyusunan materi, penjadwalan, dan pemilihan fasilitator.
- Pelaksanaan Program: Pelatihan dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak. Pemerintah menyediakan fasilitas, LSM menyediakan mentor dan fasilitator, sementara masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses belajar.

3. Dampak Positif

Hasil dari program ini sangat signifikan:

- Peningkatan Keterampilan: Masyarakat yang mengikuti pelatihan mendapatkan keterampilan baru yang meningkatkan daya saing mereka, baik dalam dunia kerja maupun dalam menjalankan usaha mandiri.
- Peningkatan Pendapatan: Dengan keterampilan yang lebih baik, masyarakat mampu mengembangkan usaha dan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Ini berdampak positif pada perekonomian lokal.
- Kemandirian dan Pemberdayaan: Masyarakat menjadi lebih mandiri dan percaya diri dalam mengambil keputusan. Mereka merasa memiliki program dan berkontribusi dalam pengembangannya, yang menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas.

4. Pembelajaran dari Kasus Ini

Kasus di Bali menunjukkan bahwa kolaborasi antar stakeholder dapat menciptakan dampak yang lebih besar dibandingkan dengan pendekatan yang terpisah. Beberapa pelajaran yang bisa diambil antara lain:

- Keterlibatan Aktif Masyarakat: Penting untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap program agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan program.
- Sinergi Antar Pihak: Koordinasi yang baik antara pemerintah, LSM, dan masyarakat dapat memperkuat program dan memaksimalkan sumber daya yang ada.
- Fleksibilitas dan Responsif: Program harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan yang berubah seiring waktu. Umpan balik dari masyarakat harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas program.

Dengan pendekatan ini, program pemberdayaan masyarakat di Bali berhasil menciptakan perubahan yang signifikan dan berkelanjutan. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya jejaring multi-stakeholder dalam pembangunan masyarakat.

Evaluasi / Latihan Soal

1. Identifikasi Multi-stakeholder yang berperan dalam program pemberdayaan yang sudah mahasiswa buat dan diskusikan peran masing-masing beserta dampaknya.
2. Analisa peran tersebut apakah sudah berjalan dengan baik atau belum dan berikan rekomendasi terhadap stakeholder tersebut

BAB 11. Implementasi Pemberdayaan Masyarakat

Bab 11 ini merupakan

Materi pada Bab 11 ini memiliki muatan sebagai berikut:

- **Capaian belajar untuk sikap dan perilaku (*Learning Outcome for Attitudes and Values*):**

Sikap:

- A. OC 5: Mampu berkomunikasi dan bernegosiasi secara efektif dengan pemangku kepentingan dalam pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mewujudkan agribisnis yang berkelanjutan dan efisien dalam mencapai keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.
- B. OC 6: Mampu menggunakan metode dan merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat dalam menghadapi tantangan program pembangunan agribisnis.
- C. OC 7: Mampu mengkomunikasikan pendekatan dan tahapan pemberdayaan masyarakat untuk keberhasilan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Monitoring Dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat

Pembahasan pada bagian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam menganalisis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Kemampuan untuk menganalisis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat didasari pada pemahaman terhadap konsep teoritis monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat. Memahami keserbacakupan konsep monitoring dan evaluasi akan memandu langkah strategis yang akan dilakukan dalam menetapkan bentuk dan indikator yang seharusnya diukur ketika berlangsungnya kegiatan monitoring dan evaluasi sebuah program pemberdayaan masyarakat.

Manfaat Pengukuran Kinerja

Secara umum monitoring dan evaluasi sebuah program penting untuk dilakukan karena keduanya memiliki peran krusial guna memastikan tujuan program tercapai dengan efektif dan efisien. Hal ini memungkinkan bagi tim pelaksana untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan dan memastikan penggunaan sumber daya berjalan sesuai rencana yang dapat jadi bersifat mendesak. Penilaian hasil atau dampak program yang komprehensif setelah jangka waktu atau periode tertentu dan atau setelah program selesai. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi, program dapat terus ditingkatkan, dan pembelajaran dari program yang telah dijalankan dapat digunakan untuk perbaikan di masa mendatang sebagai sebuah siklus yang harus berkelanjutan.

Manfaat adalah segala bentuk keuntungan, dampak positif, atau nilai tambah yang dihasilkan dari suatu tindakan, kegiatan, atau program. Dalam konteks tertentu, manfaat bisa merujuk pada efek baik yang dirasakan oleh individu atau kelompok setelah melakukan aktivitas tertentu atau mengikuti suatu program. Dengan demikian,

manfaat sering kali menjadi alasan utama atau tujuan dari pelaksanaan suatu kegiatan atau pengambilan keputusan, karena memberikan nilai yang berkontribusi positif bagi penerima atau pelaksana. Manfaat pengukuran kinerja dalam bentuk monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat bagi para stakeholder terdiri dari beberapa aspek yaitu:

1. Monitoring dan evaluasi program pemberdayaan membantu memastikan bahwa sumber daya diarahkan dengan baik, program menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan memberikan dampak positif yang signifikan pada komunitas yang dilayani
2. Monitoring dan evaluasi program adalah komponen yang saling melengkapi dalam upaya untuk memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat mencapai tujuannya, efektif, dan relevan dalam menjawab kebutuhan komunitas.
3. Monitoring dan evaluasi program juga berfungsi untuk membangun akuntabilitas yang membantu dalam memberikan bukti konkret tentang penggunaan sumber daya, hasil yang dicapai, dan dampak yang dihasilkan oleh program pemberdayaan

Tahapan Dalam Monitoring dan Evaluasi

Serangkaian langkah atau tindakan yang berproses tersusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat spesifik yang perlu dicapai sebelum berlanjut ke tahap berikutnya akan membantu dalam pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan. Tahapan memberikan panduan bagi pelaksana untuk meminimalisasi kesalahan dan memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan rencana. Demikian halnya monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat juga melibatkan sejumlah tahap penting untuk mengukur efektivitas dan dampak program terdiri dari:

- 1) Tahap perencanaan evaluasi harus menetapkan tujuan evaluasi dengan jelas.
- 2) Metode evaluasi yang sesuai dipilih, dan perencanaan pengumpulan data dilakukan, termasuk merancang instrumen, menentukan sampel, dan merancang rencana lapangan.
- 3) Pengumpulan data, dimana data relevan dikumpulkan dengan menggunakan metode yang telah dipilih. Ini mungkin melibatkan survei, wawancara, pengamatan, atau analisis dokumen, tergantung pada kebutuhan dan sifat program.
- 4) Setelah data terkumpul, tahap analisis data dilakukan. Data dievaluasi untuk memahami hasil program dan sejauh mana program mencapai tujuannya. Analisis data ini mencakup pengolahan statistik, perbandingan data, dan pemahaman terhadap temuan yang dihasilkan.
- 5) Hasil dari evaluasi ini kemudian disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait. Temuan evaluasi digunakan untuk membuat rekomendasi perbaikan dan memahami dampak program pada masyarakat yang dilayani.

Pengumpulan Data dan Informasi

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan dan hasil yang diharapkan tercapai sesuai rencana. Data dan informasi membantu mengidentifikasi efektivitas program dengan

mengukur dampak nyata yang diterima oleh penerima manfaat, memungkinkan pengelola program untuk mengevaluasi pendekatan yang digunakan sudah berhasil atau sebaliknya masih memerlukan penyesuaian. Data dan informasi yang terkumpul memberikan bukti konkret mengenai alokasi dan pemanfaatan sumber daya, tenaga, biaya, maupun waktu, sehingga efisiensi dapat dianalisis dan ditingkatkan jika diperlukan. Melalui data dan informasi pulalah kemudian hambatan atau tantangan yang dihadapi di lapangan dapat terdeteksi lebih awal, yang memungkinkan untuk melakukan penyusunan strategi perbaikan yang tepat sasaran. Pengumpulan data dan informasi menjadi bagian dalam proses dokumentasi dan transparansi bagi para pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, dan donatur yang perlu mengetahui secara objektif pencapaian kegiatan yang dilaksanakan. Secara keseluruhan, data dan informasi yang lengkap dan akurat merupakan fondasi penting dalam melakukan penilaian dan pengembangan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Terdapat beberapa teknik yang perlu atau dapat dipakai guna memperoleh data informasi sebagai bahan monitoring dan evaluasi yang diantaranya:

A. Survei dan Wawancara

Survei dilakukan untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar responden secara cepat yang membantu dalam mengukur pengetahuan, sikap, perilaku, dan persepsi masyarakat terhadap program pemberdayaan. Wawancara dilakukan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang dampak program serta mendapatkan cerita dan pengalaman langsung dari peserta program dan pemangku kepentingan lainnya.

B. Pengamatan dan Analisis Dokumen

Pengamatan dilakukan secara langsung terhadap kegiatan yang terkait dengan program pemberdayaan dapat memberikan data yang objektif yang digunakan untuk mengukur partisipasi, pelaksanaan program, dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Analisis Dokumen dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait program yang diperoleh dari beberapa sumber seperti laporan program, data statistik, catatan pertemuan, dan materi pelatihan sehingga analisis dokumen membantu dalam memahami perkembangan program dari perspektif waktu.

C. FGD dan Indikator Kuantitatif

Diskusi Fokus Grup (Focus Group Discussions) melibatkan kelompok kecil peserta program atau pemangku kepentingan dalam percakapan terstruktur, yang membantu dalam mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang persepsi dan pengalaman mereka terkait program. Pengukuran Indikator Kuantitatif dilakukan dalam bentuk pengumpulan data yang bersifat kuantitatif melalui pengukuran indikator yang telah ditetapkan sebelumnya mencakup hasil berupa data statistik, angka partisipasi, atau angka yang terkait dengan tujuan program dapat mendeskripsikan dinamika pelaksanaan pemberdayaan.

D. Pendekatan Partisipatif dan Pengukuran Pra/Pasca

Pendekatan Partisipatif melibatkan keaktifan (proactive) dari masyarakat dalam pengumpulan data mencakup pendekatan seperti pemetaan partisipatif atau pengumpulan cerita sukses dari komunitas. Pengukuran Pra/Pasca dilakukan dengan

membandingkan data sebelum program dimulai (pra) dengan data setelah program berjalan (pasca) untuk menilai dampak program.

Pendekatan Aspek Teknis Dalam Pengukuran

"Aspek" adalah bagian atau sudut pandang tertentu yang menjadi perhatian dalam analisis atau evaluasi suatu hal. Dalam konteks evaluasi atau penilaian, aspek merujuk pada elemen-elemen atau faktor-faktor spesifik yang diperhatikan dan dinilai. Data dan informasi yang valid menjadi landasan untuk pengambilan keputusan berbasis bukti, membantu mengurangi risiko kesalahan dalam menentukan langkah lanjutan dan strategi perbaikan. Dengan demikian, akurasi data dan informasi tidak hanya meningkatkan kredibilitas proses evaluasi, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan pengembangan program di masa depan. Guna kepentingan tersebut beberapa hal yang menjadi aspek untuk diperhatikan meliputi:

1. Pengukuran Berulang dan Kombinasi Kualitatif dan Kuantitatif

Pengukuran Berulang: Mengumpulkan data secara berkala atau berulang memungkinkan pemantauan jangka panjang terhadap dampak program. Ini dapat dilakukan melalui survei tahunan, pemantauan rutin, atau penilaian berkala untuk mengukur perubahan seiring waktu. **Kombinasi Metode Kualitatif dan Kuantitatif:** Menggabungkan pendekatan kualitatif (seperti wawancara mendalam) dengan metode kuantitatif (seperti survei) dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual tentang dampak program.

2. Kontribusi vs Atribusi dan Data Online

Pengukuran Kontribusi vs. Atribusi: Dalam pengukuran keberhasilan, penting untuk memahami perbedaan antara kontribusi program (program berkontribusi pada dampak) dan atribusi program (dampak disebabkan oleh program). Metode seperti analisis kontribusi dan desain eksperimen dapat membantu memahami hubungan sebab-akibat dengan lebih baik. **Pengumpulan Data Online:** Dalam era digital, pengumpulan data online melalui survei daring atau platform berbasis web dapat menjadi pilihan yang efisien dan dapat diakses oleh banyak responden.

3. Partisipatif dan Data Geografis

Pengukuran Partisipatif Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hasil dapat memperkuat pemahaman tentang keberhasilan program serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi program. **Data Geografis:** Memanfaatkan data geografis dan pemetaan geospasial untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam dampak program pada tingkat lokasi atau wilayah tertentu.

4. Kualitatif Vertikal dan Observasi Partisipatif

Metode Pendekatan Kualitatif yang Vertikal: Pendekatan vertikal melibatkan pengumpulan data dalam satu komunitas atau kelompok yang sama pada tingkat yang berbeda (misalnya, individu, keluarga, dan komunitas). Ini membantu memahami bagaimana dampak program dapat berbeda pada tingkat individu dan kolektif. **Metode Observasi Partisipatif:** Melibatkan komunitas dalam pengamatan dan pemantauan program mereka sendiri. Ini memungkinkan masyarakat untuk memiliki kontrol lebih besar atas data yang dihasilkan dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses evaluasi.

5. Kaidah Umum Pengukuran

Pemilihan metode yang paling sesuai harus didasarkan pada pertimbangan yang cermat terhadap sifat program, tujuan evaluasi, populasi yang dilayani, dan sumber daya yang tersedia. Kombinasi metode yang tepat seringkali akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

Ukuran Menurut Peningkatan

Dalam konteks ini, indikator tidak hanya berfokus pada pencapaian target, tetapi lebih pada sejauh mana program berhasil meningkatkan kondisi atau kualitas hidup masyarakat sasaran. Penggunaan ukuran indikator menurut peningkatan memungkinkan evaluasi yang lebih holistik, dimana tidak hanya output yang diukur, tetapi juga outcome atau dampak jangka panjang yang dihasilkan oleh program. Indikator ini dapat bersifat kuantitatif atau sebaiknya dalam bentuk persentase peningkatan indikator tertentu dalam rutinitas kehidupan sehari-hari yang dapat diwakilkan dari indikator sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Pengetahuan: Indikator ini mencakup peningkatan pengetahuan masyarakat dalam berbagai bidang yang relevan, seperti pendidikan, kesehatan, atau keuangan. Contohnya, tingkat literasi membaca dan menulis yang lebih tinggi.
- 2) Peningkatan Keterampilan: Indikator ini mengukur peningkatan keterampilan yang relevan dengan tujuan program, seperti keterampilan kerja atau keterampilan kepemimpinan.
- 3) Peningkatan Akses: Indikator ini mengukur peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya dan layanan yang penting. Misalnya, peningkatan akses ke layanan kesehatan atau air bersih.
- 4) Peningkatan Kualitas Hidup: Indikator ini mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti peningkatan pendapatan, kualitas perumahan, atau kesejahteraan secara umum.
- 5) Peningkatan Keberlanjutan: Indikator ini mencakup upaya untuk menjaga dampak positif program dalam jangka panjang. Ini bisa berarti keberlanjutan proyek atau perubahan yang telah dicapai dalam perilaku masyarakat.
- 6) Peningkatan Partisipasi Perempuan: Indikator ini fokus pada peningkatan partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan, termasuk dalam pengambilan keputusan komunitas.
- 7) Peningkatan Kepemimpinan Masyarakat: Indikator ini mengukur peningkatan kemampuan kepemimpinan di dalam masyarakat dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Ukuran Menurut Perubahan

Suatu ukuran menurut perubahannya merupakan metode atau pendekatan untuk menilai keberhasilan suatu program atau intervensi berdasarkan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Dalam konteks ini, ukuran bukan hanya melihat angka-angka atau target yang tercapai, tetapi lebih kepada mengidentifikasi transformasi atau dampak yang dihasilkan terhadap objek atau kelompok sasaran dari program tersebut. Misalnya, dalam sebuah program pemberdayaan ekonomi, ukuran menurut perubahan tidak hanya mengukur jumlah penerima manfaat yang meningkat penghasilannya,

tetapi juga bagaimana perubahan tersebut memengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, atau kestabilan ekonomi keluarga.

Pendekatan ini biasanya menggunakan indikator-indikator kualitatif dan kuantitatif yang relevan dengan tujuan program dan kondisi awal (baseline) yang dimiliki oleh kelompok sasaran. Selain itu, ukuran menurut perubahan sering kali melibatkan proses evaluasi secara bertahap (misalnya per kuartal atau per tahun) untuk memahami bagaimana perubahan terjadi secara progresif dan berkesinambungan. Pendekatan ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak program, karena terkadang perubahan yang paling bernilai tidak selalu terlihat melalui data angka yang kaku, tetapi melalui transformasi nyata dalam kehidupan atau kondisi sosial penerima manfaat.

Ukuran menurut perubahan juga mendorong adanya penyesuaian atau adaptasi pada program saat perubahan di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi awal, karena indikator perubahan memungkinkan pengelola program untuk melakukan pemantauan secara dinamis. Hal ini memperkuat efektivitas program karena memberikan fleksibilitas dan responsivitas terhadap kondisi lapangan yang mungkin berubah. Dengan menggunakan ukuran menurut perubahan, program-program dapat lebih berfokus pada manfaat jangka panjang dan hasil yang berkelanjutan, daripada sekadar memenuhi target statistik dalam jangka pendek. Secara garis besar ukuran yang digunakan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan meliputi:

- 1) Dampak Ekonomi: Indikator ini mencakup peningkatan pendapatan atau keberhasilan dalam menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat.
- 2) Kesejahteraan Anak-anak: Indikator ini mencakup peningkatan kesejahteraan dan hak-hak anak-anak dalam komunitas yang dilayani.
- 3) Partisipasi Masyarakat: Indikator ini mencerminkan sejauh mana masyarakat aktif terlibat dalam program dan pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka. Misalnya, jumlah warga yang berpartisipasi dalam pertemuan komunitas.
- 4) Perubahan Perilaku: Indikator ini mencerminkan perubahan perilaku positif dalam masyarakat, seperti perubahan dalam pola makan, praktik kesehatan, atau perilaku lingkungan yang lebih berkelanjutan.
- 5) Pengurangan Ketidaksetaraan: Indikator ini menilai sejauh mana program mampu mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Kaidah Penentuan Indikator

Ketentuan dalam menentukan indikator pengukuran untuk monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat mencakup berbagai prinsip agar indikator yang dipilih benar-benar mencerminkan tujuan program dan dampak yang diinginkan. Pertama, indikator harus relevan dan spesifik terhadap tujuan utama program, yang berarti indikator harus langsung berhubungan dengan hasil yang ingin dicapai, seperti peningkatan pendapatan, akses pendidikan, atau perbaikan kesehatan. Indikator yang dipilih harus mampu menggambarkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat sasaran, sehingga relevan dalam mengevaluasi keberhasilan atau tantangan program tersebut. Selain itu, indikator harus terukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif, memungkinkan pengukuran yang objektif dan konsisten dari waktu ke waktu. Misalnya,

indikator kuantitatif bisa berupa persentase peningkatan penghasilan, sedangkan indikator kualitatif bisa berupa peningkatan kualitas hidup yang dapat diukur melalui survei atau wawancara.

Indikator juga harus realistis dan dapat dicapai dalam kerangka waktu dan sumber daya yang dimiliki program. Jika terlalu kompleks atau sulit dicapai, indikator dapat mengaburkan tujuan dan membuat evaluasi menjadi tidak efektif. Penentuan indikator perlu mempertimbangkan kondisi awal (baseline) masyarakat sasaran, sehingga perubahan yang diukur benar-benar mencerminkan dampak program. Indikator yang baik juga harus sensitif terhadap perubahan, artinya mampu menangkap transformasi, baik besar maupun kecil, yang terjadi akibat program. Selain itu, indikator perlu konsisten dengan metode pengumpulan data yang ada agar hasilnya valid dan dapat diandalkan. Ketika suatu program memiliki indikator yang konsisten, hasil pengukuran dari berbagai periode monitoring akan mudah dibandingkan, sehingga evaluasi dapat menunjukkan tren atau pola perubahan yang terjadi.

Dalam menentukan indikator pengukuran, sangat penting untuk melibatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sasaran itu sendiri. Dengan begitu, indikator yang dipilih mencerminkan kebutuhan dan persepsi masyarakat terhadap kesuksesan program, sehingga hasil evaluasi tidak hanya bermanfaat bagi pengelola program tetapi juga relevan dan bermakna bagi penerima manfaat. Melalui ketentuan ini, indikator yang dipilih dapat memberikan gambaran yang utuh dan akurat mengenai dampak serta efektivitas program pemberdayaan masyarakat. Tetapi secara sederhana ketentuan dalam menentukan indikator penting pada proses monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat meliputi:

1. Pemilihan indikator yang tepat harus didasarkan pada tujuan program, tantangan yang dihadapi oleh komunitas yang dilayani, dan sumber daya yang tersedia untuk pengukuran.
2. Kombinasi beberapa indikator dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.
3. Selain itu indikator-indikator ini harus dapat diukur secara terukur, dapat dilacak seiring waktu, dan relevan dengan tujuan jangka panjang program.

Indikasi Keberhasilan Penentuan Indikator Untuk Monitoring dan Evaluasi

Dengan menentukan indikator yang jelas program pemberdayaan dapat dilihat bukan hanya dari sudut pandang pencapaian target, tetapi juga melalui perubahan nyata yang dihasilkan dalam kehidupan masyarakat sasaran. Melalui proses penentuan indikator monitoring dan evaluasi yang berhasil akan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan untuk melanjutkan, memperluas, atau bahkan mengubah pendekatan program agar lebih efektif. Indikator monitoring dan evaluasi yang dapat secara jelas mengukur program dapat meningkatkan dukungan, kepercayaan, dan partisipasi dari berbagai pihak, yang penting untuk kesinambungan jangka panjang dan membangun pembelajaran organisasi. Maka dalam melakukan pengukuran untuk keperluan monitoring dan evaluasi paling tidak harus mencakup beberapa hal berikut:

1. Relevansi: Evaluasi dianggap berhasil jika pertanyaan evaluasi dan metodologi yang digunakan relevan dengan tujuan program dan kebutuhan pemangku kepentingan.

2. Akurasi Data: Keakuratan data yang dikumpulkan dalam evaluasi adalah indikator penting. Data yang tidak akurat dapat mengarah pada temuan yang salah dan keputusan yang tidak tepat.
3. Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Keberhasilan evaluasi juga dapat diukur melalui tingkat keterlibatan pemangku kepentingan yang sesuai dalam proses evaluasi, termasuk masyarakat yang dilayani.
4. Penggunaan Temuan Evaluasi: Evaluasi dianggap berhasil jika temuannya digunakan secara aktif untuk pengambilan keputusan, perbaikan program, atau perubahan kebijakan yang relevan.
5. Ketepatan Waktu: Evaluasi yang tepat waktu adalah indikator keberhasilan. Hasil evaluasi yang tersedia saat dibutuhkan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat.
6. Transparansi dan Akuntabilitas: Keberhasilan evaluasi juga terkait dengan tingkat transparansi dalam proses evaluasi dan akuntabilitas terhadap temuan dan rekomendasi yang dihasilkan.
7. Kecukupan Sumber Daya: Evaluasi dianggap berhasil jika memiliki cukup sumber daya, termasuk waktu, anggaran, dan personil untuk melakukan evaluasi secara efektif.
8. Perubahan Positif: Akhirnya, evaluasi dianggap berhasil jika mampu mengidentifikasi perubahan positif dalam program, baik dalam hal dampak pada masyarakat maupun perbaikan internal program itu sendiri.

Penerapan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Data dan informasi dari hasil monitoring dan evaluasi sebelumnya berfungsi sebagai pedoman untuk menerapkan kegiatan secara lebih tepat sasaran. Proses ini menciptakan siklus berkelanjutan yang memperkuat efektivitas program pemberdayaan, memastikan bahwa setiap siklus monitoring dan evaluasi menghasilkan pengetahuan yang berharga untuk peningkatan kinerja di masa depan. Pada umumnya hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat secara operasional berguna dalam:

1. Siklus Perbaikan: Perbaikan berkelanjutan mengikuti siklus tertentu, yang sering disebut sebagai "siklus PDCA" (Plan-Do-Check-Act). Ini melibatkan perencanaan (Plan) tindakan perbaikan, pelaksanaan (Do) perubahan yang direncanakan, pengecekan (Check) hasil perubahan tersebut melalui evaluasi, dan tindakan (Act) berdasarkan temuan evaluasi dilakukan berulang secara terus-menerus.
2. Evaluasi sebagai Pemicu Perbaikan: Evaluasi program adalah titik awal untuk perbaikan berkelanjutan. Hasil evaluasi mengidentifikasi kelemahan, keberhasilan, dan peluang perbaikan dalam program. Dengan demikian, evaluasi memberikan landasan untuk perbaikan berkelanjutan.
3. Adaptasi terhadap Perubahan: Program pemberdayaan masyarakat harus mampu beradaptasi dengan perubahan di lingkungan eksternal dan kebutuhan masyarakat. Perbaikan berkelanjutan memungkinkan program untuk tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan tersebut.
4. Pengembangan Keterampilan dan Kapasitas: Perbaikan berkelanjutan juga melibatkan pengembangan keterampilan dan kapasitas staf program dan

pemangku kepentingan. Ini memungkinkan mereka untuk memahami temuan evaluasi dan mengimplementasikan perbaikan dengan lebih efektif

BAB 12. Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat

Materi pada Bab 12 ini memiliki muatan sebagai berikut:

- **Capaian belajar untuk sikap dan perilaku (*Learning Outcome for Attitudes and Values*):**

Keterampilan Umum:

- A. OC 4: Mampu mengaplikasikan dan memanfaatkan IPTEKS dalam penyelesaian masalah pada bidang agribisnis yang adaptif terhadap perubahan lingkungan dengan mengaplikasikan model pemberdayaan masyarakat.
- B. OC 5: Mampu berkomunikasi dan bernegosiasi secara efektif dengan pemangku kepentingan dalam pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mewujudkan agribisnis yang berkelanjutan dan efisien dalam mencapai keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

Keterampilan Khusus

- C. OC 6: Mampu menggunakan metode dan merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat dalam menghadapi tantangan program pembangunan agribisnis.

Manfaat Pengukuran Kinerja

Kemampuan untuk menganalisis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat didasari pada pemahaman terhadap konsep teoritis monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat. Memahami keserbacakupan konsep monitoring dan evaluasi akan memandu langkah strategis yang akan dilakukan dalam menetapkan bentuk dan indikator yang seharusnya diukur ketika berlangsungnya kegiatan monitoring dan evaluasi sebuah program pemberdayaan masyarakat.

Secara umum monitoring dan evaluasi sebuah program penting untuk dilakukan karena keduanya memiliki peran krusial guna memastikan tujuan program tercapai dengan efektif dan efisien. Hal ini memungkinkan bagi tim pelaksana untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan dan memastikan penggunaan sumber daya berjalan sesuai rencana yang dapat jadi bersifat mendesak. Penilaian hasil atau dampak program yang komprehensif setelah jangka waktu atau periode tertentu dan atau setelah program selesai. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi, program dapat terus ditingkatkan, dan pembelajaran dari program yang telah dijalankan dapat digunakan untuk perbaikan di masa mendatang sebagai sebuah siklus yang harus berkelanjutan.

Manfaat adalah segala bentuk keuntungan, dampak positif, atau nilai tambah yang dihasilkan dari suatu tindakan, kegiatan, atau program. Dalam konteks tertentu, manfaat bisa merujuk pada efek baik yang dirasakan oleh individu atau kelompok setelah melakukan aktivitas tertentu atau mengikuti suatu program. Dengan demikian, manfaat

sering kali menjadi alasan utama atau tujuan dari pelaksanaan suatu kegiatan atau pengambilan keputusan, karena memberikan nilai yang berkontribusi positif bagi penerima atau pelaksana. Manfaat pengukuran kinerja dalam bentuk monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat bagi para stakeholder terdiri dari beberapa aspek yaitu:

4. Monitoring dan evaluasi program pemberdayaan membantu memastikan bahwa sumber daya diarahkan dengan baik, program menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan memberikan dampak positif yang signifikan pada komunitas yang dilayani
5. Monitoring dan evaluasi program adalah komponen yang saling melengkapi dalam upaya untuk memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat mencapai tujuannya, efektif, dan relevan dalam menjawab kebutuhan komunitas.
6. Monitoring dan evaluasi program juga berfungsi untuk membangun akuntabilitas yang membantu dalam memberikan bukti konkret tentang penggunaan sumber daya, hasil yang dicapai, dan dampak yang dihasilkan oleh program pemberdayaan

Tahapan Dalam Monitoring dan Evaluasi

Serangkaian langkah atau tindakan yang berproses tersusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat spesifik yang perlu dicapai sebelum berlanjut ke tahap berikutnya akan membantu dalam pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan. Tahapan memberikan panduan bagi pelaksana untuk meminimalisasi kesalahan dan memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan rencana. Demikian halnya monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat juga melibatkan sejumlah tahap penting untuk mengukur efektivitas dan dampak program terdiri dari:

- 1) Tahap perencanaan evaluasi harus menetapkan tujuan evaluasi dengan jelas.
- 2) Metode evaluasi yang sesuai dipilih, dan perencanaan pengumpulan data dilakukan, termasuk merancang instrumen, menentukan sampel, dan merancang rencana lapangan.
- 3) Pengumpulan data, dimana data relevan dikumpulkan dengan menggunakan metode yang telah dipilih. Ini mungkin melibatkan survei, wawancara, pengamatan, atau analisis dokumen, tergantung pada kebutuhan dan sifat program.
- 4) Setelah data terkumpul, tahap analisis data dilakukan. Data dievaluasi untuk memahami hasil program dan sejauh mana program mencapai tujuannya. Analisis data ini mencakup pengolahan statistik, perbandingan data, dan pemahaman terhadap temuan yang dihasilkan.
- 5) Hasil dari evaluasi ini kemudian disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait. Temuan evaluasi digunakan untuk membuat rekomendasi perbaikan dan memahami dampak program pada masyarakat yang dilayani.

Pengumpulan Data dan Informasi

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan dan hasil yang diharapkan tercapai sesuai rencana. Data

dan informasi membantu mengidentifikasi efektivitas program dengan mengukur dampak nyata yang diterima oleh penerima manfaat, memungkinkan pengelola program untuk mengevaluasi pendekatan yang digunakan sudah berhasil atau sebaliknya masih memerlukan penyesuaian. Data dan informasi yang terkumpul memberikan bukti konkret mengenai alokasi dan pemanfaatan sumber daya, tenaga, biaya, maupun waktu, sehingga efisiensi dapat dianalisis dan ditingkatkan jika diperlukan. Melalui data dan informasi pulalah kemudian hambatan atau tantangan yang dihadapi di lapangan dapat terdeteksi lebih awal, yang memungkinkan untuk melakukan penyusunan strategi perbaikan yang tepat sasaran. Pengumpulan data dan informasi menjadi bagian dalam proses dokumentasi dan transparansi bagi para pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, dan donatur yang perlu mengetahui secara objektif pencapaian kegiatan yang dilaksanakan. Secara keseluruhan, data dan informasi yang lengkap dan akurat merupakan fondasi penting dalam melakukan penilaian dan pengembangan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Terdapat beberapa teknik yang perlu atau dapat dipakai guna memperoleh data informasi sebagai bahan monitoring dan evaluasi yang diantaranya:

A. Survei dan Wawancara

Survei dilakukan untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar responden secara cepat yang membantu dalam mengukur pengetahuan, sikap, perilaku, dan persepsi masyarakat terhadap program pemberdayaan. Wawancara dilakukan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang dampak program serta mendapatkan cerita dan pengalaman langsung dari peserta program dan pemangku kepentingan lainnya.

B. Pengamatan dan Analisis Dokumen

Pengamatan dilakukan secara langsung terhadap kegiatan yang terkait dengan program pemberdayaan dapat memberikan data yang objektif yang digunakan untuk mengukur partisipasi, pelaksanaan program, dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Analisis Dokumen dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait program yang diperoleh dari beberapa sumber seperti laporan program, data statistik, catatan pertemuan, dan materi pelatihan sehingga analisis dokumen membantu dalam memahami perkembangan program dari perspektif waktu.

C. FGD dan Indikator Kuantitatif

Diskusi Fokus Grup (Focus Group Discussions) melibatkan kelompok kecil peserta program atau pemangku kepentingan dalam percakapan terstruktur, yang membantu dalam mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang persepsi dan pengalaman mereka terkait program. Pengukuran Indikator Kuantitatif dilakukan dalam bentuk pengumpulan data yang bersifat kuantitatif melalui pengukuran indikator yang telah ditetapkan sebelumnya mencakup hasil berupa data statistik, angka partisipasi, atau angka yang terkait dengan tujuan program dapat mendeskripsikan dinamika pelaksanaan pemberdayaan.

D. Pendekatan Partisipatif dan Pengukuran Pra/Pasca

Pendekatan Partisipatif melibatkan keaktifan (proactive) dari masyarakat dalam pengumpulan data mencakup pendekatan seperti pemetaan partisipatif atau

pengumpulan cerita sukses dari komunitas. Pengukuran Pra/Pasca dilakukan dengan membandingkan data sebelum program dimulai (pra) dengan data setelah program berjalan (pasca) untuk menilai dampak program.

Pendekatan Aspek Teknis Dalam Pengukuran

"Aspek" adalah bagian atau sudut pandang tertentu yang menjadi perhatian dalam analisis atau evaluasi suatu hal. Dalam konteks evaluasi atau penilaian, aspek merujuk pada elemen-elemen atau faktor-faktor spesifik yang diperhatikan dan dinilai. Data dan informasi yang valid menjadi landasan untuk pengambilan keputusan berbasis bukti, membantu mengurangi risiko kesalahan dalam menentukan langkah lanjutan dan strategi perbaikan. Dengan demikian, akurasi data dan informasi tidak hanya meningkatkan kredibilitas proses evaluasi, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan pengembangan program di masa depan. Guna kepentingan tersebut beberapa hal yang menjadi aspek untuk diperhatikan meliputi:

1. Pengukuran Berulang dan Kombinasi Kualitatif dan Kuantitatif

Pengukuran Berulang: Mengumpulkan data secara berkala atau berulang memungkinkan pemantauan jangka panjang terhadap dampak program. Ini dapat dilakukan melalui survei tahunan, pemantauan rutin, atau penilaian berkala untuk mengukur perubahan seiring waktu. **Kombinasi Metode Kualitatif dan Kuantitatif:** Menggabungkan pendekatan kualitatif (seperti wawancara mendalam) dengan metode kuantitatif (seperti survei) dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual tentang dampak program.

2. Kontribusi vs Atribusi dan Data Online

Pengukuran Kontribusi vs. Atribusi: Dalam pengukuran keberhasilan, penting untuk memahami perbedaan antara kontribusi program (program berkontribusi pada dampak) dan atribusi program (dampak disebabkan oleh program). Metode seperti analisis kontribusi dan desain eksperimen dapat membantu memahami hubungan sebab-akibat dengan lebih baik. **Pengumpulan Data Online:** Dalam era digital, pengumpulan data online melalui survei daring atau platform berbasis web dapat menjadi pilihan yang efisien dan dapat diakses oleh banyak responden.

3. Partisipatif dan Data Geografis

Pengukuran Partisipatif Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hasil dapat memperkuat pemahaman tentang keberhasilan program serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi program. **Data Geografis:** Memanfaatkan data geografis dan pemetaan geospasial untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam dampak program pada tingkat lokasi atau wilayah tertentu.

4. Kualitatif Vertikal dan Observasi Partisipatif

Metode Pendekatan Kualitatif yang Vertikal: Pendekatan vertikal melibatkan pengumpulan data dalam satu komunitas atau kelompok yang sama pada tingkat yang berbeda (misalnya, individu, keluarga, dan komunitas). Ini membantu memahami bagaimana dampak program dapat berbeda pada tingkat individu dan kolektif. Metode

Observasi Partisipatif: Melibatkan komunitas dalam pengamatan dan pemantauan program mereka sendiri. Ini memungkinkan masyarakat untuk memiliki kontrol lebih besar atas data yang dihasilkan dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses evaluasi.

5. Kaidah Umum Pengukuran

Pemilihan metode yang paling sesuai harus didasarkan pada pertimbangan yang cermat terhadap sifat program, tujuan evaluasi, populasi yang dilayani, dan sumber daya yang tersedia. Kombinasi metode yang tepat seringkali akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

Ukuran Menurut Peningkatan

Dalam konteks ini, indikator tidak hanya berfokus pada pencapaian target, tetapi lebih pada sejauh mana program berhasil meningkatkan kondisi atau kualitas hidup masyarakat sasaran. Penggunaan ukuran indikator menurut peningkatan memungkinkan evaluasi yang lebih holistik, dimana tidak hanya output yang diukur, tetapi juga outcome atau dampak jangka panjang yang dihasilkan oleh program. Indikator ini dapat bersifat kuantitatif atau sebaiknya dalam bentuk persentase peningkatan indikator tertentu dalam rutinitas kehidupan sehari-hari yang dapat diwakilkan dari indikator sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Pengetahuan: Indikator ini mencakup peningkatan pengetahuan masyarakat dalam berbagai bidang yang relevan, seperti pendidikan, kesehatan, atau keuangan. Contohnya, tingkat literasi membaca dan menulis yang lebih tinggi.
- 2) Peningkatan Keterampilan: Indikator ini mengukur peningkatan keterampilan yang relevan dengan tujuan program, seperti keterampilan kerja atau keterampilan kepemimpinan.
- 3) Peningkatan Akses: Indikator ini mengukur peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya dan layanan yang penting. Misalnya, peningkatan akses ke layanan kesehatan atau air bersih.
- 4) Peningkatan Kualitas Hidup: Indikator ini mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti peningkatan pendapatan, kualitas perumahan, atau kesejahteraan secara umum.
- 5) Peningkatan Keberlanjutan: Indikator ini mencakup upaya untuk menjaga dampak positif program dalam jangka panjang. Ini bisa berarti keberlanjutan proyek atau perubahan yang telah dicapai dalam perilaku masyarakat.
- 6) Peningkatan Partisipasi Perempuan: Indikator ini fokus pada peningkatan partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan, termasuk dalam pengambilan keputusan komunitas.
- 7) Peningkatan Kepemimpinan Masyarakat: Indikator ini mengukur peningkatan kemampuan kepemimpinan di dalam masyarakat dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Ukuran Menurut Perubahan

Suatu ukuran menurut perubahannya merupakan metode atau pendekatan untuk menilai keberhasilan suatu program atau intervensi berdasarkan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Dalam konteks ini, ukuran bukan hanya melihat angka-angka atau target yang tercapai, tetapi lebih kepada mengidentifikasi transformasi atau dampak yang dihasilkan terhadap objek atau kelompok sasaran dari program tersebut. Misalnya, dalam sebuah program pemberdayaan ekonomi, ukuran menurut perubahan tidak hanya mengukur jumlah penerima manfaat yang meningkat penghasilannya, tetapi juga bagaimana perubahan tersebut memengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, atau kestabilan ekonomi keluarga.

Pendekatan ini biasanya menggunakan indikator-indikator kualitatif dan kuantitatif yang relevan dengan tujuan program dan kondisi awal (baseline) yang dimiliki oleh kelompok sasaran. Selain itu, ukuran menurut perubahan sering kali melibatkan proses evaluasi secara bertahap (misalnya per kuartal atau per tahun) untuk memahami bagaimana perubahan terjadi secara progresif dan berkesinambungan. Pendekatan ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak program, karena terkadang perubahan yang paling bernilai tidak selalu terlihat melalui data angka yang kaku, tetapi melalui transformasi nyata dalam kehidupan atau kondisi sosial penerima manfaat.

Ukuran menurut perubahan juga mendorong adanya penyesuaian atau adaptasi pada program saat perubahan di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi awal, karena indikator perubahan memungkinkan pengelola program untuk melakukan pemantauan secara dinamis. Hal ini memperkuat efektivitas program karena memberikan fleksibilitas dan responsivitas terhadap kondisi lapangan yang mungkin berubah. Dengan menggunakan ukuran menurut perubahan, program-program dapat lebih berfokus pada manfaat jangka panjang dan hasil yang berkelanjutan, daripada sekadar memenuhi target statistik dalam jangka pendek. Secara garis besar ukuran yang digunakan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan meliputi:

- 1) Dampak Ekonomi: Indikator ini mencakup peningkatan pendapatan atau keberhasilan dalam menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat.
- 2) Kesejahteraan Anak-anak: Indikator ini mencakup peningkatan kesejahteraan dan hak-hak anak-anak dalam komunitas yang dilayani.
- 3) Partisipasi Masyarakat: Indikator ini mencerminkan sejauh mana masyarakat aktif terlibat dalam program dan pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka. Misalnya, jumlah warga yang berpartisipasi dalam pertemuan komunitas.
- 4) Perubahan Perilaku: Indikator ini mencerminkan perubahan perilaku positif dalam masyarakat, seperti perubahan dalam pola makan, praktik kesehatan, atau perilaku lingkungan yang lebih berkelanjutan.
- 5) Pengurangan Ketidaksetaraan: Indikator ini menilai sejauh mana program mampu mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Kaidah Penentuan Indikator

Ketentuan dalam menentukan indikator pengukuran untuk monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat mencakup berbagai prinsip agar indikator yang dipilih benar-benar mencerminkan tujuan program dan dampak yang diinginkan. Pertama, indikator harus relevan dan spesifik terhadap tujuan utama program, yang berarti indikator harus langsung berhubungan dengan hasil yang ingin dicapai, seperti peningkatan pendapatan, akses pendidikan, atau perbaikan kesehatan. Indikator yang dipilih harus mampu menggambarkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat sasaran, sehingga relevan dalam mengevaluasi keberhasilan atau tantangan program tersebut. Selain itu, indikator harus terukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif, memungkinkan pengukuran yang objektif dan konsisten dari waktu ke waktu. Misalnya, indikator kuantitatif bisa berupa persentase peningkatan penghasilan, sedangkan indikator kualitatif bisa berupa peningkatan kualitas hidup yang dapat diukur melalui survei atau wawancara.

Indikator juga harus realistis dan dapat dicapai dalam kerangka waktu dan sumber daya yang dimiliki program. Jika terlalu kompleks atau sulit dicapai, indikator dapat mengaburkan tujuan dan membuat evaluasi menjadi tidak efektif. Penentuan indikator perlu mempertimbangkan kondisi awal (baseline) masyarakat sasaran, sehingga perubahan yang diukur benar-benar mencerminkan dampak program. Indikator yang baik juga harus sensitif terhadap perubahan, artinya mampu menangkap transformasi, baik besar maupun kecil, yang terjadi akibat program. Selain itu, indikator perlu konsisten dengan metode pengumpulan data yang ada agar hasilnya valid dan dapat diandalkan. Ketika suatu program memiliki indikator yang konsisten, hasil pengukuran dari berbagai periode monitoring akan mudah dibandingkan, sehingga evaluasi dapat menunjukkan tren atau pola perubahan yang terjadi.

Dalam menentukan indikator pengukuran, sangat penting untuk melibatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sasaran itu sendiri. Dengan begitu, indikator yang dipilih mencerminkan kebutuhan dan persepsi masyarakat terhadap kesuksesan program, sehingga hasil evaluasi tidak hanya bermanfaat bagi pengelola program tetapi juga relevan dan bermakna bagi penerima manfaat. Melalui ketentuan ini, indikator yang dipilih dapat memberikan gambaran yang utuh dan akurat mengenai dampak serta efektivitas program pemberdayaan masyarakat. Tetapi secara sederhana ketentuan dalam menentukan indikator penting pada proses monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat meliputi:

1. Pemilihan indikator yang tepat harus didasarkan pada tujuan program, tantangan yang dihadapi oleh komunitas yang dilayani, dan sumber daya yang tersedia untuk pengukuran.
2. Kombinasi beberapa indikator dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.
3. Selain itu indikator-indikator ini harus dapat diukur secara terukur, dapat dilacak seiring waktu, dan relevan dengan tujuan jangka panjang program.

Indikasi Keberhasilan Penentuan Indikator Untuk Monitoring dan Evaluasi

Dengan menentukan indikator yang jelas program pemberdayaan dapat dilihat bukan hanya dari sudut pandang pencapaian target, tetapi juga melalui perubahan nyata yang dihasilkan dalam kehidupan masyarakat sasaran. Melalui proses penentuan indikator monitoring dan evaluasi yang berhasil akan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan untuk melanjutkan, memperluas, atau bahkan mengubah pendekatan program agar lebih efektif. Indikator monitoring dan evaluasi yang dapat secara jelas mengukur program dapat meningkatkan dukungan, kepercayaan, dan partisipasi dari berbagai pihak, yang penting untuk kesinambungan jangka panjang dan membangun pembelajaran organisasi. Maka dalam melakukan pengukuran untuk keperluan monitoring dan evaluasi paling tidak harus mencakup beberapa hal berikut:

1. **Relevansi:** Evaluasi dianggap berhasil jika pertanyaan evaluasi dan metodologi yang digunakan relevan dengan tujuan program dan kebutuhan pemangku kepentingan.
2. **Akurasi Data:** Keakuratan data yang dikumpulkan dalam evaluasi adalah indikator penting. Data yang tidak akurat dapat mengarah pada temuan yang salah dan keputusan yang tidak tepat.
3. **Keterlibatan Pemangku Kepentingan:** Keberhasilan evaluasi juga dapat diukur melalui tingkat keterlibatan pemangku kepentingan yang sesuai dalam proses evaluasi, termasuk masyarakat yang dilayani.
4. **Penggunaan Temuan Evaluasi:** Evaluasi dianggap berhasil jika temuannya digunakan secara aktif untuk pengambilan keputusan, perbaikan program, atau perubahan kebijakan yang relevan.
5. **Ketepatan Waktu:** Evaluasi yang tepat waktu adalah indikator keberhasilan. Hasil evaluasi yang tersedia saat dibutuhkan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat.
6. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Keberhasilan evaluasi juga terkait dengan tingkat transparansi dalam proses evaluasi dan akuntabilitas terhadap temuan dan rekomendasi yang dihasilkan.
7. **Kecukupan Sumber Daya:** Evaluasi dianggap berhasil jika memiliki cukup sumber daya, termasuk waktu, anggaran, dan personil untuk melakukan evaluasi secara efektif.
8. **Perubahan Positif:** Akhirnya, evaluasi dianggap berhasil jika mampu mengidentifikasi perubahan positif dalam program, baik dalam hal dampak pada masyarakat maupun perbaikan internal program itu sendiri.

Penerapan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Data dan informasi dari hasil monitoring dan evaluasi sebelumnya berfungsi sebagai pedoman untuk menerapkan kegiatan secara lebih tepat sasaran. Proses ini menciptakan siklus berkelanjutan yang memperkuat efektivitas program pemberdayaan, memastikan bahwa setiap siklus monitoring dan evaluasi menghasilkan pengetahuan yang berharga untuk peningkatan kinerja di masa depan. Pada umumnya hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat secara operasional berguna dalam:

1. Siklus Perbaikan: Perbaikan berkelanjutan mengikuti siklus tertentu, yang sering disebut sebagai "siklus PDCA" (Plan-Do-Check-Act). Ini melibatkan perencanaan (Plan) tindakan perbaikan, pelaksanaan (Do) perubahan yang direncanakan, pengecekan (Check) hasil perubahan tersebut melalui evaluasi, dan tindakan (Act) berdasarkan temuan evaluasi dilakukan berulang secara terus-menerus.
2. Evaluasi sebagai Pemicu Perbaikan: Evaluasi program adalah titik awal untuk perbaikan berkelanjutan. Hasil evaluasi mengidentifikasi kelemahan, keberhasilan, dan peluang perbaikan dalam program. Dengan demikian, evaluasi memberikan landasan untuk perbaikan berkelanjutan.
3. Adaptasi terhadap Perubahan: Program pemberdayaan masyarakat harus mampu beradaptasi dengan perubahan di lingkungan eksternal dan kebutuhan masyarakat. Perbaikan berkelanjutan memungkinkan program untuk tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan tersebut.
4. Pengembangan Keterampilan dan Kapasitas: Perbaikan berkelanjutan juga melibatkan pengembangan keterampilan dan kapasitas staf program dan pemangku kepentingan. Ini memungkinkan mereka untuk memahami temuan evaluasi dan mengimplementasikan perbaikan dengan lebih efektif.

BAB 13. Strategi Pengakhiran (*Exit Strategy*) untuk Keberlanjutan Program

Materi pada Bab 13 ini memiliki muatan sebagai berikut:

- **Capaian belajar untuk sikap dan perilaku (*Learning Outcome for Attitudes and Values*):**

Sikap:

- A. SC 4: Mampu memahami secara operasional prinsip-prinsip sosial, ekonomi dan teknologi yang melandasi pengelolaan usaha pertanian dan industri pertanian serta aspek sosial-budaya di pedesaan untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah berbasis pemberdayaan masyarakat.

Keterampilan Khusus

- B. OC 6: Mampu menggunakan metode dan merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat dalam menghadapi tantangan program pembangunan agribisnis.
- C. OC 7: Mampu mengkomunikasikan pendekatan dan tahapan pemberdayaan masyarakat untuk keberhasilan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Strategi Pengakhiran

Strategi Pengakhiran (*Exit Strategy*) merupakan sebuah rencana yang disusun oleh organisasi atau pihak yang menjalankan suatu program untuk secara bertahap mengurangi keterlibatan, sambil memastikan bahwa program atau proyek dapat berjalan secara berkelanjutan setelah keterlibatan telah berakhir. Dalam konteks pengembangan program, *exit strategy* sangat penting untuk memastikan bahwa dampak positif dari program yang telah berjalan bisa tetap berlanjut, meskipun dukungan eksternal berkurang atau dihentikan.

Menurut Alan Fowler “Seorang ahli dalam bidang pembangunan internasional, khususnya yang berkaitan dengan organisasi non-pemerintah (NGO) dan masyarakat sipil”. Dalam bukunya “*Striking a Balance: A Guide to Enhancing the Effectiveness of Non-Governmental Organisations in International Development* (Mencapai Keseimbangan: Panduan untuk Meningkatkan Efektivitas Organisasi Non-Pemerintah dalam Pembangunan Internasional)”, menjelaskan bahwa Strategi Pengakhiran (*Exit Strategy*) merupakan “proses yang direncanakan dengan hati-hati, di mana organisasi eksternal seperti LSM atau donor secara bertahap menarik dukungannya terhadap suatu program atau proyek dengan tujuan memastikan bahwa program tersebut dapat berkelanjutan secara mandiri oleh penerima manfaat atau lembaga lokal”.

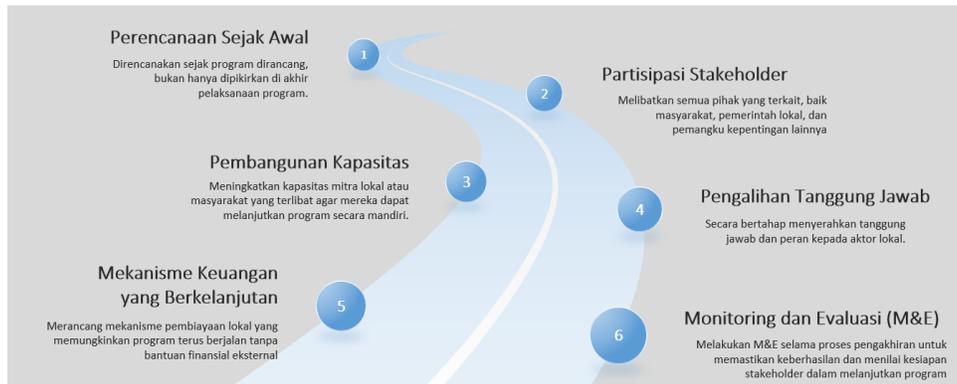
Strategi Pengakhiran (*Exit Strategy*) sangat penting dalam konteks keberlanjutan program atau proyek pembangunan, bisnis, maupun investasi karena memiliki beberapa alasan utama, seperti:

1. Menjamin Keberlanjutan Program
Exit strategy membantu memastikan bahwa manfaat dari program atau proyek akan berlanjut setelah keterlibatan organisasi atau donor berakhir. Tanpa perencanaan *exit strategy* yang baik, program dapat berhenti secara tiba-tiba, menyebabkan hasil yang telah dicapai menjadi tidak berkelanjutan atau hilang sama sekali.
2. Mengurangi Ketergantungan
Dalam banyak proyek, terutama di bidang pembangunan, ada risiko bahwa komunitas atau penerima manfaat menjadi terlalu bergantung pada bantuan eksternal. *Exit strategy* memungkinkan peralihan tanggung jawab secara bertahap ke pemangku kepentingan lokal, sehingga mereka mampu menjalankan program secara mandiri.
3. Mengelola Sumber Daya Secara Efisien
Exit strategy memungkinkan organisasi untuk merencanakan pengelolaan sumber daya (keuangan, waktu, dan tenaga) secara lebih efisien. Dengan memiliki rencana penarikan yang jelas, organisasi dapat memastikan bahwa sumber daya tidak terbuang percuma pada tahap akhir proyek dan dapat dialokasikan untuk program atau proyek lainnya.
4. Mengurangi Risiko Kegagalan
Tanpa *exit strategy*, program berisiko gagal ketika organisasi atau donor menarik diri. *Exit strategy* meminimalkan risiko ini dengan memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana komunitas atau mitra lokal dapat mengambil alih program dan melanjutkannya dengan sukses.
5. Memastikan Pengalihan Tanggung Jawab
Exit strategy membantu mempersiapkan penerima manfaat atau mitra lokal untuk mengambil alih program dengan memberikan pelatihan, sumber daya, dan dukungan yang diperlukan. Ini juga memungkinkan pengalihan tanggung jawab secara terencana dan sistematis sehingga proses transisi berjalan lancar.
6. Menilai Keberhasilan Program
Exit strategy sering kali dilengkapi dengan mekanisme monitoring dan evaluasi pasca-program. Ini memungkinkan organisasi untuk mengevaluasi sejauh mana dampak positif program tetap berlangsung setelah intervensi eksternal berakhir, serta menilai keberhasilan program secara keseluruhan.
7. Menjaga Reputasi Organisasi
Organisasi yang merencanakan *exit strategy* secara matang cenderung memiliki reputasi yang lebih baik karena menunjukkan tanggung jawab terhadap keberlanjutan proyek. Ini juga meningkatkan kredibilitas organisasi di mata donor dan pemangku kepentingan lainnya.
8. Mengoptimalkan Pembelajaran dan Inovasi
Exit strategy memberikan kesempatan bagi organisasi untuk merefleksikan dan mendokumentasikan pelajaran yang dipetik selama pelaksanaan proyek. Pembelajaran

ini dapat digunakan untuk mengembangkan model yang lebih baik di masa depan atau direplikasi dalam konteks lain.

Unsur-unsur Strategi Pengakhiran (*Exit Strategy*)

Unsur-unsur penting dalam *exit strategy* berfungsi sebagai fondasi untuk memastikan keberlanjutan program atau proyek setelah dukungan eksternal berakhir. Ada beberapa unsur penting yang perlu diperhatikan dalam merancang dan melaksanakan *exit strategy*: 1) perencanaan sejak awal, 2) partisipasi stakeholder, 3) pembangunan kapasitas, 4) pengalihan tanggung jawab, 5) mekanisme keuangan yang berkelanjutan, serta 6) monitoring dan evaluasi (M&E). Setiap unsur harus diperhatikan sejak awal siklus program untuk meminimalkan risiko kegagalan.



Gambar 9. Unsur-unsur Strategi Pengakhiran (*Exit Strategy*)

Langkah-Langkah Menyusun Strategi Pengakhiran (*Exit Strategy*)

Langkah-langkah menyusun *exit strategy* harus dilakukan secara terencana dan komprehensif dengan melibatkan pemangku kepentingan, membangun kapasitas lokal, dan memastikan adanya sumber daya yang memadai. Dengan mengikuti langkah-langkah yang ada, program dapat berlanjut secara mandiri dan memberikan manfaat jangka panjang bahkan setelah dukungan eksternal berakhir.



Gambar 10. Langkah dalam Menyusun Strategi Pengakhiran (*Exit Strategy*)

Tipe-tipe Strategi Pengakhiran (*Exit Strategy*)

1. *Phasing Down*

Strategi untuk secara perlahan mengurangi keterlibatan atau dukungan dalam suatu program, dengan tetap menjaga keberlanjutan & stabilitas. Ini memungkinkan pemangku kepentingan lokal untuk secara bertahap mengambil alih tanggung jawab, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal. Salah satu contoh dalam program pengembangan kesehatan; Jika sebuah NGO internasional mendukung program kesehatan di negara berkembang, mereka mungkin memulai phasing down dengan mengurangi bantuan teknis atau keuangan sambil meningkatkan keterlibatan tenaga kesehatan lokal. Program tetap berjalan, tetapi dengan intensitas atau sumber daya yang lebih sedikit.

2. *Phasing Out*

Strategi yang penting dalam mengakhiri keterlibatan pihak eksternal dalam sebuah program secara bertahap, dengan tujuan agar program tersebut tetap berkelanjutan dan dikelola oleh komunitas atau lembaga lokal. Ini memastikan bahwa hasil-hasil positif dari program dapat terus berjalan setelah donor atau pihak eksternal meninggalkan proyek tersebut. Salah satu contoh dalam program sosial; Program kesehatan yang dilaksanakan oleh NGO internasional di suatu negara mungkin akan melakukan phase-out dengan cara melatih staf lokal untuk menjalankan layanan tersebut dan kemudian secara bertahap menarik semua keterlibatan NGO tersebut.

3. *Phasing Over*

Proses dalam memastikan bahwa program atau proyek dapat terus berlanjut setelah keterlibatan pihak eksternal berkurang. Dengan mengalihkan tanggung jawab secara bertahap dan membangun kapasitas lokal, phasing over membantu menjaga keberlanjutan program dan mendorong kemandirian masyarakat atau organisasi yang terlibat. Salah satu contoh dalam program pembangunan; Jika sebuah organisasi internasional menjalankan program pembangunan masyarakat, mereka mungkin memulai phasing over dengan melatih staf lokal untuk mengambil alih pengelolaan program, kemudian secara bertahap mengurangi keterlibatan mereka sambil memberikan dukungan yang diperlukan.

Faktor-Faktor Keberhasilan Exit Strategy

1. Perencanaan yang Matang

Landasan penting dalam menyusun dan menjalankan strategi pengakhiran (*exit strategy*) yang efektif untuk memastikan keberlanjutan program atau proyek setelah dukungan eksternal berakhir. Tanpa perencanaan yang matang, proses transisi dan pengalihan tanggung jawab bisa berjalan kurang lancar, dan keberlanjutan program bisa terancam. Oleh karena itu, dengan perencanaan yang komprehensif dan strategis, *exit strategy* dapat berjalan dengan lancar dan program dapat terus berlanjut secara mandiri setelah dukungan eksternal berakhir.

2. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Elemen kunci dalam menyusun dan menjalankan strategi pengakhiran (*exit strategy*) untuk memastikan keberlanjutan program atau proyek setelah dukungan eksternal

berakhir. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau peran dalam keberhasilan suatu program, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk komunitas lokal, pemerintah, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Keterlibatan yang efektif dapat meningkatkan rasa kepemilikan, komitmen, dan kemampuan untuk melanjutkan program setelah fase transisi.

3. Pengembangan Kapasitas Lokal

Proses yang dirancang untuk memperkuat kemampuan individu, organisasi, dan komunitas lokal dalam mengelola program secara mandiri dan berkelanjutan setelah dukungan eksternal berakhir. Ini merupakan elemen kunci dalam strategi pengakhiran (*exit strategy*), karena memastikan bahwa pemangku kepentingan lokal memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya yang diperlukan untuk melanjutkan program secara mandiri. Dengan memperkuat kemampuan pemangku kepentingan lokal, baik secara individu maupun organisasi, mereka akan lebih siap untuk mengambil alih tanggung jawab dan melanjutkan program secara mandiri setelah fase dukungan eksternal berakhir. Pendekatan ini melibatkan pelatihan berkelanjutan, penguatan tata kelola organisasi, transfer teknologi, serta upaya untuk membangun kemitraan dan kemandirian finansial. Melalui pengembangan kapasitas yang efektif, keberlanjutan program dapat terjamin dan manfaat yang dihasilkan dapat terus dinikmati oleh komunitas lokal.

4. Sumber Daya yang Memadai

Elemen penting dalam strategi pengakhiran (*exit strategy*) untuk memastikan keberlanjutan program setelah dukungan eksternal berakhir. Sumber daya ini mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melanjutkan program, baik itu sumber daya manusia, finansial, material, maupun infrastruktur. Ketersediaan dan pengelolaan yang efektif atas sumber daya ini menjadi kunci bagi pemangku kepentingan lokal untuk dapat mempertahankan program secara mandiri. Pengelolaan yang efektif terhadap sumber daya ini, didukung dengan transparansi, pengawasan, dan evaluasi yang baik, akan memastikan bahwa program tetap berkelanjutan dan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.

5. Monitoring dan Evaluasi

Dua elemen kunci yang memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program, termasuk dalam konteks strategi pengakhiran (*exit strategy*). M&E membantu melacak kemajuan, mengidentifikasi masalah, mengevaluasi efektivitas program, serta menilai kesiapan pemangku kepentingan lokal dalam mengambil alih program. Dalam *exit strategy*, M&E juga memainkan peran penting dalam menentukan apakah semua elemen keberlanjutan telah terpenuhi sebelum program eksternal berakhir. Dengan pendekatan M&E yang baik, *exit strategy* dapat diterapkan dengan lebih percaya diri dan program dapat terus berkelanjutan dengan dampak positif yang berkelanjutan.

6. Fleksibilitas dan Adaptabilitas

Unsur penting dalam strategi pengakhiran (*exit strategy*) dengan memastikan bahwa program dapat berlanjut secara efektif dalam menghadapi perubahan kondisi. Fleksibilitas memungkinkan penyesuaian strategi di tengah jalannya program,

sementara adaptabilitas mengacu pada kemampuan pemangku kepentingan lokal dan pelaksana program untuk menyesuaikan diri dengan perubahan situasi atau tantangan baru yang muncul. Dengan memiliki strategi yang fleksibel, tim program dapat menyesuaikan pendekatan dan waktu pelaksanaan berdasarkan perkembangan yang terjadi. Sementara itu, adaptabilitas memperkuat kapasitas pemangku kepentingan lokal untuk tetap bertahan dan berkembang, memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang tanpa bergantung pada bantuan eksternal.

7. Komunikasi yang Jelas

Salah satu elemen fundamental dalam penerapan strategi pengakhiran (*exit strategy*) untuk keberlanjutan program. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami tujuan, proses, peran, dan tanggung jawab masing-masing, sehingga dapat menghindari kebingungan atau kesalahpahaman yang dapat mengganggu keberlanjutan program setelah pihak eksternal mundur. Dengan menyusun pesan yang terstruktur, transparan, menggunakan saluran komunikasi yang sesuai, dan membangun mekanisme umpan balik yang kuat, strategi pengakhiran dapat diimplementasikan dengan sukses dan program dapat terus berkelanjutan tanpa bergantung pada dukungan eksternal.

8. Dukungan dari Pihak Eksternal

Salah satu elemen penting dalam strategi pengakhiran (*exit strategy*) untuk keberlanjutan program. Dukungan ini mencakup bantuan dari lembaga donor, mitra internasional, pemerintah, maupun lembaga non-pemerintah, baik dalam bentuk pendanaan, pengembangan kapasitas, atau pengawasan. Peran pihak eksternal sangat penting, terutama dalam masa transisi ketika program dialihkan ke pemangku kepentingan lokal. Dukungan yang berkelanjutan dari pihak eksternal dapat membantu menjamin kelangsungan program setelah fase pengakhiran. Dukungan dari pihak eksternal memainkan peran penting dalam membantu pemangku kepentingan lokal menghadapi transisi menuju kemandirian dalam pengelolaan program. Dukungan ini dapat berupa pendanaan, pelatihan, teknologi, atau kemitraan, yang semuanya bertujuan untuk memastikan bahwa program berkelanjutan dan tidak berhenti setelah pihak eksternal mundur. Namun, penting untuk mengelola dukungan ini dengan hati-hati agar tidak menciptakan ketergantungan yang berlebihan, melainkan memfokuskan pada pemberdayaan dan kemandirian lokal untuk keberlanjutan program di masa depan.

9. Fokus pada Hasil dan Keberlanjutan

Prinsip penting dalam perencanaan dan implementasi strategi pengakhiran (*exit strategy*) untuk memastikan bahwa program atau proyek dapat bertahan lama setelah dukungan dari pihak eksternal berakhir. Keberlanjutan tidak hanya berarti menjaga kelangsungan program, tetapi juga memastikan bahwa dampak dan hasil dari program terus memberikan manfaat jangka panjang bagi pemangku kepentingan lokal. Dengan merencanakan secara matang, memberdayakan pemangku kepentingan lokal, dan mengembangkan sistem monitoring yang efektif, program dapat mencapai hasil yang diinginkan dan menjamin keberlanjutan dampak positifnya dalam jangka panjang.

Upaya ini tidak hanya memastikan kelangsungan program tetapi juga mendorong kemandirian dan daya tanggap pemangku kepentingan lokal dalam menghadapi tantangan di masa depan.

10. Komitmen Jangka Panjang

Elemen krusial dalam keberhasilan dan keberlanjutan suatu program atau proyek. Dalam konteks strategi pengakhiran (*exit strategy*), komitmen ini mencakup kesepakatan dan dedikasi dari semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa hasil dan manfaat dari program dapat terus berlanjut meskipun dukungan eksternal berkurang atau berakhir. Dengan melibatkan pemangku kepentingan, membangun komunikasi yang transparan, mengembangkan kapasitas, dan menciptakan mekanisme pendanaan yang berkelanjutan, program dapat berhasil melanjutkan hasil positifnya meskipun dukungan eksternal berkurang. Menghadapi tantangan yang mungkin muncul dan merespons dengan fleksibilitas juga penting untuk menjaga komitmen ini. Dengan demikian, komitmen jangka panjang tidak hanya menjamin keberlanjutan program, tetapi juga mendorong kemandirian dan daya tanggap pemangku kepentingan lokal dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Risiko yang terjadi jika Exit Strategy tidak disiapkan

1. Kehilangan Keberlanjutan Program
2. Ketergantungan yang Berlanjut
3. Pengalihan Tanggung Jawab yang Buruk
4. Kehilangan Pengetahuan dan Keterampilan
5. Risiko Finansial
6. Keterlibatan Pemangku Kepentingan yang Minim
7. Konflik Antara Pemangku Kepentingan
8. Kualitas Layanan Menurun
9. Penurunan Moral dan Motivasi
10. Dampak Negatif pada Penerima Manfaat

Jika strategi pengakhiran (*exit strategy*) tidak disiapkan dengan baik, ada sejumlah risiko yang dapat terjadi, baik bagi keberlanjutan program maupun dampak yang dihasilkan. Tanpa perencanaan pengakhiran yang matang, banyak program atau proyek yang gagal mencapai tujuan jangka panjangnya atau mempertahankan hasil yang sudah dicapai.

Tantangan dalam Exit Strategy

1. Kurangnya Komitmen Stakeholder Lokal:

Kurangnya komitmen stakeholder lokal dapat menyebabkan program kehilangan keberlanjutan dan gagal dalam mencapai dampak jangka panjang. Oleh karena itu, membangun komitmen yang kuat melalui keterlibatan awal, komunikasi yang transparan, pengembangan kapasitas, dan kolaborasi erat adalah langkah-langkah penting yang harus dilakukan. Pemangku kepentingan lokal yang berkomitmen akan menjadi pilar utama dalam memastikan bahwa program terus memberikan manfaat bagi komunitas meskipun dukungan eksternal berakhir.

2. Keterbatasan Kapasitas dan Sumber Daya;

Keterbatasan kapasitas dan sumber daya sebagai tantangan besar dalam memastikan keberlanjutan program setelah exit strategy diterapkan. Untuk mengatasi keterbatasan ini, organisasi perlu fokus pada pengembangan kapasitas lokal, diversifikasi sumber daya, dan membangun kemitraan yang kuat dengan pemangku kepentingan lokal. Dengan cara ini, program dapat tetap berjalan meskipun dukungan eksternal berhenti, dan hasil yang telah dicapai bisa dipertahankan dalam jangka panjang.

3. Kondisi Sosial dan Ekonomi yang Tidak Stabil

Ketidakstabilan ini bisa muncul dari berbagai faktor, seperti krisis ekonomi, konflik politik, atau bencana alam. Untuk memastikan bahwa program tetap berkelanjutan dalam kondisi yang tidak menentu, perlu adanya penilaian risiko yang tepat, pengembangan kapasitas lokal yang kuat, diversifikasi sumber daya, serta strategi fleksibel yang mampu beradaptasi dengan perubahan situasi. Dengan pendekatan yang tepat, program dapat tetap bertahan dan memberikan manfaat jangka panjang meskipun dihadapkan pada kondisi yang tidak stabil.

Contoh Implementasi Strategi Pengakhiran (*Exit Strategy*)

1. Program: Pengembangan Pertanian Berkelanjutan di Desa

- Tujuan Program untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal dengan memperkenalkan metode pertanian berkelanjutan seperti teknik agroforestry, diversifikasi tanaman, dan irigasi hemat air.
- Exit Strategy:
 - *Phasing Over* (Alih Tanggung Jawab ke Pemangku Kepentingan Lokal): Ketika program mendekati akhir, tanggung jawab penuh untuk mengelola dan menjalankan kegiatan pertanian berkelanjutan dialihkan kepada koperasi petani setempat dan pemerintah desa. Koperasi diberdayakan selama program berlangsung dengan pelatihan manajemen dan agribisnis, sehingga mereka mampu melanjutkan program secara mandiri.
 - Pengembangan Kapasitas Lokal: Petani dilatih tentang teknik pertanian modern dan berkelanjutan, serta diberikan akses ke sumber daya seperti bibit, alat pertanian, dan pasar.
 - Diversifikasi Pendanaan: Sebelum program berakhir, koperasi petani dan pemerintah desa didorong untuk mengakses dana dari lembaga keuangan mikro lokal, yang kemudian menjadi sumber utama modal mereka pasca program.

- Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Meski program selesai, pemantauan terus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan metode yang diperkenalkan.
 - Hasil: Setelah program donor berakhir, petani mampu menerapkan metode pertanian berkelanjutan secara mandiri dan bahkan memperluas usaha dengan mengakses pasar yang lebih besar, berkat keterampilan manajemen dan keuangan yang mereka peroleh selama program.
2. Program: Peningkatan Kemandirian Ekonomi Perempuan
- Tujuan Program: Meningkatkan pendapatan perempuan di pedesaan dengan melatih mereka dalam keterampilan kewirausahaan dan manajemen usaha kecil.
 - Exit Strategy:
 - *Phasing Over* (Alih Tanggung Jawab ke Komunitas Lokal): Setelah lima tahun pelatihan intensif, program dialihkan ke koperasi perempuan yang dibentuk selama program berlangsung. Koperasi ini kemudian menjadi lembaga yang mengelola dan mendukung usaha kecil perempuan secara mandiri.
 - Pengembangan Kapasitas Kewirausahaan: Perempuan diberikan pelatihan keterampilan teknis dan manajerial, serta akses ke pasar dan modal. Sebelum program berakhir, beberapa di antara mereka menjadi mentor bagi kelompok perempuan lainnya.
 - Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Lokal: Program bekerja sama dengan bank lokal untuk menyediakan akses kredit mikro bagi perempuan yang ingin memulai atau mengembangkan bisnis mereka.
 - Monitoring Jangka Panjang: Program memberikan pelatihan manajemen keuangan kepada koperasi untuk memastikan pengelolaan dana dan keberlanjutan bisnis.
 - Hasil: Banyak perempuan yang berhasil memulai usaha kecil mereka dan koperasi yang didirikan menjadi pusat dukungan ekonomi bagi perempuan di daerah tersebut. Setelah donor berhenti, koperasi tetap berjalan dengan baik, dan kesejahteraan ekonomi perempuan di wilayah itu meningkat.

Evaluasi / Latihan Soal

1. Mengapa Strategi Pengakhiran (*exit strategy*) untuk keberlanjutan program penting dilakukan?
2. Jelaskan apa saja risiko yang bisa terjadi jika Strategi Pengakhiran (*exit strategy*) untuk keberlanjutan program tidak disiapkan dengan baik?

BAB 14. Kapita Selekta Pemberdayaan Masyarakat (Kasus: Pertanian di Indonesia)

Materi pada Bab 14 ini memiliki muatan sebagai berikut :

- **Capaian belajar untuk sikap dan perilaku (*Learning Outcome for Attitudes and Values*) :**

Sikap:

- A. OC 4: Mampu mengaplikasikan dan memanfaatkan IPTEKS dalam penyelesaian masalah pada bidang agribisnis yang adaptif terhadap perubahan lingkungan dengan mengaplikasikan model pemberdayaan masyarakat.

Keterampilan Umum

- B. OC 5: Mampu berkomunikasi dan bernegosiasi secara efektif dengan pemangku kepentingan dalam pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mewujudkan agribisnis yang berkelanjutan dan efisien dalam mencapai keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.
- C. OC 6: Mampu menggunakan metode dan merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat dalam menghadapi tantangan program pembangunan agribisnis.
- D. OC 7: Mampu mengkomunikasikan pendekatan dan tahapan pemberdayaan masyarakat untuk keberhasilan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Pendahuluan

Pemberdayaan Masyarakat Umum berfokus pada pengembangan kapasitas individu atau kelompok dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Program pemberdayaan umum biasanya lebih luas dan mencakup berbagai sektor tanpa terfokus pada satu bidang tertentu. Proses pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri.

Pemberdayaan Masyarakat di Sektor Agribisnis berfokus spesifik pada peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan usaha terkait produksi pangan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan akses pasar bagi masyarakat yang terlibat dalam agribisnis. Pemberdayaan agribisnis dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti: Pendidikan dan pelatihan, Penyuluhan dan pendampingan, Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, Konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, Kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemberdayaan masyarakat harus berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat, di antaranya: (1) Peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, (2) Kemandirian masyarakat dalam mengambil keputusan, (3) Pengembangan potensi lokal dan sumber daya manusia, dan (4) Pengembangan kemitraan antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.

Agribisnis menjadi sektor kunci dalam pemberdayaan masyarakat di pedesaan karena beberapa alasan utama yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

1. Sumber Utama Pendapatan Masyarakat Pedesaan

Mayoritas penduduk pedesaan bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan utama. Agribisnis, yang mencakup seluruh rantai nilai dari produksi hingga pemasaran produk pertanian, memberi peluang kerja bagi petani, peternak, nelayan, dan pekerja di industri pengolahan hasil pertanian. Dengan memberdayakan masyarakat dalam agribisnis, mereka dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Diversifikasi usaha agribisnis (misalnya, pengolahan hasil pertanian, distribusi, hingga pemasaran) membuka peluang kerja yang lebih luas dan mendorong peningkatan ekonomi lokal.

2. Potensi Sumber Daya Alam di Pedesaan

Wilayah pedesaan biasanya memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti tanah yang subur, air yang cukup, dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Sumber daya ini merupakan modal utama untuk mengembangkan agribisnis. Dengan mengoptimalkan potensi, masyarakat dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mengolah hasilnya menjadi produk bernilai tambah. Pemanfaatan kearifan lokal dan praktik pertanian tradisional yang sesuai dengan kondisi lokal dapat meningkatkan keberlanjutan agribisnis sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan.

3. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi

Ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dengan mengembangkan agribisnis lokal, masyarakat dapat memproduksi pangan yang cukup untuk kebutuhan mereka sendiri, sekaligus menjual kelebihan produksi untuk pasar yang lebih luas. Ini juga membantu mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Selain itu, agribisnis yang berkembang dapat memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat terhadap pangan bergizi dan meningkatkan kualitas hidup mereka melalui diet yang lebih seimbang dan sehat.

4. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Desa

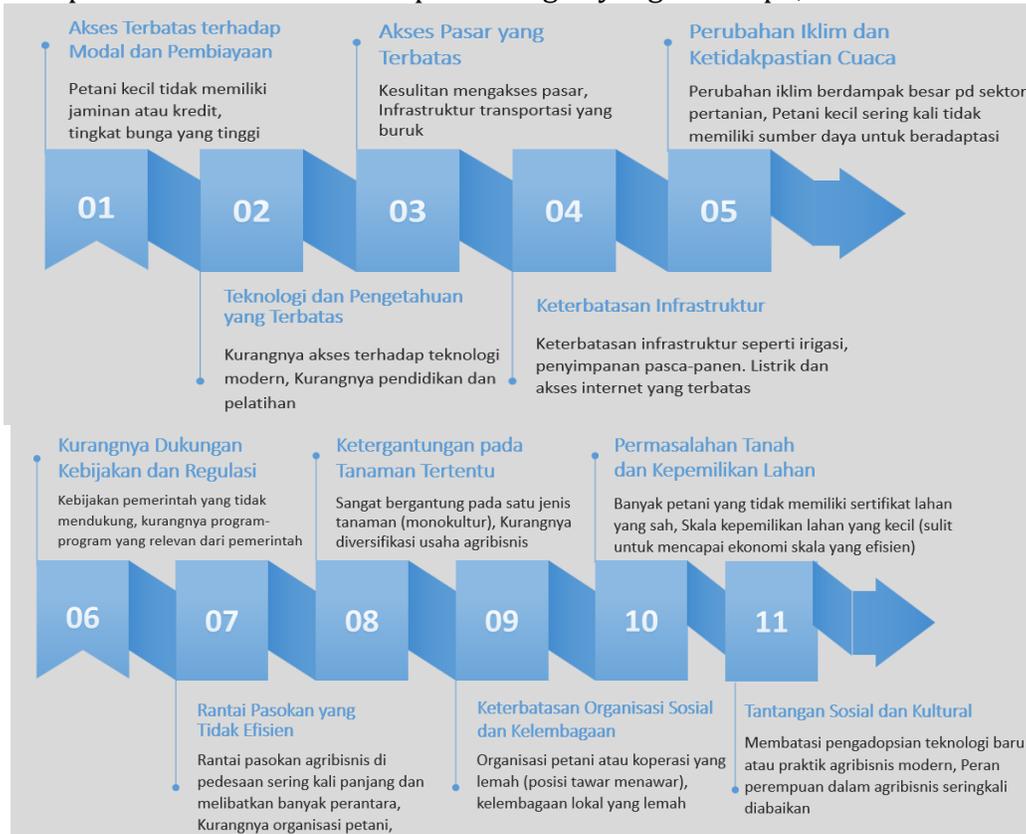
Agribisnis yang dikelola dengan baik dapat membuat masyarakat pedesaan lebih mandiri secara ekonomi dan lebih kompetitif di pasar nasional maupun internasional. Ini terutama berlaku jika produk agribisnis tersebut memiliki keunggulan komparatif seperti produk organik, hasil tani lokal yang khas, atau produk-produk yang diolah menjadi komoditas bernilai tinggi. Inovasi teknologi dalam agribisnis, seperti penggunaan irigasi modern, bibit unggul, dan teknologi digital untuk pemasaran, dapat

- meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional, sehingga memberikan keuntungan yang lebih besar bagi pelaku agribisnis di pedesaan.
5. **Memanfaatkan Teknologi untuk Meningkatkan Produktivitas**
Penggunaan teknologi tepat guna dalam sektor agribisnis, seperti alat-alat pertanian modern, teknik budi daya yang efisien, dan teknologi pengolahan pangan, dapat membantu meningkatkan hasil produksi pertanian. Ini sangat penting di pedesaan, di mana sebagian besar petani masih menggunakan metode tradisional yang mungkin kurang efisien. Selain itu, perkembangan teknologi informasi (misalnya, aplikasi *e-commerce* untuk pertanian) memudahkan petani mengakses informasi tentang harga pasar, praktik pertanian terbaik, dan peluang pasar baru.
 6. **Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan**
Pemberdayaan masyarakat melalui agribisnis berperan penting dalam mengurangi kemiskinan di pedesaan. Dengan meningkatkan keterampilan petani dan memberikan akses ke pasar yang lebih luas, agribisnis dapat secara signifikan meningkatkan pendapatan petani kecil dan usaha kecil menengah (UKM) di sektor ini. Pembangunan infrastruktur yang mendukung agribisnis, seperti jalan, irigasi, dan fasilitas penyimpanan, juga berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat karena mempermudah akses ke pasar dan meningkatkan efisiensi produksi.
 7. **Pemberdayaan Perempuan dan Kelompok Rentan**
Perempuan di pedesaan sering kali memainkan peran penting dalam agribisnis, terutama dalam hal pengolahan hasil pertanian, manajemen usaha tani kecil, dan pemasaran. Dengan memberdayakan perempuan melalui pelatihan agribisnis dan akses ke modal, mereka dapat lebih berdaya dalam meningkatkan pendapatan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan komunitas. Selain perempuan, bisa juga dapat memberdayakan kelompok rentan, seperti pemuda dan kelompok marginal, dengan memberi mereka keterampilan dan kesempatan kerja yang sesuai dengan potensi lokal.
 8. **Mendorong Keberlanjutan Lingkungan**
Agribisnis yang berkelanjutan membantu menjaga ekosistem alami di pedesaan. Praktik-praktik seperti pertanian organik, agroforestri, dan pengelolaan sumber daya yang bijak mendukung pelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan produktivitas lahan. Sektor agribisnis yang memperhatikan aspek lingkungan juga bisa mendukung keberlanjutan sumber daya alam, yang pada gilirannya memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan dalam jangka panjang.

Tantangan Pedesaan dalam Pemberdayaan Agribisnis

Masyarakat pedesaan menghadapi berbagai tantangan dalam pemberdayaan agribisnis, yang dapat mempengaruhi produktivitas, keuntungan, dan kesejahteraan ekonomi. Tantangan-tantangan menggambarkan bahwa pemberdayaan agribisnis di pedesaan memerlukan pendekatan holistik yang mencakup perbaikan dalam akses modal, teknologi, infrastruktur, dukungan kebijakan, dan pengembangan kapasitas masyarakat. Program-program pemberdayaan yang sukses harus mampu mengatasi hambatan-

hambatan ini agar agribisnis dapat berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat pedesaan. Berikut beberapa tantangan yang dihadapi ;



Gambar 11. Tantangan Pedesaan dalam Pemberdayaan Agribisnis

Pertanian di Indonesia

1. Era Penjajahan (1602-1942)

Pada masa penjajahan, pertanian di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan eksploitasi kolonial, yang memprioritaskan produksi tanaman ekspor untuk pasar internasional daripada kebutuhan masyarakat lokal. Kebijakan seperti Tanam Paksa dan Sistem Perkebunan Besar menempatkan petani dalam situasi yang sulit, di mana mereka dipaksa bekerja keras dengan keuntungan yang sangat sedikit. Meskipun kebijakan ini menguntungkan pemerintah kolonial Belanda secara ekonomi, dampaknya sangat merugikan kesejahteraan petani lokal dan berkontribusi pada kemiskinan serta ketimpangan sosial di pedesaan.

2. Pasca Kemerdekaan

Pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung perekonomian negara, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan bergantung pada pertanian sebagai sumber penghidupan. Sektor pertanian Indonesia mengalami berbagai perubahan besar, mulai dari

reformasi agraria, Revolusi Hijau, hingga modernisasi pertanian. Meskipun Indonesia berhasil mencapai beberapa pencapaian penting, seperti swasembada beras pada era Orde Baru, sektor ini masih menghadapi banyak tantangan seperti fragmentasi lahan, degradasi lingkungan, perubahan iklim, serta ketergantungan pada impor. Untuk masa depan, pengembangan agribisnis dan teknologi pertanian menjadi fokus utama untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia.

3. Orde Baru

Masa Orde Baru di Indonesia, yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, ditandai oleh stabilitas politik dan kebijakan pembangunan yang terfokus, termasuk dalam sektor pertanian. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pertanian menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan ekonomi nasional.

- Adanya revolusi hijau diperkenalkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, terutama dalam produksi padi. Program ini meliputi penggunaan bibit unggul, pupuk kimia, dan teknik irigasi yang lebih efisien
- Program Bimbingan Massal (Bimas) diperkenalkan untuk memberikan pelatihan kepada petani mengenai teknik pertanian modern dan meningkatkan akses mereka terhadap input pertanian.
- Pencapaian besar Orde Baru adalah tercapainya swasembada beras pada tahun 1984. Indonesia berhasil meningkatkan produksi beras sehingga tidak lagi bergantung pada impor beras.

Selama masa Orde Baru, sektor pertanian Indonesia mengalami transformasi signifikan melalui kebijakan Revolusi Hijau dan upaya untuk mencapai swasembada pangan. Meskipun ada banyak pencapaian, tantangan lingkungan dan ketimpangan dalam kesejahteraan petani tetap menjadi masalah yang perlu diatasi. Pembangunan infrastruktur pertanian juga merupakan aspek penting dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di era ini.

4. Pasca Orde Baru

Pasca Orde Baru, yang berakhir pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang membawa banyak perubahan dalam sektor pertanian. Perubahan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi selama periode ini berdampak signifikan pada cara pertanian dikelola dan diperbaiki. Fokus pada Ketahanan Pangan: Setelah krisis ekonomi 1997-1998, pemerintah memperkuat kebijakan untuk mencapai ketahanan pangan nasional, dengan fokus pada peningkatan produksi pangan lokal dan keberlanjutan. Lalu, berfokus pada Pertanian Berkelanjutan: Terdapat upaya untuk mempromosikan pertanian berkelanjutan dan organik sebagai respons terhadap dampak negatif penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan selama masa Orde Baru. Pasca Orde Baru, sektor pertanian Indonesia mengalami perubahan yang signifikan, dengan fokus pada keberlanjutan, pengembangan agribisnis, dan desentralisasi kebijakan. Meskipun ada banyak pencapaian dalam meningkatkan ketahanan pangan dan pengembangan infrastruktur pertanian, tantangan seperti dampak lingkungan, perubahan iklim, dan ketergantungan pada impor masih harus diatasi. Dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan dan penggunaan teknologi

modern, sektor pertanian Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang lebih baik di masa depan.

Tujuan Revitalisasi Pertanian

1. Ketersediaan
Meningkatkan kemampuan produksi bahan pangan strategis, meningkatkan ketersediaan pangan asal ternak, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, meningkatkan produksi dan ekspor komoditas pertanian.
2. Distribusi
Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, meningkatkan produksi dan ekspor komoditas pertanian, dan terjaganya harga yang terjangkau.
3. Konsumsi
Diversifikasi konsumsi pangan berbahan baku lokal, Mutu dan keamanan pangan (beragam, bergizi, berimbang, aman & halal)

Tantangan Revitalisasi Pertanian

1. Daya Saing
Daya saing dalam revitalisasi pertanian sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan petani. Namun, terdapat berbagai tantangan yang dapat menghambat daya saing sektor pertanian, seperti Kualitas dan harga (harga, kualitas; standar dan penerapannya, performance dan packaging). Kunikan sebagai faktor pembeda (*rasa, kultur - location spesific*, kandungan nutrisi atau zat tertentu). Tantangan dalam meningkatkan daya saing di sektor pertanian sangat kompleks dan saling terkait. Upaya revitalisasi pertanian harus melibatkan pendekatan yang terintegrasi, termasuk peningkatan akses ke teknologi, pelatihan, akses pasar, dan dukungan kebijakan. Dengan mengatasi tantangan ini, diharapkan sektor pertanian dapat lebih kompetitif dan berkontribusi pada ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat
2. Mutu dan Keamanan pangan
Mutu dan keamanan pangan sebagai aspek yang sangat penting dalam proses revitalisasi pertanian. Peningkatan mutu dan keamanan pangan tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada daya saing produk pertanian di pasar domestik dan internasional, seperti ramah lingkungan, aman dikonsumsi atau tidak menggunakan bahan berbahaya, bersih dan sehat (bebas penyakit dan bukan sumber/pembawa penyakit)
Mutu dan keamanan pangan merupakan elemen kunci dalam revitalisasi pertanian yang berkontribusi pada ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan daya saing produk. Upaya untuk meningkatkan mutu dan keamanan pangan harus melibatkan pendekatan holistik, termasuk pelatihan, peningkatan infrastruktur, dan penerapan standar yang ketat. Dengan demikian, diharapkan sektor pertanian dapat berkembang secara berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan yang aman dan berkualitas.

Evaluasi / Latihan Soal

1. Jelaskan apa perbedaan antara pemberdayaan masyarakat umum dan pemberdayaan masyarakat di sektor agribisnis?
2. Mengapa agribisnis menjadi sektor kunci dalam pemberdayaan masyarakat di pedesaan.

Daftar Pustaka

Berikut adalah daftar pustaka yang relevan untuk topik "Membangun Jejaring Multi-Stakeholder dalam Pemberdayaan Masyarakat":

Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology Publications.

FAO. (2015). *Community Participation in Agricultural Development*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. (2014). *Pedoman Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2015). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Korten, D. C. (1980). *Community Organization and Rural Development: A Learning Process Approach*. *Public Administration Review*, 40(5), 480-511.

Mardikanto, T., & Soebianto, S. (2015). *Pengaruh Kebijakan Pembangunan Pertanian Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan*. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 20(1), 1-10.

Meyer, R., & Bakkes, J. (2021). *Collaborative Governance in Practice: The Case of Bali*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 31(2), 345-362.

Sulistiyanto, S., & Prasetyo, H. (2015). *Stakeholder Engagement in Community Development: A Case Study in Indonesia*. *Journal of Community Development*, 52(3), 265-278.

UNDP. (2019). *Inclusive Governance: The Key to Sustainable Development*. United Nations Development Programme.

World Bank. (2012). *The Role of Stakeholders in Development*. Washington, D.C.: The World Bank.